

A **J** **U** **R** **N** **A** **L** **A** **N** **A** **L** **I** **S** **I** **S** **I** **S** **S** **O** **S** **I** **A** **L**

Edisi 7/Desember 1998

PARTISIPASI RAKYAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

**Masyarakat Lokal dan Pembangunan: Upaya Pendampingan
Masyarakat Lokal**

Frida Rustiani dan Popon Anarita

**Wanatani Repong Damar: Pengelolaan Sumber Daya Alam
Lestari Oleh Masyarakat KRUI - Lampung**

Suwito

**Bengkar, Umaq, Uraat, dan Simpukng: Model Kearifan
Pengelolaan Lati-Tana Dayak Benuaq di Kalimantan Timur**

V. Nurita YS. dan Fidelis Nyongka

**Pengalaman Advokasi Masyarakat Korban Pencemaran Industri:
Kasus Kali Babon**

Eko Sulistyono

**Mencermati Ekonomi Kerakyatan dan Sumber Daya Lokal:
Belajar Dari Kepulauan Seribu**

Surya Mulandar



Pemimpin Umum:
Direktur Eksekutif
AKATIGA

Tim Redaksi:
Bambang Y. Sundayana
Popon Anarita dan
Frida Rustiani

Penyunting Bahasa:
A. Diana Handayani

**Penata Letak &
Perancang kulit:**
Budiman Pagarnegara

Diterbitkan Oleh:
Yayasan AKATIGA - Pusat
Analisis Sosial

Alamat Redaksi:
Jl. Raden Patah 28
Bandung 40132,
Telp./Faks:
(022) 250.2622
E-Mail:
Akatiga@indosat.net.id

DAFTAR ISI

EDITORIAL

Pengantar Editorial _____ 3

BAHASAN UTAMA

Masyarakat Lokal Dan Pembangunan:
Upaya Pendampingan Masyarakat Lokal
_____ 7

Wanatani *Repong Damar*: Pengelolaan
Sumber Daya Alam Lestari _____ 23

Bengkar, Umaq, Uraat, Dan Simpukng:
Model Kearifan Pengelolaan *Lati-Tana*
Dayak Benuaq Di Kalimantan Timur __ 39

Pengalaman Advokasi Masyarakat
Korban Pencemaran Industri: Kasus Kali
Babon _____ 49

Mencermati Ekonomi Kerakyatan dan
Sumber Daya Lokal: Belajar Dari
Kepulauan Seribu _____ 57

RUANG METODOLOGI

Panduan Dalam Pengembangan Institusi
Lokal Melalui Penelitian Tindak/Aksi __ 65

RESENSI BUKU

Dampak Industrialisasi Rumah Tangga Di
Pedesaan Jawa _____ 79

BERITA PERPUSTAKAAN _____ 85

SEPUTAR AKATIGA _____ 95

Topik Edisi Mendatang
Edisi 8 : Efektifitas
Program Bantuan Krisis

BAHASAN UTAMA

MASYARAKAT LOKAL DAN PEMBANGUNAN
Upaya Pendampingan Masyarakat Lokal

Frida Rustiani dan Popon Anarita

Peminggiran (marginalisasi) masyarakat lokal dan proyek pembangunan tampaknya menjadi dua sisi dari satu mata uang. Peminggiran masyarakat lokal terjadi umumnya karena secara ideologis pembangunan tidak menempatkan masyarakat (lokal) sebagai penerima manfaat utama. Di tingkat teknis, berbagai kesenjangan antara pembangunan dan potensi masyarakat lokal, justru seringkali ditonjolkan sebagai penyebab ketidakmampuan masyarakat lokal memanfaatkan kegiatan pembangunan yang ada di sekitarnya.

Dampak peminggiran masyarakat lokal ini dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan. Bentuk-bentuk peminggiran ini umumnya terjadi akibat hilangnya mata pencaharian penduduk, kerusakan lingkungan hidup, perubahan dan pergeseran

dalam tatanan kebudayaan, relasi antar individu dan kelompok serta berubahnya struktur politik. Oleh sebab itu, reformasi dalam hal perencanaan pembangunan mutlak diperlukan. Pelibatan masyarakat lokal sudah harus dimulai sejak pembangunan tersebut direncanakan. Namun demikian pada kegiatan-kegiatan pembangunan, khususnya kegiatan pengembangan industri yang terlanjur meminggirkan masyarakat lokal, upaya revitalisasi penting untuk dilakukan agar proses peminggiran ini berhenti dan bahkan mengembalikan 'milik' masyarakat yang hilang.

Berikut ini kami sampaikan pengalaman AKATIGA dalam pendampingan masyarakat yang terpinggirkan akibat pengembangan industri yang kurang memperhatikan aspek masyarakat lokal.

Perbedaan Kepentingan Antara Masyarakat- Pemerintah-Industri

Munculnya aktivitas industri di suatu wilayah selalu terkait dengan adanya berbagai kepentingan dari berbagai pihak, antara lain masyarakat lokal, Pemerintah dan Industri. Dari kepentingan masyarakat lokal yang biasanya masyarakat agraris, aktivitas industri diharapkan dapat membuka kesempatan kerja yang akan meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Dari sudut kepentingan Pemerintah, aktivitas industri merupakan satu bagian yang niscaya dan merupakan keharusan dalam menjalankan proses pembangunan agar dapat menyandang predikat negara lebih maju dan terjadinya pertambahan devisa negara. Sementara bagi para pengusaha yang mewakili kepentingan pihak industri, aktivitas industri selalu diorientasikan untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya, dengan ongkos produksi termasuk *labour cost* yang semurah mungkin.

Untuk itu, upaya pengembangan dan perluasan industri ke wilayah baru terus dijalankan.

Pada dasarnya ketiga pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dan potensial menimbulkan konflik. Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengubah sesuatu yang potensial konflik (bahkan beberapa diantaranya sudah manifest) menjadi satu kesepakatan kompromis yang menguntungkan semua pihak. Forum-forum yang mempertemukan ketiga pihak tersebut menjadi upaya sangat strategis sebagai ajang mendialogkan masing-masing kepentingan dan

membangun kesepakatan
ber-sama.

Tabel Proses Kegiatan

PROSES	URAIAN	KELUARAN
<p>MASALAH</p> <p>IDENTIFIKASI MASALAH :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masalah Lingkungan : <ul style="list-style-type: none"> - Kelangkaan air bersih - Limbah industri - Peralihan lahan pertanian menjadi area pabrik • Masalah Ekonomi : <ul style="list-style-type: none"> - Pengangguran - Industri tidak menyerap tenaga kerja setempat • Masalah Sosial : <ul style="list-style-type: none"> - Kesenjangan Sosial - Kriminalitas - Dekadensi Moral (?) 	<p>PROSES PERUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH</p> <p>WORKSHOP I :</p> <p>Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Pembentukan Mitraan <p>Peserta :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ka. Bappeda Kab. Sumedang - Ka. Pemerintahan Kecamatan Cikuruh - Staf Asmen III KLH Perwakilan Masyarakat AKATIGA <p>Hasil : Kesepakatan untuk melakukan mitraan usaha yang diharapkan menguntungkan kedua pihak.</p> <p>a. Pendekatan Kepada Masyarakat Untuk melihat potensi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat berkaitan dengan program mitraan.</p> <p>b. Pendekatan Kepada Industri Untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan industri dalam mendukung program mitraan antara lain peluang usaha apa yang bisa diberikan kepada masyarakat dan berdasarkan potensi dan kebutuhan yang ada.</p> <p>c. Pendekatan Kepada Pemerintah Untuk mengetahui peran lembaga-lembaga terkait terutama dari sead.</p>	<p>Terjalin KEMITRAAN antara MASYARAKAT, INDUSTRI dan PEMERINTAH dalam PMBS.</p> <p>WORKSHOP II :</p> <p>Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dan mencari masukan bagi perbaikan kinerja mitraan <p>Peserta :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemda Kabupaten Sumedang, Kandepperinda g. Staf Asmen III KLH, AKATIGA, Pengusaha, Masyarakat, Masyarakat. <p>Hasil :</p>

BAHASAN UTAMA

<p>METODOLOGI</p>	<p style="text-align: center;">RISET AKSI PARTISIPASI</p>
<p>PERAN LSM</p> <p>LAIN-LAIN</p>	<p style="text-align: center;">PENELITIAN</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi Kelompok : Dilakukan dengan pengurus Paguyuban dan anggota pekerja Paguyuban. Diskusi ini dilakukan terencana dengan agenda yang disusun berdasarkan "obrolan" pada saat peneliti melakukan monitoring. Topik diskusi iniatinya kenada yang dihadapi dan kebutuhan-kebutuhan kelompok. • Diskusi Periodik : Dilakukan oleh seluruh anggota pengurus Paguyuban pada waktu tertentu yang telah direncanakan untuk membahas masalah-masalah yang butuh penyelesaian segera. Diskusi ini biasanya berlangsung dalam rapat Pengurus. • Diskusi Perorangan : Diskusi ini dimaksudkan untuk melengkapi diskusi-diskusi yang lain atau sebagai bahan masukan untuk diskusi berikutnya terutama untuk hal-hal yang sulit terungkap di forum yang lebih besar. Dalam hal ini, fasilitator berkunjung ke rumah setiap pengurus atau anggota, topik diskusi biasanya hal-hal yang berkaitan dengan tugas masing-masing, pandangan dan harapan mereka terhadap Paguyuban, dsd. • FGD (Focus Group Discussion) : Dilakukan pada tahap awal pembentukan Paguyuban dengan peserta dari berbagai kalangan masyarakat baik pemerintahan desa maupun tokoh-tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan dari berbagai kalangan tersebut untuk perencanaan pembentukan Paguyuban. • Forum Diskusi Kemitraan : Forum ini dilakukan dua kali, yaitu pada awal dimulainya studi yang berupa Lokakarya Awal (Workshop I), dan pada akhir studi aksi berupa Lokakarya Akhir (Workshop II). Pada Lokakarya Awal biasanya dilakukan diskusi mengenai rencana kerja dan program-program yang akan dijalankan pada setiap tahap, sedangkan pada Lokakarya Akhir, biasanya merupakan diskusi evaluasi atas program-program yang telah dilaksanakan pada setiap tahap. <p>FASILITATOR DAN MEDIATOR : Dalam perannya sebagai fasilitator, LSM lebih berperan sebagai lembaga perantara atau <i>intermediary institution</i> yang mencoba menghubungkan antar sumber yang ada yang dapat digunakan untuk mensinergikan hubungan kemitraan yang sudah terjalin, sekaligus memulai upaya mengangakat masalah, pebaikan kualitas lingkungan hidup melalui diskusi-diskusi kecil baik di tingkat masyarakat, industri maupun pemerintahan.</p>	
<p>Bersama-sama melakukan persiapan tahap II</p>	

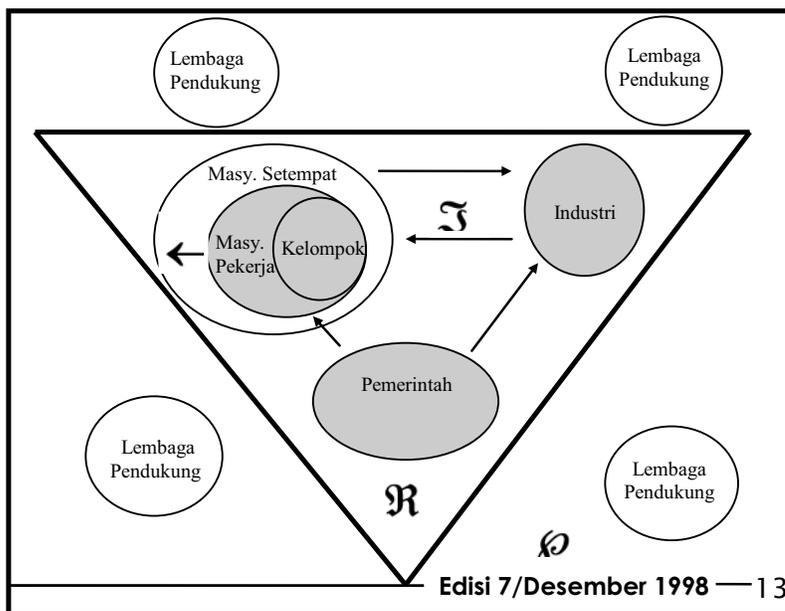
Rangkaian Dialog

Tahap pertama pemberdayaan masyarakat melalui hubungan kemitraan dengan pihak industri, dimulai dari penguatan kedalaman melalui kegiatan berkelompok dan kemudian dikembangkan pada penguatan yang lebih besar yaitu bermitra dengan pihak industri khususnya dalam kegiatan ekonomi. Berikut adalah desain hubungan kemitraan serta metodologi yang digunakan.

Hubungan kemitraan antara masyarakat-pemerintah-industri, mulai dari satu lingkup kegiatan yang terbatas, dalam arti tidak melibatkan semua penduduk dan hanya menyangkut sektor ekonomi masyarakat. Sektor ekonomi menjadi pilihan pertama berdasarkan pertimbangan bahwa perkembangan industri berlangsung secara bersamaan dengan proses pemiskinan akibat menyempitnya peluang kegiatan bagi perbaikan ekonomi bagi sebagian besar penduduk sekitar industri.

Konsep Hubungan Kemitraan

Desain Kemitraan



Pada struktur kemitraan di atas, tampak bahwa hubungan kemitraan sebagai ajang pemberdayaan masyarakat dikembangkan melalui beberapa tahapan perluasan yang terdiri dari:

(1) Sosialisasi, institusionalisasi dan konsolidasi.

Ide mengenai pembentukan hubungan kemitraan dikembangkan oleh kelompok yang dibentuk kemudian sebagai pengejawantahan proses institusionalisasi. Selanjutnya ide-ide yang kemudian muncul dalam kelompok diintegrasikan sebagai penyempurnaan ide awal kemitraan. Dalam tahap konsolidasi atau penguatan ke dalam, AKATIGA berperan sebagai fasilitator dalam merumuskan ide-ide yang muncul dari kelompok. Ide-ide dari kelompok ini terus didorong sehingga kemudian menjadi bagian proses pengembangan partisipasi masyarakat. Struktur kemitraan yang digambarkan di atas merupakan hasil rumusan ide-ide yang terkumpul dalam diskusi kelompok.

(2) Pengembangan usaha.

Ketika ide-ide dan konsep masyarakat mengenai kemitraan semakin utuh dan disepakati bersama, maka proses ini bergerak ke arah perealisasi ide. Pergerakan ke arah realisasi ini dimulai yang memperluas diskusi dengan melibatkan pihak industri. Diskusi-diskusi kali ini sudah mulai mengarah pada kegiatan subkontrak yang akan dilakukan. Diskusi lebih khusus lagi menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk disepakati.

(3) Pengembangan usaha yang lebih progresif harus menjadi bagian dalam perencanaan kegiatan kemitraan. Dalam rangka menyelamatkan dan mendorong perkembangan usaha tadi, hubungan kemitraan ini semakin memerlukan keterlibatan otoritas publik, dalam hal ini pemerintah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat bagi kedua belah pihak.

(4) Pengembangan program.

Yang paling pokok dalam tahap ini adalah mulai menggali dan merealisasikan beberapa faktor pendukung yang dibutuhkan dalam

mengembangkan kemitra-an ini.

Hubungan Kemitraan dalam Pola Subkontrak

Hubungan kemitraan yang terjalin antara masyarakat dan pihak industri pada tahap awal menyangkut kegiatan yang secara langsung berdampak ekonomis terhadap masyarakat yakni kegiatan **subkontrak**. Secara teoritis subkontrak didefinisikan sebagai :

Hubungan subkontrak ter-dapat dimana sebuah perusahaan (pihak prinsipal) memberi pesanan kepada pihak lain (subkontraktor) untuk mengerjakan bagian-bagian, komponen-komponen sub-assemblies atau assemblies untuk diinteg-rasikan kedalam suatu produk yang akan dipasarkan oleh pihak prinsipal (Unido, 1974)

Berdasarkan pengertian di atas, ada dua hal pokok yang terkandung dalam kegiatan sub-kontrak yaitu (1) perusahaan sebagai prinsipal

tidak harus mengerjakan sendiri seluruh proses produksi; (2) terdapat pihak lain yang dapat mengerjakan bagian-bagian tertentu di luar perusahaan yaitu usaha kecil sebagai subkontraktor. Hal spesifik dalam rancangan hubungan kemitraan yang dilaksanakan di Desa Cisempur dan Desa Cintamulya adalah hubungan subkontrak yang dilakukan melalui pendekatan kelompok/paguyuban (seperti terlihat pada gambar di atas).

Pendekatan kelompok digunakan sebagai salah satu faktor akselerasi dalam mencapai pemberdayaan masyarakat. Kelebihan pendekatan kelompok ini adalah secara bersama-sama mempunyai fungsi **penguatan** dan **pendidikan** bagi anggotanya. Penguatan terjadi karena dengan berkelompok posisi tawar masyarakat dihadapan pihak industri menjadi lebih baik. Sementara fungsi pendidikan terjadi karena dalam berkelompok terjadi saling mengajari, khususnya dalam hal kemampuan berorganisasi.

Tentu saja dengan menyerahkan ataupun menerima sebagian proses produksi, ada beberapa konsekuensi baik berupa keuntungan maupun risiko yang harus ditanggung baik oleh pihak perusahaan pemberi order atau prinsipal maupun masyarakat Desa Cisempur dan Desa Cintamulya. Di satu sisi, pihak perusahaan harus menanggung risiko tidak adanya jaminan kualitas kerja. Akan tetapi, hal ini bisa ditanggulangi dengan memperketat kontrol lewat penugasan karyawannya untuk memonitor perkembangan subkontraktornya. Di sisi lain, perusahaan akan memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar setidaknya dalam dua hal. Pertama, seluruh proses produksi menjadi lebih efisien, karena perusahaan tidak harus mengeluarkan sejumlah dana untuk membayar tenaga kerja beserta seluruh fasilitasnya juga tidak harus menyediakan tempat untuk berusaha. Kedua, pihak perusahaan akan mendapat citra yang lebih baik karena lebih 'ber-masyarakat'.

Bagi pihak usaha kecil atau subkontraktor atau pihak penerima pekerjaan, keuntungan pertama dan utama bagi mereka adalah terbukanya peluang untuk memperoleh penghasilan sekaligus mengembangkan kapasitas ekonomi mereka. Kedua karena hubungan kemitraan dilakukan melalui pendekatan kelompok, maka kelompok juga bisa menjadi ajang penguatan dan pendidikan masyarakat. Ketiga adalah bahwa masyarakat bisa memperoleh atau mempelajari keterampilan baru, mengingat pabrik-pabrik yang berada di sekitar kawasan ini adalah jenis tekstil dan garment, maka keterampilan yang paling mungkin dipelajari oleh masyarakat juga menyangkut kegiatan usaha di sekitar tekstil dan garment. Pada tahap awal transfer pengetahuan ini terjadi antar-anggota, karena dalam kelompok ini terdapat unit pelatihan, namun dalam pengembangannya ketika jenis pekerjaan yang disubkontrakkan semakin kompleks, tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan keterampilan masyarakat

melalui lembaga-lembaga pelatih-an lain.

Sementara risiko yang harus ditanggung adalah jika kegiatan subkontrak ini tidak diberi bobot penguatan masyarakat, maka yang terjadi adalah marjinalisasi masyarakat melalui eksploitasi yang dilakukan pengusaha yang melakukan kemitraan ini semata-mata hanya berdasarkan pen-capaian efisiensi. Dampaknya justru menghilangkan kesempatan masyarakat untuk melakukan penguatan dan meraih pendidikan melalui kegiatan berkelompok ini.

Posisi Aktor-Aktor Utama dan Faktor Akselerasi Lainnya

Kelompok masyarakat (paguyuban), keberadaannya lebih ditujukan sebagai pelaksana fungsi koordinasi, khususnya dalam tahap pertama yang menyangkut kegiatan usahanya. Fungsi kedua dari kelompok ini adalah menjadi jembatan antara masyarakat (sebagai pekerja) dengan pihak industri dan pihak pemerintah. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka koordinasi menyangkut perencanaan, pengorganisasian, dan

pengawasan terhadap kualitas kerja masyarakat.

Masyarakat (pekerja), sebagai salah satu bagian dari kegiatan perencanaan paguyuban, terhadap tenaga kerja potensial yang ada di masyarakat yang bersangkutan. Dari hasil pendataan kemudian dilakukan penggolongan tenaga kerja dengan tujuan utama adalah membuat prioritas utama bagi kelompok-kelompok yang akan dilibatkan pertama kali. Pengelompokan masyarakat atau calon pekerja ini didasarkan pada kriteria usia, penganggur dan non-penganggur serta jenis kelamin.

Industri, sebagai salah satu aktor ekonomi utama dengan posisi sebagai mitra usaha masyarakat. Konkritnya, sebagai prinsipal dalam hubungan subkontrak. Sebagai prinsipal, selain menyerahkan proses produksi kepada subkontraktornya (masyarakat), juga wajib melakukan transfer teknologi dan keterampilan. Untuk kepentingan prinsipal sendiri yang menyangkut kualitas kerja yang dihasilkan oleh masyarakat, hendaknya

prinsipal bekerja sama dengan pihak paguyuban melakukan pengawasan (fungsi *quality control* yang dilakukan di luar pabrik) terhadap hasil akhir dari pekerjaan yang diserahkan kepada masyarakat.

Pemerintah, sebagai pendorong terciptanya iklim usaha yang sehat bagi kedua aktor ekonomi di atas. Upaya menciptakan iklim ekonomi yang sehat muncul dalam bentuk imbauan kepada pihak industri untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat setempat. Jika mungkin diperkuat dengan surat keputusan.

Lembaga finansial, sekalipun persoalan modal bukan merupakan kendala utama dalam mengembangkan kemitraan ini, namun demikian dukungan modal bisa menjadi faktor akselerasi bagi perkembangan ke arah yang lebih baik. Dukungan modal terutama sangat dirasakan pada fase-fase awal dari hubungan kemitraan yang dijalin ini. Lembaga finansial yang dapat diakses baik karena secara geografis mudah dijangkau, juga karena pada

lembaga tersebut tersedia skim kredit untuk usaha kecil adalah BPR dan modal ventura.

Lembaga-lembaga pelatihan, kendala-kendala yang dihadapi dalam kemitraan ini diantaranya adalah kurangnya keterampilan dari tenaga kerja-tenaga kerja yang tersedia. Untuk kebutuhan jangka pendek¹, sebenarnya paguyuban telah memiliki unit diklat tersendiri untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerjanya serta mendapat bantuan pelatihan teknis dari pihak prinsipalnya. Namun untuk ke-butuhan jangka panjang menyangkut manajemen usaha dan penguasaan keterampilan yang lebih kompleks diperlukan kehadiran lembaga-lembaga pelatihan.

Perguruan tinggi, sebagai lembaga yang melahirkan inovasi-inovasi baru, dilibatkan untuk

¹ Yang dimaksud dengan jangka pendek selain menyangkut satuan waktu (kurang lebih 6 bulan) juga menyangkut kompleksitas jenis pekerjaan, dimana pada tahap enam bulan pertama jenis pekerjaan yang dilakukan hanya menyangkut beberapa pekerjaan yang mudah dilakukan.

memperkenalkan teknologi baru bagi pengembangan usaha kelompok. Teknologi di sini baik dalam artian sempit yaitu mekanisasi maupun dalam artian luas yaitu manajemen mekanisasi. Pengujian konsep-konsep juga menjadi salah satu kegiatan yang diharapkan muncul dari lembaga-lembaga semacam ini.

Lembaga Masyarakat Swadaya sebagai fasilitator yang terus mendampingi dan bertugas sebagai penghubung antar-aktor. Fungsi ini terutama dibutuhkan pada tahap awal pengembangan hubungan kemitraan. Namun pada tahap-tahap selanjutnya LSM dapat terlibat dalam kegiatan yang lebih mengarah pada teknis usaha, seperti pelatihan-pelatihan, informasi pasar, pengembangan kewiraswastaan dll. Salah satu hal yang menonjol pada lembaga ini adalah umumnya LSM memiliki jaringan-jaringan tertentu yang bisa diakses oleh masyarakat.

Metodologi

AKATIGA hadir di Desa Cisempur dan Desa Cinta Mulya, sejak pertengahan tahun 1995 sebagai fasilitator yang membantu kelompok masyarakat mencapai kedua tujuannya. AKATIGA menjadi lembaga perantara (*intermediary institution*) yang mencoba menghubungkan antar-sumber yang ada untuk mensinergikan hubungan kemitraan yang sudah terjalin, sekaligus memulai upaya meng-angkat masalah perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui diskusi-diskusi kecil baik di tingkat masyarakat, industri maupun pemerintah.

Secara metodologis semua tahap semaksimal mungkin dilakukan secara partisipatif, mulai perumus-an masalah, identifikasi potensi sampai dengan melakukan aktivi-tas yang direncanakan. Dalam setiap tahap kegiatan, ide-ide dan aspirasi bagi pengembangan paguyuban berasal dari masyarakat Desa Cisempur dan Desa Cintamulya itu sendiri. Teknis yang umumnya dilakukan adalah dengan cara :

- Diskusi perorangan
Diskusi ini sebenarnya dimaksudkan untuk melengkapi diskusi-diskusi

yang lain atau sebagai bahan masukan untuk diskusi berikutnya, terutama untuk hal-hal yang agak sulit terungkap di forum yang lebih besar. Dalam hal ini, AKATIGA melakukan kunjungan ke rumah-rumah setiap pengurus atau anggota. Dalam setiap kunjungan biasanya dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan tugas masing-masing. Pandangan dan harapan mereka terhadap Paguyuban, dsb.

- *Fokus Group Discussion (FGD)*

FGD dilakukan pada tahap awal pembentukan paguyuban dengan peserta dari berbagai kalangan masyarakat di dua desa, Cisempur dan Cintamulya, baik dari pemerintahan desa maupun tokoh-tokoh masyarakat. Tujuannya adalah mendapatkan masukan dari berbagai kalangan tersebut untuk perencanaan pembentukan Paguyuban. Baik diskusi perorangan maupun FGD dilakukan secara periodik.

- *Latihan Perencanaan*

Latihan perencanaan dilakukan dalam waktu tertentu sebagai persiapan

bagi masyarakat terutama paguyuban. Latihan Perencanaan yang telah dilakukan misalnya mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup. Latihan perencanaan ini dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1997 di Desa Cisempur sebagai 'pemanasan' dalam upaya mensosialisasikan isu lingkungan hidup kepada masyarakat Desa Cintamulya dan Desa Cisempur, khususnya kepada Paguyuban Mitra Bina Sejahtera yang diharapkan akan menjadi pelopor dari pihak masyarakat setempat dalam kerjasama kemitraan pengelolaan lingkungan hidup bersama-sama dengan Pemerintah dan pihak industri yang ada di lingkungan kedua desa tersebut.

- *Forum Diskusi Kemitraan*

Forum ini dilakukan dua kali pada setiap tahap, yaitu pada awal dimulainya studi yang berupa lokakarya awal dan pada akhir studi aksi berupa Lokakarya Akhir. Pada lokakarya awal biasanya dilakukan diskusi mengenai rencana kerja dan program-program yang akan dijalankan untuk setiap

tahap. Sedangkan lokakarya akhir biasanya merupakan diskusi evaluasi atas program-program yang telah dilaksanakan pada setiap tahap serta rencana pengembangan kemitraan lebih lanjut.

Pembentukan Paguyuban Mitra Bina Sejahtera

Identifikasi Potensial *Kelompok*

Sebenarnya pelaksanaan program ini diprioritaskan kepada kelompok-kelompok yang selama ini telah ada di masyarakat. Kelompok yang telah dipilih ini nantinya akan dijadikan kelompok percontohan yang melakukan kemitraan dengan pihak industri. Akan tetapi dalam perkembangannya di lapangan, ternyata hal itu tidak dapat terlaksana karena adanya beberapa hambatan, baik dari kelompok sebagai lembaga, maupun dari orang-orang yang terlibat di dalam kelompok itu.

Di Desa Cintamulya dan Desa Cisempur ada beberapa lembaga yang mempunyai kegiatan yang berkaitan dengan bidang ekonomi

yaitu PKK, Koperasi, Takesra/Kukesra dan UED. Ternyata, setelah dilakukan penelitian yang mendalam mengenai lembaga-lembaga itu, PKK, Takesra/Kukesra dan UED sulit dijadikan kelompok percontohan. Selain program kerjanya telah ditentukan oleh pemerintah pusat, dananya juga berasal dari pemerintah sehingga pengurus lembaga tersebut kurang berani melakukan yang berbeda dari apa yang telah digariskan. Dalam pada itu, lembaga lainnya yaitu koperasi-koperasi yang ada di tingkat RW juga sulit untuk dijadikan kelompok percontohan karena terlalu kecil dan SDM-nya kurang memadai, terutama dari segi kuantitas. Selain alasan-alasan di atas, masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah kenyataan bahwa orang-orang yang aktif dalam lembaga-lembaga itu justru orang-orang yang termasuk golongan ekonomi kuat. Oleh karena itu, atas kesepakatan bersama dibentuklah kelompok baru.

Memilih Anggota Masyarakat Yang Potensial

Tahap pertama dari pembentukan kelompok baru

ini adalah memilih orang-orang yang potensial. Untuk itu staf AKATIGA menemui tokoh-tokoh di dua desa dan melakukan perbincangan intensif seputar rencana kemitraan dan orang-orang yang dipandang potensial untuk menjadi anggota kelompok. Kriteria yang dipakai untuk memilih orang-orang ini adalah:

- a. Merupakan tokoh setempat yang dikenal luas oleh masyarakat sekitar
- b. Memiliki visi dan pengalaman bisnis, dan atau pengalaman berorganisasi

Selanjutnya dilakukan beberapa diskusi kelompok dengan tujuan menyamakan visi dan misi masing-masing orang berkaitan dengan rencana kemitraan. Diskusi kelompok ini dilakukan tiga kali dengan agenda *pertama* sosialisasi hasil lokakarya dan membentuk kelompok (paguyuban) yang akan melakukan kemitraan. *Kedua* membuat *job description* dan *ketiga* membuat desain kemitraan serta membuat rencana kerja

Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaksanaannya

Rencana kerja Paguyuban disusun pada diskusi (seterusnya disebut rapat) yang membahas langkah-langkah melaksanakan kemitraan. Disetujui bahwa dalam melaksanakan program kemitraan ini, pertama-tama akan dilakukan pendataan calon tenaga kerja yang dipimpin oleh Ketua Unit Pendataan Tenaga Kerja. Dari data-data yang ada, dibentuk kelompok-kelompok berdasarkan RW yang masing-masing dikoordinir oleh orang yang dapat dipercaya sekaligus bertindak sebagai *quality controller* (QC). Tiap koordinator, selain bertugas sebagai QC, juga bertugas sebagai pencatat hasil kerja tiap pekerja untuk mempermudah penghitungan upah. Koordinator untuk kedua desa dipilih dari pengurus Paguyuban dalam hal ini Ketua Unit Diklat. Sementara negosiasi dengan pihak perusahaan akan dilakukan oleh ketua dan wakil paguyuban bersama-sama peneliti dari AKATIGA.

Pendataan tenaga kerja telah dimulai pada tanggal 8 Januari 1997 dan direncanakan akan selesai

pada 26 Januari 1997. Sebelum pendataan ini selesai, diharapkan negosiasi dengan pihak perusahaan (secara informal) telah menghasilkan kesepakatan sehingga begitu pendataan selesai, Ketua Unit Pencarian Bahan Baku dapat mulai mengambil bahan baku dari perusahaan dan pekerjaan dapat segera dilakukan .

Sosialisasi Program Kepada Calon Tenaga Kerja

Pertemuan dengan calon tenaga kerja dilakukan setelah pendataan tenaga kerja selesai. Pertemuan dilakukan dua kali dengan agenda sosialisasi program dan pembentukan kelompok kerja.

Negosiasi Dengan Perusahaan

Negosiasi dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur formal dan jalur informal. Jalur formal ditempuh dengan mengirimkan permohonan tertulis dari pihak Paguyuban kepada pihak perusahaan. Tujuannya untuk menunjukkan keberadaan Paguyuban dan untuk memperkuat kemitraan yang akan terbentuk. Akan tetapi sebelum jalur formal itu

ditempuh, Paguyuban menempuh jalur informal dengan melakukan pendekatan terhadap pihak manajemen perusahaan.

Pelatihan dan Pelaksanaan Subkontrak

Pekerjaan subkontrak dilakukan bersamaan dengan pelatihan terhadap calon tenaga kerja. Saat ini di dua desa itu telah ada 12 orang yang ahli membordir. Mereka inilah yang akan melakukan pekerjaan subkontrak dan memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja.

Pelatihan dilakukan di setiap kelompok yang dibentuk berdasarkan wilayah, sehingga pekerja dapat berlatih di tempat yang tidak jauh dari rumah tinggalnya. Waktunya dibagi dalam dua *shift* agar setiap calon tenaga kerja mendapat kesempatan belajar yang sama. Ini terjadi karena terbatasnya mesin bordir dan kapasitas tempat pelatihan. Sampai saat ini ada ± 30 orang yang intensif belajar membordir. Menurut Ketua Diklat Paguyuban, dari hasil pantauan-nya terhadap

hasil belajar para calon tenaga kerja, dalam waktu 2 minggu - 1 bulan, para calon tenaga kerja akan mampu melakukan pekerjaan memperbaiki bordir dengan kualitas baik. Diprediksikan dalam 1 bulan mendatang akan tersedia 40 orang yang memiliki keterampilan membordir dan sudah bisa melakukan pekerjaan yang dapat memberikan tambahan pendapat-an bagi keluarganya.

Masalah-masalah Yang Dihadapi

Sekalipun terkesan tujuan di atas cukup sederhana, namun meng-ingat potensi yang tersedia baik di kelompok masyarakat maupun di kelompok industri, maka tugas paguyuban untuk mencapai kedua tujuan ini menjadi satu pekerjaan yang tidak mudah.

Kesulitan yang dihadapi misalnya saja dalam pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat. Pengembangan ini baru bisa dilakukan setelah merumuskan terlebih dahulu jenis aktivitas apa saja di dalam pabrik/industri yang bisa 'di tarik keluar' untuk dikerjakan oleh masyarakat.

Dalam perumusan ini tentu saja dibutuhkan kemauan dan kepercayaan pihak pabrik untuk menyerahkan sejumlah pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Disepakati bahwa dalam hubungan kemitraan ini, pihak pabrik akan membangun sistem subkontrak untuk pekerjaan membordir. Namun demikian harus dirumuskan bersama juga bentuk pengembangan hubungan subkontraknya sendiri karena untuk mengembangkan kegiatan subkontrak ini ada prakondisi yang harus tersedia di masyarakat yakni kemampuan membordir, ketersediaan sejumlah mesin jahit, dan pola manajemen yang tertata baik agar alur pekerjaan dan tanggung jawab menjadi jelas.

Dalam hal pengembangan pola tanggung jawab bersama pe-ngelolaan lingkungan hidup juga ditemui kendala, baik di tingkat masyarakat maupun di pihak industri. Pihak masyarakat sudah terlanjur apriori terhadap keberadaan pabrik dengan segala dampak buruk yang ditimbulkannya. Sementara itu pihak pabrik juga tidak merasa harus ber-tanggung

jawab secara penuh, karena
beranggapan kerusakan

untuk menciptakan situasi
sinergis antara aktivitas
industri dan kelayakan hidup
masyarakat di sekitar pabrik
yang merasakan langsung
dampak kemunculan pabrik.

lingkungan yang terjadi
bukan disebabkan oleh
kehadiran mereka, melainkan
sebab alam dan faktor
manusia yang nota bene
masyarakat setempat.
Implikasinya, untuk dapat
mewujudkan pengelolaan
lingkungan hidup dari dua
pihak, masih dibutuhkan
waktu yang cukup panjang
dan komitmen yang tinggi
dari masyarakat, pihak
industri, dan pemerintah

**WANATANI REPONG DAMAR:
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LESTARI
OLEH MASYARAKAT KRUI - LAMPUNG**

Suwito

Sejak lebih dari seratus tahun yang lalu masyarakat Pesisir Krui - Lampung Barat telah mengembangkan pola pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara lestari dan berkelanjutan. Pola yang memiliki ciri khas itu oleh masyarakat Krui disebut *Repong Damar*, secara ilmiah para peneliti menyebutnya sebagai sistem wanatani (*agro-forest*) atau kebun-hutan (*forest garden*). *Repong Damar* merupakan asosiasi tanaman pepohonan dengan struktur vegetasi kompleks yang menyerupai hutan alam. Pada umumnya struktur vegetasi tersebut didominasi oleh pohon damar (*Shorea javanica sp.*) yang merupakan salah satu jenis pohon hutan (famili *Dipterocarpaceae*) sebagai ciri utamanya.

Para peneliti menganggap *Repong Damar* sebagai sebuah model pengelolaan sumber daya alam yang penting dan unik untuk daerah tropis, karena sistemnya dikembangkan melalui penjinakan pohon hutan liar yang dilakukan oleh masyarakat (petani) setempat secara mandiri

tanpa bantuan dari pihak manapun. Di samping itu, *Repong Damar* mampu memberikan jaminan terhadap kebutuhan ekonomi penduduk dengan melindungi tanah dan sumber-sumber air, serta mampu mengkonservasi sejumlah besar jenis-jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan dari hutan alam. Keunikan itulah yang telah mempengaruhi minat masyarakat ilmiah internasional untuk memberikan perhatian yang besar terhadap keberhasilan masyarakat Krui dalam mengembangkan *Repong Damar*. Bahkan pada hari lingkungan hidup tahun 1997 Presiden RI telah memberikan penghargaan Kalpataru kepada masyarakat adat Pesisir Krui sebagai penyelamat lingkungan.

Tulisan ini merupakan kristalisasi dari sebagian pengalaman penulis selama bergaul dengan masyarakat Krui sekitar dua tahun (sejak tahun 1995) dan kawan-kawan yang pernah melakukan penelitian di Krui. Hal-hal yang diangkat dalam tulisan ini antara lain mengenai riwayat singkat perkembangan

wanatani *Repong Damar*, tahap-tahap pembuatannya, tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mempertahankan dan mengembangkannya, serta peran Latin dan lembaga-lembaga lainnya yang memberikan perhatian khusus terhadap *Repong Damar*.

Letak Dan Kondisi Alam Pesisir Krui

Wilayah Pesisir Krui secara geografis terletak pada koordinat 103°34" - 104°45' Bujur Timur dan 4° 44' - 6° 00' Lintang Selatan. Persisnya wilayah ini diapit oleh pegunungan Bukit Barisan (di sebelah timur) dan Lautan Indonesia (di sebelah barat). Wilayah Krui merupakan representasi ciri-ciri alam di sepanjang pantai barat Pulau Sumatera yang membujur dari ujung selatan sampai ke ujung utara, yang ditandai dengan saling bertautannya pantai karang, pasir landai, dan perbukitan.

Secara geologis dan geomorfologis, wilayah Krui terdiri dari dataran rendah yang dimulai dari pantai sampai ke pegunungan (0 - 500 dpl), serta dataran tinggi di sepanjang pegunungan Bukit Barisan (1000 - 1500 dpl). Dengan demikian hutan yang ada di sini dapat dikelompokkan dalam golongan hutan dataran rendah dan sebagian ke dalam

hutan pegunungan bagian bawah. Para ahli lingkungan mengatakan karakteristik mencolok hutan dataran rendah adalah keaneka-ragaman hayatinya yang sangat tinggi, baik flora maupun fauna.

Kota kecil Krui merupakan kota pelabuhan yang terletak di tengah-tengah wilayah Pesisir Krui (Pesisir Tengah), sehingga lokasi-nya sangat strategis sebagai pusat kegiatan perekonomian (perdagangan). Sebelum dibangun jalan darat yang menghubungkan Krui dengan kota-kota lainnya (Bengkulu, Bandar Lampung, dan lain-lain), Krui merupakan pelabuhan besar untuk pengiriman hasil-hasil buminya. Cengkeh dan lada merupakan komoditas hasil bumi Pesisir Krui yang terkenal sejak jaman kolonial Belanda. Jarak kota Krui dengan ibukota propinsi (Bandar Lampung) sekitar 300 km dan dengan ibukota kabupaten (Liwa) sekitar 30 km. Keberadaan Kota Liwa sebagai ibukota kabupaten belum menunjang pemasaran hasil-hasil bumi dari Krui, karena Pasar/kota Krui umurnya lebih tua dan aktivitas perdagangannya lebih besar dibandingkan dengan Kota Liwa.

Wilayah Administratif dan Keadaan Penduduk

Sebelum kemerdekaan RI, secara administratif Krui

merupakan bagian dari Karesidenan Bengkulu (Bengkulu). Setelah kemerdekaan RI, Kruai dimasukkan ke dalam wilayah Propinsi Lampung. Setelah Kabupaten Lampung Barat berdiri pada tahun 1992, Kruai menjadi bagian dari wilayah administratif Lampung Barat. Sejak saat itu Pesisir Kruai di bagi menjadi tiga wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, dan Pesisir Utara.

Luas seluruh wilayah Pesisir (termasuk kawasan Taman Nasional) adalah 290.273 hektar dengan jumlah rumah tangga sebanyak 19.076 dan jumlah penduduk 102.413 jiwa (*Satistik Lampung Barat*, akhir tahun 1995). Kepadatan penduduk rata-rata di Pesisir selatan 21,4 jiwa/km², Pesisir Tengah 218,0 jiwa/km², dan di Pesisir Utara 31,2 jiwa/km². Jumlah desa di masing-masing kecamatan adalah 26 desa (Pesisir Selatan), 27 desa (Pesisir Tengah) dan 26 desa (Pesisir Utara). Tidak seperti di wilayah Lampung lainnya, penduduk mayoritas Pesisir Kruai adalah masyarakat adat setempat (sekitar 80%). Penduduk pen-datang yang ada di Kruai umumnya perantau yang menjadi pedagang, pegawai, buruh (penggarap, *pengunduh*/pemanen hasil, kuli), dan transmigrasi lokal.

Tatanan Masyarakat Adat

Di Propinsi Lampung ada dua macam tatanan adat masyarakat asli, yaitu adat Peminggir dan adat Pepadun. Masyarakat adat Peminggir pada umumnya menyebar di daerah Pesisir, sedang-kan masyarakat adat Pepadun biasanya menyebar di pedalaman. Sistem kelembagaan adat Lampung adalah Lembaga Adat Marga yang dicirikan oleh adanya batasan wilayah teritorial dengan pimpinan adat tertentu. Masing-masing lembaga adat marga memiliki batas-batas wilayah teritorial tertentu. Umumnya batas-batas alam seperti sungai, bukit, batu dan lain-lain dengan pimpinan/kepala adat (*sai batin*) tertentu pula.

Masyarakat Pesisir Kruai adalah masyarakat adat Peminggir yang terdiri dari enam belas lembaga adat marga. Lembaga adat marga ini sudah ada sejak pemerintahan kolonial, tetapi pada tahun 1953 dengan pertimbangan sepihak Residen Lampung lembaga tersebut diubah menjadi sistem *Kenegarian*. Realita di dalam masyarakat adat tidak mudah berubah meskipun telah hadir tatanan yang baru, seperti pemerintahan desa, LKMD, LMD, tetapi *sai batin* sebagai pimpinan lembaga adat tetap

mendapatkan tempat yang istimewa di tengah-tengah masyarakat. Pada saat gotong-rojong misalnya, masyarakat lebih menghormati perintah *sai batin* atau kepala suku kampung daripada perintah kepala desa, kepala dusun, atau ketua RT. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung pada tahun 1996 akhirnya mengukuhkan kembali keberadaan Lembaga Adat Marga tersebut di seluruh Propinsi Lampung dengan SK Gubernur No: G/362/B-II/HK/1996.

Riwayat Singkat Repong Damar

Diperkirakan *Repong Damar* mulai dibentuk masyarakat Krui sejak tahun 1800-an. Menurut beberapa versi cerita di masyarakat, alasan pembuatan *Repong Damar* adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu versi cerita yang muncul di Desa Pahmongan (Pesisir Tengah), yang sampai saat ini masih terdapat pohon damar tua (umurnya sekitar 150 tahun), menyebutkan bahwa nama "damar" diberikan karena getah yang dihasilkan pohon tersebut dapat dibuat lampu penerangan (*damar* dalam bahasa Krui maupun bahasa Jawa artinya lampu, alat penerangan). Kemudian ada seorang pedagang hasil bumi (rempah-rempah) asal desa

Pahmongan yang sejak zaman kolonial dulu pernah melanglang buana sampai ke Singapura. Pulang dari Singapura pedagang tersebut memberitahu-kan kepada masyarakat bahwa damar laku dijual dan dikabarkan akan memberikan masa depan yang lebih baik bila masyarakat mau menanamnya.

Di kemudian hari getah damar ini memang laku keras di pasaran dengan nama dagang **Damar Mata Kucing**. Pemberian nama tersebut mungkin berkaitan dengan bentuknya seperti kristal berwarna bening mengkilat. Nama dagang ini sekaligus untuk membedakan jenis damar lainnya yang memiliki ciri dan kualitas berbeda, yaitu Damar Batu (kualitas dan harganya lebih rendah).

Sebelum pohon damar (*Shorea javanica sp.*) dibudidayakan, masyarakat mencarinya di hutan liar. Namun, makin lama jumlah getah damar makin berkurang sehingga masyarakat mulai mencoba-coba menanam di areal perladangan atau kebunnya (di sela-sela tanaman kopi, lada, atau cengkeh). Upaya ini kemudian ditiru dari generasi ke generasi. Sampai saat ini di Krui ada beberapa pohon damar berumur lebih seratus tahun (sekitar 5-10 pohon) pada sebagian bidang kebun damar yang berumur tua. Bahkan Rappard (seorang ahli

kehutanan Belanda) pada tahun 1937 telah menemukan "hutan damar" di Krui dengan luasan sekitar 70 hektar, di dalamnya ada pohon damar yang berumur sekitar 50 tahun. Kemudian pada tahun 1997, melalui interpretasi citra satelit, Hubert de Foresta (ICRAF-ORSTOM) dan kawan-kawan juga telah melakukan penghitungan terhadap luasan *Repong Damar*, saat ini diperkirakan luasnya telah mencapai sekitar 50.000 hektar.

Proses Pembuatan *Repong Damar*

Secara umum pola yang dikembangkan oleh masyarakat Krui dalam membuat *Repong Damar* dapat diuraikan melalui beberapa tahapan. Zulkifli Lubis (P3AE-UI, 1997) dan Hubert de Foresta (ICRAF) mengelompokkannya kedalam tiga tahapan produktif¹, yaitu tahapan *darak* (ladang), kebun, dan *Repong Damar*.

Tahap Pertama: Darak (ladang)

Tahap awal pembuatan *Repong Damar* adalah membuat *darak* (ladang). Pada tahap ini petani mengelola tanaman padi dan palawija di ladangnya dan memulai proses penyiapan lahan

calon lokasi *Repong Damar*. Pada lahan yang datar hingga kemiringannya sedang umumnya masyarakat melakukan penebang-an habis dan melakukan pembakaran. Pada lahan-lahan yang memiliki kemiringan sedang hingga tinggi umumnya dilakukan pertimbangan yang cermat untuk melakukan penebangan. Pada lahan-lahan seperti ini hanya sebagian pohon besar yang ditebang atau hanya melakukan penebasan tanaman semak belukar (pohon-pohon pendek). Pembukaan lahan ini biasanya dilakukan secara bergotong royong (*beguwai jajama*) antara sanak famili atau kerabat dekat, sedangkan lahan hutan yang dibuka adalah hutan adat/marga.

Tujuan pokok pembuatan *darak* adalah untuk memenuhi kebutuhan subsisten masyarakat selama melanjutkan proses pengelolaan lahan tahap berikutnya. Biasanya tahap ini berlangsung sekitar 1-2 tahun (1kali panen padi dan 1 kali palawija). Tahun pertama untuk penyiapan lahan dan penanaman padi, kemudian tahun kedua masa penanaman palawija dan sayur-sayuran. Bersamaan dengan penanaman palawija dan sayur mayur, petani juga mulai menanam pohon pelindung (pohon dadap). Kadang ada juga yang tidak menanam palawija, tetapi langsung menanam pohon dadap dan penyemaian bibit

¹ Penulis menganggapnya sebagai kiat masyarakat Krui dalam melakukan pengusahaan hutan secara berkelanjutan

kopi.

Tahap Kedua: kebun

Pada tahap ini masyarakat melakukan penanaman dan pemeliharaan tanaman muda untuk kepentingan komersial. Tanaman yang biasa dipelihara adalah kopi, lada, atau cengkeh. Pada tahun kelima atau keenam sejak pembukaan, kopi sudah mulai berbuah dan bisa dipanen. Tahapan ini oleh masyarakat Krui disebut sebagai *batin kejutan*, yaitu fase yang memberikan kemungkinan bagi petani untuk mendapatkan penghasilan tunai dalam jumlah yang besar, biasanya berlangsung sekitar 10 hingga 15 tahun. Dari hasil panen kebun inilah umumnya petani dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya monumental, misalnya mem-bangun atau merenovasi rumah-nya, mengawinkan anak, naik haji, dan lain-lain. Saat produksi cengkeh melimpah pada tahun 1970-an banyak petani yang berhasil naik haji, sehingga mendapatkan julukan "haji cengkeh".

Tahap Ketiga: Repong Damar

Tahap *Repong Damar* adalah tahap pengelolaan kebun campuran yang terdiri dari pohon buah-buahan (durian, duku, petai, jengkol), pohon damar,

dan pohon kayu-kayuan lainnya. Tahapan *Repong Damar* ini mulai produktif kira-kira pada tahun ke-20 sejak pembukaan lahan.

Sebenarnya tahapan *Repong Damar* telah mulai dirintis oleh petani dengan penyemaian bibit damar dan buah-buahan sejak sekitar tahun ketiga tahap kebun (tahun keempat atau kelima dari tahun pembukaan). Bibit damar dan buah-buahan ditanam sebagai tanaman susulan di sela-sela tanaman kopi atau lada. Pada saat kopi belum berbuah, petani bisa mendapatkan hasil dari tanaman berumur pendek yaitu berupa sayur-sayuran dan buah (pepaya, pisang, dan lain-lainnya). Jadi hasil dari tanaman kebun (kopi, lada dan buah-buahan) bisa diperoleh petani sambil "menunggu" datangnya masa *Repong Damar* produktif. Selain menanam pohon damar dan buah-buahan ada juga petani yang menanam kayu-kayuan bermutu untuk bahan bangunan rumah. Proses penanamannya ada yang memang disengaja oleh petani ada pula yang tumbuh dari biji sisa makanan burung atau hewan-hewan lainnya (kera, siamang, rusa).

Tahap *Repong Damar* adalah tahap final, artinya petani akan mempertahankannya secara terus-

menerus sampai diwariskan kepada anak cucu. Bila ada pohon yang tidak produktif atau tumbang/robok oleh terangan angin besar, petani akan langsung melakukan penanaman bibit damar atau bibit pohon lainya sebagai pengganti pohon yang "rusak".

Pola yang dikembangkan secara konsisten oleh sebagian besar masyarakat di Pesisir Krui tersebut (mulai dari pembuatan ladang hingga menjadi *Repong Damar*) diberi julukan (nama baru) oleh "Tim Krui" sebagai Pola Wanatani *Repong Damar* (PWRD). Tim Krui adalah sebuah konsorsium informal dari lembaga-lembaga yang memiliki perhatian khusus terhadap *Repong Damar* Krui. Lembaga-lembaga yang aktif adalah International Center Research Agro forestry (ICRAF), ORSTOM (Lembaga Ilmiah Perancis), CIFOR, P3AE-UI, LATIN, Keluarga Pencinta Alam dan Lingkungan Hidup WATALA (Bandar Lampung), Ford Foundation dan PusLitbang Kehutanan.

Nilai Ekonomi *Repong Damar*

Seperti uraian dari salah satu versi cerita di atas diyakini bahwa insentif ekonomi merupakan salah satu faktor dominan yang mendorong perkembangan pengelolaan *Repong Damar*. Dari hasil

wawancara dengan para pedagang di berbagai desa, dalam kondisi normal hasil produksi damar di Pesisir Krui bisa mencapai sekitar 500 - 600 ton per bulan. Menurut data statistik di Kanwil Perdagangan Propinsi Lampung sebanyak 200 - 300 ton damar tiap bulan di ekspor ke berbagai negara dari Pelabuhan Bandar Lampung.

Di samping tujuan ekspor, sebagian produksi damar juga dipasarkan ke berbagai daerah di sekitar Jabotabek dan Jawa Tengah. Getah damar tersebut umumnya digunakan untuk bahan industri cat, vernis, lak, korek api, dan batik. Menurut Levang (1992) kurang lebih 79% dari jumlah penduduk yang tersebar di 66% wilayah Pesisir Krui memiliki kebun damar. Di desa Pahmongan misalnya, salah satu produsen damar terbesar di Krui, 71,3% pendapatan penduduknya berasal dari kebun damar. Produksi damar di desa Pahmongan bisa men-capai sekitar 60-70 ton/bulan.

Dari pengamatan di lapangan, ternyata fluktuasi harga damar dipengaruhi oleh pasokan (produksi) damar dan fluktuasi nilai dolar Amerika terhadap rupiah. Harga damar turun pada saat produksi damar melimpah dan stok menumpuk di tingkat pedagang eksportir Bandar Lampung, begitu juga

sebaliknya. Sedangkan pengaruh nilai dolar Amerika terhadap fluktuasi harga damar terlihat dengan jelas pada masa-masa awal krisis di Indonesia. Pada bulan Agustus - September 1995 nilai 1 US dolar sekitar Rp2200, harga damar di Krui sekitar Rp1200, kemudian pada bulan Desember 1997-Januari 1998 nilai 1 US dolar sekitar Rp10.000, harga damar di Krui naik sampai Rp5000 - Rp 6000.

Dari satu bidang *Repong Damar* (sekitar 1 hektar) dengan tanaman pohon damar sekitar 100 pohon, biasanya dapat dihasilkan getah sekitar 200 - 300 kg per bulan. Pemanenan getah damar paling ideal dilakukan bulan sekali. Ada juga yang memanen 2 kali sebulan, tetapi kualitas damarnya berkurang (belum mengkristal, masih lunak, dan mudah lengket dengan kotoran/kulit kayu). Produksi damar biasanya menurun pada saat musim kemarau panjang, karena pada musim ini pohon damar sedang berbunga dan berbuah. Penurunan produksi pada masa damar berbunga dan berbuah akan sangat tajam, bisa mencapai 50% - 60% dari kondisi normal. Otomatis pendapatan petani dari getah damar pun menurun drastis. Namun demikian, masa penurunan produksi getah damar biasanya berbarengan dengan musim duku sehingga

kekurangan pendapatan dari getah damar dapat ditutupi dengan penghasilan dari penjualan duku. Selain duku, buah petai dan durian juga memberikan kontribusi pendapatan yang sangat berarti bagi petani. Selain adanya penghasilan tetap setiap bulan dari getah damar, adanya bermacam tambahan penghasilan dari *repong* ini agaknya menjadi alasan kuat para petani untuk mempertahankan *Repong Damar*.

Nilai Ekologi *Repong Damar*

Bagi para ahli ekologi yang pernah berkunjung atau melakukan penelitian di Krui, aktivitas masyarakat dalam *Repong Damar* ini dianggap sebagai fenomena unik dan sangat menakjubkan. Terlebih lagi bila dibandingkan dengan opini yang selalu menempatkan masyarakat adat sebagai "perambah hutan" dan berkonotasi merusak. Menurut Hubert de Foresta, seorang ahli ekologi dari perancis (peneliti ICRAF-ORSTOM), *Repong Damar* telah mampu berfungsi sebagai hutan. *Repong* mampu mengkonservasi tanah dan tata air, keanekaragaman hayatinya tinggi, dan dapat menjaga kelestarian (sebagai zona penyangga) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Pada musim kemarau panjang tahun 1997, banyak sekali peristiwa menarik yang berkaitan dengan fungsi *Repong Damar* sebagai pengelolaan hutan yang lestari. Di sekitar kawasan hutan lindung dan taman nasional yang tidak memiliki *Repong Damar* di luar Pesisir Krui (kecamatan Sumberjaya/Lampung Barat, kecamatan Wonosobo/Tanggamus dan Bukit Kemuning/Lampung Utara) terjadi serangan harimau ke pemukiman penduduk dan memakan korban. Peristiwa tragis yang menelan korban manusia tersebut tidak terjadi di wilayah Krui. Ada juga kejadian unik yang menarik perhatian banyak orang, beberapa ekor gajah keluar dari taman nasional, uniknya gajah-gajah tersebut tidak merusak atau mengamuk di desa Pahmongan (desa yang memiliki *Repong Damar* cukup tebal dan luas). Kelompok gajah mengamuk di desa lain yang *repong*-nya tipis dan tidak luas (desa Balai kencana) dan merusak tanaman kebun pekarangan penduduk (pisang, nangka, kelapa muda, dll.). Peristiwa pengrusakan tanaman pekarangan dan kebun oleh gajah tersebut terjadi juga di sekitar Ngambur dan Bengkunt yang sebagian lahannya telah dikonversi oleh perusahaan pengembang perkebunan kelapa sawit dan menjadi lokasi transmigrasi lokal.

Nilai sosial *Repong Damar*

Sejak awal pembukaan lahannya sebuah bidang damar telah melibatkan banyak orang (*beguwai jajama*). Petani Krui mengenal adanya institusi *ketulungan* dan *bebelinan* yang memungkinkan petani mengelola lahan dengan bantuan orang lain (Lubis, 1997). Bukan hanya dalam sebidang kebun, *beguwai jajama* juga dilakukan pada beberapa bidang kebun dalam suatu hamparan yang luas. Bukti monumental dari semangat kebersamaan tersebut telah diwujudkan dengan cara memberikan nama pada setiap kelompok hamparan lahan yang dibuka dalam suatu kurun waktu yang sama. Sekelompok hamparan bidang kebun yang dibuka bersama-sama tersebut disebut *atar*. Mereka memberikan nama khusus pada setiap *atar* sesuai dengan peristiwa yang pernah terjadi pada saat pembukaan atau sesuai dengan lingkungan fisik di dalam atar tersebut, misalnya *atar Kakabu* karena dalam atar tersebut dijumpai pohon kapuk randu (= *kakabu* dalam bahasa krui), *atar Batu Bulan*, *atar Kubu Seng*, *Atar Tudung Langkut*, *atar Kayu Agung*, dan lain-lainnya.

Semangat kebersamaan tersebut-lah yang dikemudian hari oleh generasi berikutnya (penerima warisan) dianggap sebagai nilai luhur yang harus

dihormati, sehingga mereka menempatkan *Repong Damar* sebagai harta pusaka yang harus dijaga dan diselamatkan. Anak yang menjadi *sai tuha laki-laki* (anak tertua laki-laki) yang berhak menerima warisan, memikul beban tanggung jawab kepada adik-adiknya sampai bisa mandiri mulai dari menyekolahkan, mengawinkan, dan melindungi adik-adiknya sampai mampu hidup mandiri. Adik yang tidak mendapatkan warisan *Repong Damar* akan terdorong untuk membuat *repong* baru. Mereka akan merasa sangat berdosa jika mewariskan "ke-miskinan" kepada anak cucunya.

Pada peristiwa kemarau panjang tahun 1997 juga masih tampak refleksi "semangat kebersamaan" tersebut dalam menanggulangi kebakaran "hutan damar". Jika di luar wilayah Krui terjadi kebakaran hutan yang hebat dan luas, hal demikian tidak terjadi di kawasan hutan damar Krui. Memang ada *repong* yang mengalami kebakar-an, tetapi tidak sampai meluas dan bisa ditanggulangi secara mandiri oleh masyarakat. Di desa Pahmongan, misalnya pernah terjadi tiga kali kebakaran di tempat yang terpisah dengan luas lahan yang terbakar di masing-masing bidang *repong* lebih dari dua hektar. Begitu juga kebakaran yang terjadi di desa lainnya yang memiliki *Repong*

Damar tebal dan luas (Desa Penenghaan Laay dan Desa Gunung Kemala) dapat ditanggulangi bersama. Semangat kebersamaan dan rasa memiliki tanggung jawab yang kuat terhadap "harta pusaka" itulah yang mampu menggerakkan mereka untuk mengendalikan setiap potensi yang mengancam keberadaan *Repong Damar*.

Nilai-nilai ekonomi, ekologi dan sosial tersebut merupakan faktor dominan yang berpengaruh terhadap kelestarian atau keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dengan pola wanatani *Repong Damar* di Krui.

Potensi Ancaman Kelestarian *Repong Damar* Dan Penanggulangannya

Beberapa masalah yang memiliki potensi kuat untuk mengancam kelestarian *Repong Damar*, antara lain adalah;

1. Fluktuasi nilai/harga damar yang sulit dikendalikan oleh petani;
2. Ancaman konversi oleh pihak lain;
3. Pengalihan status kawasan sebagian areal *repong* damar menjadi kawasan hutan negara (Hutan Lindung/HL dan Hutan Produksi Terbatas/HPT).

Fluktuasi nilai/harga damar

Pada tahun 1960-an pernah ada ancaman psikologis yang dilakukan pedagang besar di Jakarta kepada pedagang Krui, yaitu adanya damar ("resin") sintesis yang mungkin akan menjadi pesaing damar alam. Resin sintesis tersebut bisa didapatkan dari hasil sampingan proses kimiawi pengolahan minyak mentah. Ancaman tersebut cukup berpengaruh pada harga damar saat itu dan "orientasi" sebagian petani di kemudian hari.

Pada tahun 1970-an ketika cengkeh lebih memberikan keuntungan dibanding damar, sebagian petani ada yang mengkonversi total *Repong Damarnya* menjadi kebun cengkeh. Akan tetapi cengkeh juga mendapatkan pukulan harga dan penyakit ganas pada tahun 1980-an, akhirnya mereka mengubah kembali lahannya menjadi *repong*. Pengalaman pahit setelah mengkonversi *repong* tersebut sangat membekas bagi petani, Pak Darsan salah seorang responden di desa Pahmongan yang menjadi Ketua Kelompok Tani Damar Lestari mengatakan; "*nuar malasa nanom khamorak*". Maksudnya adalah menebang (*nuar*) pohon yang pasti memberikan manfaat (*malasa*=nangka, simbol untuk pohon yang memberikan bermanfaat), baru kemudian menanam biji muda (*nanom*=menanam,

khamorak= yang muda). Alangkah lamanya menunggu hasil biji muda yang baru ditanam tersebut, padahal biji yang baru ditanam itu belum tentu akan menghasilkan.

Tentang ancaman yang datang akibat nilai fluktuasi harga damar yang tidak menentu, Latin pernah mempelajari tata niaga damar sampai di tingkat eksportir. Dari pengamatan pasar tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang eksportir berperan sangat dominan terhadap penentuan harga damar. Pada saat stok damar menumpuk di gudangnya, permintaan damar terhadap pedagang pengumpul di Krui dikurangi bahkan diturunkan harganya.

Setelah mempelajari hal tersebut, Latin berusaha mencoba mencari mitra untuk melakukan terobosan pasar ekspor. PT Ikamuda Internasional bersedia menjadi mitra Latin dan bersedia melakukan penentuan harga yang transparan sampai pada tingkat importir (Itochu, Nagoya-Jepang). Percobaan tersebut dilakukan pada kurun waktu bulan September - Oktober 1995. PT Ikamuda difasilitasi untuk membeli damar ke pedagang Krui dan selanjutnya Pedagang Krui bekerja sama dengan petani damar di

beberapa desa di Krui. Kegiatan percobaan ekspor damar yang di kemas (*packing*) langsung dari Krui ini berhasil mendongkrak harga lokal. Sebelum pembelian dilakukan, harga damar asal di Krui berkisar antara Rp1050 - Rp1100. Pada saat percobaan ekspor tersebut dan hari-hari berikutnya harga damar naik menjadi Rp1200 - Rp1250.

Di samping mencoba memfasilitasi percobaan terobosan pemasaran damar tersebut, Latin juga memfasilitasi petani untuk belajar mensortir (*grading*). Kelompok yang mendapat kesempatan adalah kelompok tani damar di desa Malara (Pesisir Utara). Dampak dari kegiatan belajar tersebut, petani di beberapa desa sudah mulai melakukan penyortiran atas damar yang akan dijual. Sebelumnya petani tidak pernah melakukan nya, penyortiran hanya dilakukan oleh pedagang pengumpul besar dan eksportir sehingga harganya akan sangat tergantung pada penilaian pedagang. Dengan menyortir sendiri, petani me-ngelompokkan damar hasil sortirannya dalam dua kelas, yaitu kelas asalan dengan harga Rp1200 dan kelas A yang berkualitas ekspor dengan harga Rp1600. Dengan cara ini, petani mempunyai daya tawar terhadap pedagang, dan pedagang pe-ngumpul besar di Krui akhirnya bersedia membeli damar sortiran tersebut.

Ancaman Konversi Oleh Pihak Lain

Pihak Pemeritah daerah tampaknya belum berhasil mengidentifikasi potensi *Repong Damar* sebagai kegiatan usaha ekonomi yang menguntungkan dan ber-kelanjutan. Hal ini terjadi karena selama ini klai damar didominasi oleh Kehutanan, sehingga Pemda belum melihat kontribusi yang berarti dari *Repong Damar* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung Barat. Oleh karena itu, pada RTRWK Lampung Barat tidak teridentifikasi adanya potensi *Repong Damar* dan arealnya diperuntukkan pengembangan perkebunan. Sejak tahun 1993 Pemda telah mengundang dua perusahaan pengembang kelapa sawit untuk investasi di wilayah Krui.

PT KCMU mendapatkan areal konsesi seluas 25.000 hektar di kecamatan Pesisir Selatan. Pada mulanya kehadiran perusahaan tersebut ditolak oleh sebagian besar masyarakat, mereka mengajukan keberatan kepada DPRD TK I Lampung. Namun, karena keberat-an masyarakat tidak digubris pihak pemda, akhirnya mereka melampiaskan kemarahannya dengan membakar *base camp* PT KCMU. Masyarakat di desa-desa lainnya (Marga Ngaras dan Ngambur) juga melakukan

penolakan dan perlawanan kepada PT KCMU yang dikemudian hari terbukti merusak *Repong Damar* masyarakat. Dari luas areal konsesi 25.000 hektar tersebut hingga saat ini PT KCMU baru mampu merealisasikan penanaman kelapa sawit sekitar 6.000 hektar (hanya sekitar 30% dalam kurun waktu lebih dari 4 tahun). Adanya dukungan pemda dan aparat keamanan kepada PT KCMU telah mendorong masyarakat (sekitar 128 orang) untuk mencari keadilan di KOREM, POLDA, LBH, dan KOMNAS HAM.

PT Panji Padma Lestari (PPL) juga mendapatkan konsesi areal pengembangan kelapa sawit dari Pemda sekitar 17.000 hektar di kecamatan Pesisir Utara dan Pesisir Tengah. Namun penolakan dan perlawanan masyarakat sangat kuat. Secara beramai-ramai, sekitar 500 orang dari lima desa di Pesisir Utara, menolak dengan tegas ajakan (penyuluhan) Camat dan wakil perusahaan yang didampingi oleh aparat keamanan. PT PPL hanya mampu merealisasikan rencananya sam-pai tahap pengukuran (penyiapan lahan). Masyarakat di lima desa tersebut menolak kehadiran Tim pengukur lahan dari BPN dan PT PPL.

Usaha penolakan dan perlawanan masyarakat terhadap rencana

konversi *Repong Damar* tersebut akhirnya didukung oleh Menteri LH dengan mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan Peng-hargaan Kalpataru kepada masyarakat adat Pesisir Krui. Penilaian KLH tersebut berdasarkan usulan dari lembaga-lembaga yang tergabung dalam Tim Krui. Dukungan kepada masyarakat ini juga diberikan oleh WALHI dan LBH. Di kemudian hari strategi yang ditempuh oleh Tim Krui, LBH, dan Walhi tersebut berdampak positif, PT PPL dan KCMU kegiatannya dihentikan oleh Gubernur.

Pengalihan Status Kawasan

Sejak tahun 1935 Pemerintah kolonial Belanda telah membuat batas wilayah tanah adat dengan Hutan Suaka (sekarang menjadi TNBBS) dengan tanda batas yang dikenal oleh masyarakat dengan nama **BW**. Meskipun sebagian *Repong Damar* masyarakat ada yang masuk dalam BW, namun mereka mematuhi ketentuan batas BW tersebut. Mereka hanya membuka hutan dalam wilayah tanah adat/marga (di luar BW). Mereka memahami ketentuan larangan berladang atau berkebun di dalam Hutan Suaka (TNBBS) tersebut sebagai **Hutan Kawasan** yang tidak boleh dibuka.

Pada tahun 1972, Menteri

pertanian menunjuk sebagian kawasan hutan (adat/marga) di Pesisir Krui sebagai **areal kawasan hutan negara**. Kemudian pada tahun 1976 areal tersebut ditunjuk sebagai areal konsesi HPH PT Bina Lestari. Tentu saja semua penunjukan itu tanpa sepengetahuan masyarakat. Dalam realisasinya PT Bina Lestari hanya mampu mengeksploitasi sebagian kecil dari areal konsesi tersebut. Hanya di bagian sebelah ujung selatan wilayah Pesisir Krui (marga Bengkumat dan Ngaras). Karena PT Bina Lestari bermasalah dengan masyarakat dan Taman Nasional, akhirnya Dephut men-cabut izin HPH-nya.

Berdasarkan TGHK Propinsi Lampung tahun 1990, "kawasan hutan Pesisir Krui" kembali ditunjuk Menteri Kehutanan sebagai Hutan Produksi Terbatas "Eks HPH PT Bina Lestari". Inhutani V diberi wewenang untuk mengelola dan "merehabilitasi" areal Eks HPH tersebut, tentu saja tanpa sepengetahuan masyarakat setempat. Sebagian areal di wilayah tersebut dialihkan fungsinya menjadi Hutan Lindung. Masyarakat baru mendapatkan "penyuluhan" dari Tim Kehutanan pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1993 - 1996 Kehutanan melakukan kegiatan pemancangan Tata Batas Kawasan Hutan Pesisir Krui yang akan dikukuhkan

secara hukum sebagai Kawasan Hutan Negara (selama penunjukan areal tersebut sejak tahun 1972 belum pernah dilakukan pemasangan Tata Batas). Pada saat dilakukan pemancangan Tata Batas itulah baru muncul masalah pengalihan status kawasan, masyarakat resah dan bertanya-tanya tentang status *Repong Damar*-nya.

Masyarakat akhirnya mengajukan tuntutan keberatan terhadap pengalihan status kawasan tanah adat yang digunakan untuk mengelola *Repong Damar* tersebut. Baik melalui surat langsung kepada Menteri Kehutanan dan instansi terkait lainnya, maupun melalui forum-forum pertemuan formal. Masyarakat menuntut agar batas **Kawasan Hutan** dikembalikan seperti semula, yaitu batas **BW**.

Tim Krui melihat fenomena itu sebagai potensi yang akan mengancam kelestarian *Repong Damar*. Jika masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap wilayah yang diakses, dikhawatirkan mereka akan segera mengakhiri riwayat *Repong Damar*-nya. Diduga masyarakat tidak akan mau memelihara atau menjaga kelestarian *repong*-nya, jika kawasannya "dikuasai" pihak lain. Terlebih lagi di propinsi Lampung sering terjadi pengusiran "pengeluaran paksa"

masyarakat dari areal kebunnya yang ternyata merupakan register kawasan hutan, seperti yang terjadi di Gunung Balak, Pulau Panggung, dan Desa Dwi Kora.

Pendekatan yang ditempuh Tim Krui adalah memfasilitasi masyarakat dan pemerintah untuk duduk bersama-sama melakukan dialog. Pada tahun 1995 diselenggarakan Seminar Sehari tentang "kebun damar sebagai model hutan rakyat" yang melibatkan masyarakat dan pejabat pemerintah daerah dari berbagai instansi. Sasarannya adalah mengajak semua pihak untuk mengetahui apa yang telah diperbuat masyarakat Krui dan memfasilitasi petani untuk mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi-nya dalam mengelola *Repong Damar*. Sungguh aneh, ternyata pemahaman pemerintah terhadap *Repong Damar* masih minor. Banyak pejabat Kehutanan yang meragukan "kepiawaian" masyarakat dalam menanam damar, sebab diakui oleh ahli kehutanan bahwa budidaya tanaman hutan dari famili Dipterocarpaceae itu sangat sulit. Dikemudian hari, Tim Krui terus aktif berdiskusi dengan pemerintah untuk sama-sama memahami prestasi petani dalam membangun *Repong Damar* dan persepsinya terhadap kawasan yang dikelola.

Di lapangan, Latin dan Watala memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahannya. Strategi yang ditempuh adalah melakukan penguatan kelembagaan petani dan membuat peta secara partisipatif. Pemetaan secara partisipatif dilakukan untuk mengidentifikasi Tata Guna lahan yang di-kembangkan oleh masyarakat dan menelusuri sejarah pembuatan *atar* sebagai basis awal kegiatan-nya. Peta ini akan dipakai sebagai alat untuk komunikasi dalam dialog dengan berbagai pihak agar mengakui sistem *Repong Damar*.

Pada bulan Juni 1997 kembali diselenggarakan pertemuan antara masyarakat dan pemerintah dalam sebuah diskusi Panel. Peserta dari Pemerintah terdiri dari pejabat - pejabat di jajaran Kehutanan Pusat sampai TK II, Bappeda dan instansi terkait lainnya. Selain diskusi dalam ruangan, juga dilakukan kunjungan lapangan di desa Pahmongan. Dengan bantuan peta desa yang dibuat secara partisipatif, masyarakat menceritakan sejarah pembuatan *repong*-nya. Masyarakat tetap kukuh menuntut pengembalian batas Hutan Kawasan seperti semula ke BW. Dalam sesi akhir diskusi panel tersebut disampaikan "rumusan hasil diskusi" yang dibuat oleh Kehutanan. Salah satu poinnya

adalah menjawab tuntutan masyarakat dengan akan diterapkannya model "Hutan Kemasyarakatan" di Krui. Melihat "keganjilan" itu, ICRAF yang merasa memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian *Repong Damar* kembali melakukan pendekatan kepada Menteri Kehutan-an.

Dikemudian hari, Menteri Kehutan Jamaludin Suryohadikusumo menetapkan keputusan baru perihal *Repong Damar* Krui yang berada di dalam Kawasan Hutan sebagai **Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI)** dengan SK No. 48/Kpts-II/1998 tanggal 23 Januari 1998. Prinsip atau jiwa SK KDTI tersebut adalah mengakui keberadaan *Repong Damar* sebagai budi daya masyarakat Krui secara mandiri dan telah mampu berfungsi sebagai hutan. *Repong Damar* dapat diwariskan kepada anak cucu pemiliknya. Sementara *Repong Damar* yang berada di luar kawasan hutan menjadi hak milik penuh masyarakat.

Tim Krui menilai dalam SK tersebut sudah banyak tercermin kemajuan sikap pemerintah untuk mengakui keberadaan *Repong Damar* masyarakat Krui. Hanya saja yang mungkin masih menjadi ganjalan bagi masyarakat adalah tidak dilepaskannya kawasan hutan di

luar BW (lokasi sebagian besar *Repong Damar*) menjadi areal hak budi daya masyarakat secara penuh. Menyikapi keputusan KDTI, Tim Krui tetap netral (independen) dan akan terus mengupayakan terlaksananya dialog antara masyarakat dan pemerintah sehingga tercipta sua-sana hubungan yang harmonis. Target yang ingin dicapai adalah terciptanya rasa aman bagi masyarakat dalam mengelola *repong-nya*, sehingga *repong* tersebut tetap mampu berfungsi sebagai hutan yang lestari dan dapat menjamin kesejahteraan masyarakat.

Pada saat ini Latin dan Watala sedang memfasilitasi masyarakat untuk mengkaji SK KDTI dan mengantisipasi kemungkinan diselenggarakannya dialog dengan pemerintah. Sementara ini ada beragam persepsi masyarakat dalam menyikapi KDTI, sebagian masih tetap kukuh menolak areal *Repong Damarnya* dijadikan Kawasan Hutan negara, sebagian lagi masih ragu-ragu menyatakan sikapnya. Mudah-mudahan di era reformasi ini semua pihak akan mendukung terciptanya "reformasi untuk rakyat"; hak dan kedaulatan dikembalikan kepada rakyat sebagaimana yang diperjuangkan rekan-rekan mahasiswa di "rumah rakyat" pada tanggal 18 - 23 Mei 1998.

*Penulis adalah Peneliti di Lembaga
Alam Tropika Indonesia (LATIN)
Bogor.*

**BENGGAR, UMAQ, URAAT, DAN SIMPUKNG:
MODEL KEARIFAN PENGELOLAAN LATI-TANA
DAYAK BENUAQ DI KALIMANTAN TIMUR**

V. Nurita YS. dan Fidelis Nyongka¹

Di beberapa kawasan di Kalimantan Timur telah dikenal pola-pola pemanfaatan lahan oleh masyarakat lokal. Pola-pola yang ada sejak ratusan tahun silam itu tersebar di beberapa tempat, baik yang mudah maupun sukar dijangkau. Suku Dayak di kawasan Idaatn mempunyai pola pemanfaatan lahan, dengan kearifan lokal, yang mampu ber-tahan dan menjamin kehidupannya.

Lati-tana adalah sebutan dari *hutan dan tanah* oleh suku Dayak Benuaq. Pada suku Dayak Benuaq *lati-tana* terbagi dalam beberapa pola pengelolaan *Bengkar*, *Umaq-Tautn*, *Uraat-batekng*, dan *Simpukng*.

B e n g k a r

Bengkar (hutan primer) yaitu sebutan dalam bahasa Dayak Benuaq untuk hutan yang belum pernah dibuka/digarap manusia. Di areal *bengkar* kayunya berdiameter besar-besar dan tanahnya masih sangat subur.

Semua masyarakat yang tinggal dalam kawasan tersebut berhak dan bertanggung jawab atas *bengkar*. Oleh karena itu, orang luar tidak bisa sembarangan mengambil atau memanfaatkan apa yang ada di dalam *bengkar*. Semuanya harus melalui tata cara yang telah ditentukan adat istiadat. Orang yang mau mengambil ramuan rumah misalnya, harus meminta izin dahulu kepada kepala adat. Biasanya mereka melakukan upacara **pakaatn nyahuq**, yaitu upacara memberi makan kepada roh-roh yang ada di dalam *bengkar*. Bila hal ini tidak dilakukan, orang tersebut akan didenda adat oleh kepala adat dan kemungkinan besar akan mendapat malapetaka dalam pekerjaannya.

Manfaat *bengkar* bagi masyarakat Benuaq antara lain sebagai hutan cadangan. Di dalamnya tersimpan bahan ramuan rumah, binatang buruan, sungai yang menyimpan banyak ikan, obat-obatan, ramuan untuk upacara ritual, buah-buahan, akar, dan rotan. Sumber daya

¹ Pegiat Lapangan Sistem Hutan Kerakyata (SHK) Kalimantan Timur.

hutan-tanah tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan memiliki ikatan batin harmonis dan sakral. *Bengkar* sangat dihargai dan diperhatikan oleh Masyarakat Dayak Benuaq, mereka tetap memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kebutuhan keseharian tanpa keserakahan. Kesenambungan dan eksistensi *bengkar* tetap diper-tahankan

Umaq - Tautn

Pada umumnya masyarakat Dayak Benuaq hidup dari berladang (*Bekumaaq*). Berladang di sini dalam arti menanam padi, namun di ladang juga kerap ditanam jenis sayur-sayuran, pisang, ubi kayu, ubi jalar, nenas dan lain-lain (*Tumpang sari*). Hasil *umaq* (ladang) hanya dimanfaatkan sendiri, tidak dipasarkan. Hal ini dikarenakan rasa kekeluargaan masih sangat kuat, mereka lebih puas kalau ada kelebihan dari hasil ladang, mereka bagi-bagikan saja kepada keluarga yang masih kekurangan. Di tengah-tengah ladang didirikan pondok kecil (*pemuyo*) untuk beristirahat siang sekaligus tempat menjaga tanaman dari hama. Di sekitar pondok ditanami jenis buah-buahan seperti rambutan, durian, nangka dll, yang kemudian menjadi *Simpukng*. *Simpukng* yaitu suatu sistim (model) tradisional suku Dayak Benuaq dalam mengelola

sumber daya hutan.

Simpukng dijaga secara turun-temurun dan tidak dibuka lagi menjadi ladang. Masyarakat Dayak Benuaq juga menolak disebut sebagai peladang berpindah karena menurut mereka, sistem yang mereka pakai lebih tepat dikatakan sebagai sistem rotasi (berputar) atau gilir balik. Hal ini terbukti dengan munculnya istilah-istilah *batekng*, *baber*, *kuwako*, *boak*, *balikng batakng*, yang kemudian kembali menjadi hutan lagi. Istilah ini adalah nama dari urutan tingkat suksesi tanah yang mereka pakai untuk berladang. Hal ini juga menandakan adanya kesadaran dari masyarakat bahwa tanahpun mempunyai keterbatasan daya tahan dan sebagai upaya menghargai karya ***Perjadiq Bantikng Langit, Seniekng Pengitah, Lahtala Mootn Ulutn (Yang Maha Kuasa)***, yaitu hutan serta alam sekitarnya. Akan tetapi, pihak luar sering mendiskreditkan Masyarakat Dayak pada umumnya sebagai penyebab kerusakan hutan karena Masyarakat Dayak adalah peladang berpindah. Namun kalau orang yang sudah melihat langsung kehidupan di sana, barulah disadari bahwa anggapan tersebut sama sekali tidak benar.

Selanjutnya di bawah ini adalah uraian-uraian dari tahapan pe-

kerjaan dalam pembuatan ladang oleh masyarakat Idatn Dayaq :

1. Ngeraakng

Ngeraakng yaitu memberikan tanda pada calon/bakal ladang dengan menebas sebagian kayu-kayu kecil yang berada di areal ladang. Sebelum mulai *ngeraakng* orang terlebih dahulu menyalakan api, dari asap api tersebut mereka bisa melihat tanda baik/buruk. Apabila asap dari api yang mereka nyalakan mengarah ke mata hari terbit, berarti pertanda baik dan kegiatan *ngeraakng* bisa dilakukan. Akan tetapi, bila asapnya mengarah ke mata hari terbenam, berarti pertanda buruk dan kegiatan *ngeraakng* dihentikan sejenak sampai asapnya mengarah ke mata hari terbit. Apabila arah asapnya tidak mau berubah maka kegiatan memberi tanda di lahan tersebut terpaksa dibatalkan.

2. Nokaap

Kegiatan lanjutan dari *ngeraakng* adalah *nokaap*, yaitu kegiatan menebas semua kayu kecil sampai yang berdiameter sebesar lengan orang dewasa. Kegiatan ini dilakukan secara bergotong-royong (*pelo Jerap*), bergiliran dari ladang yang satu ke ladang yang lainnya. Untuk mengawali kegiatan ini orang perlu mengadakan upacara "*Pakaatn Nyahuq*". *Pakaatn* berasal dari kata *makaatn* yang

artinya memberi makan. Sedangkan *nyahuq* adalah tanda-tanda dari roh khusus yang tahu tentang keselamatan dan bahaya terhadap kehidupan manusia. Tanda-tanda ini diberikan melalui binatang-binatang khusus, misalnya bila pada waktu nebas orang menemukan bangkai binatang maka ladang tersebut harus dibatalkan, kalau kegiatan diteruskan anggota keluarga tersebut akan tertimpa musibah.

3. Noe'ng/Teme'kng

Noe'ng/Teme'kng yaitu menebang pohon-pohon yang berada di-dalam areal lahan ladang. Kegiatan ini hanya dilakukan oleh kaum laki-laki karena pekerjaan ini cukup berat dan memerlukan perhitungan. Alat yang dipakai yaitu beliung dalam bahasa lokalnya sering disebut *wase*.

4. Nutu Joa

Setelah kegiatan *noaang* selesai, selanjutnya orang mulai memotong (mencincang) dahan-dahan kayu yang mereka tebang tersebut sampai kelihatan rapi. Kegiatan ini dilakukan untuk mempermudah proses pengering-an sehingga pada waktu membakar ladang, tidak ada dahan atau ranting yang tersisa. Kegiatan memotong atau men-cincang dalam istilah lokalnya disebut *nutu*.

5. Ngoing Joa

Yaitu proses pengeringan pohon yang ditebang, termasuk ranting dan daunnya. Tujuannya agar pembakaran mudah dilakukan dan tanpa daun serta ranting yang tersisa. Kalau *umaaq soyaq* (ladang hangus), maka tanaman akan tumbuh dengan subur.

6. Ngeladekng

Sementara menunggu lahan kering dan siap dibakar, orang membersihkan sekeliling lahan, membuang semak-semak kering dengan membuat 'sekat bakar' supaya pada waktu membakar lahan, api tidak merayap ketempat lain atau hutan sekitar. Kegiatan ini biasa disebut *ngeladekng*.

7. Nyuru Joa

Nyuru joa yaitu membakar ladang. Alat untuk membakar adalah *namuuq* yaitu obor yang panjangnya kurang lebih dua meter (terbuat dari kulit kayu yang diikat dengan rotan).

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi masyarakat sebelum membakar ladang, yaitu:

- **Pertama**, membuat gambar *kerongoq* di atas tampian beras kemudian dipasang tali dan digantung di halaman rumah. Tujuannya adalah untuk mengundang angin kencang. Menurut mitos, *kerongoq* adalah orang yang bisa mendatangkan angin oleh sebab itu pada saat orang

menggantungkan gambar *kerongoq*, selalu mengatakan, "O *dolak olo kapek kuweu kerongoq deooq*" artinya "o angin datanglah kipasan dari *kerongoq* banyak".

- **Kedua**, menggosok tujuh buah lombok di atas batu asah, supaya datang panas.
- **Ketiga**, menyapu halaman rumah bersih-bersih. Tujuannya agar tanaman yang akan dibakar ladang dapat terbakar semuanya sampai bersih seperti halaman rumah.

8. Mongkekng

Kegiatan membakar sisa-sisa ranting yang tak terbakar pada saat *nyuru joa*. Pada tahap ini semua sisa ranting yang tak terbakar dikumpulkan, kemudian dibakar sampai habis.

9. Ngasek

Setelah selesai *mongkekng*, dimulailah kegiatan *ngasek* (menugal/menanam padi). Kegiatan ini selalu dilakukan secara bergotong-royong, bergiliran dari ladang yang satu ke ladang yang lainnya. Pemilik ladang cukup mengundang satu dua orang saja, kemudian orang tersebut menceritakan kepada yang lainnya. Pemilik ladang menyiapkan bibit dan makanan berupa nasi dan lauk pauk dibungkus daun pisang.

Di tengah-tengah ladang dibuat *pokaatn bini*. *Pokaatn* artinya tempat (kediaman), sedangkan

bini adalah bibit padi yang akan ditanam. Pemilik ladang mengawali kegiatan *Ngasek* dengan menanam padi di dalam *pokaatn bini* yang biasa disebut *pelotar*. *Pelotar* harus dilakukan oleh orang yang gesit dan hemat karena menurut kepercayaan orang yang gesit dapat melakukan pekerjaan dengan cepat dan bibit yang dihabiskan hanya sedikit meskipun lahannya luas. Kegiatan *pelotar* harus dilakukan sebelum matahari terbit, karena menurut kepercayaan kegiatan ini tidak boleh didahului oleh lalat.

Beberapa pantangan dalam kegiatan *ngasek* (menugal), antara lain tidak boleh makan tebu, tidak boleh makan pisang, harus makan makanan yang sudah disiapkan oleh pemilik ladang dll.

10. Ngejikut

Ngejikut yaitu memelihara padi yang sudah tumbuh dengan membuang rumput-rumput (menyiangi) yang juga tumbuh di sekitarnya. Maksudnya agar padi lebih subur dan tidak diserang hama. Perempuan lebih berperan dalam kegiatan ini, termasuk pekerjaan yang agak ringan. Pada waktu bersamaan kaum laki-laki mempunyai kegiatan lain, yaitu menyiapkan *kelengkikng* (lumbung padi) untuk masa panen nanti.

11. Ngotepm

Sebelum mulai kegiatan *ngotepm* (potong padi) terlebih dahulu diadakan upacara *nema pare* (panen padi awal). Upacara ini diadakan secara berkelompok tergantung padi pada waktu matangnya. Upacara ini bertujuan untuk memberi makan kepada roh-roh padi tahun lalu agar diberi berkat sehingga hasil panen bisa mencukupi dan tidak terjadi malapetaka di dalam keluarga mereka. Kegiatan *ngotaapm* lebih banyak didominasi kaum perempuan dan dilakukan secara bergotong royong. Para pengikut masing-masing membawa *gamak* (lanjung), *amoq*, serta *gentuq* (ani-ani). Setiap *gamak* penuh, isinya dituangkan ke selebar tikar *kajakng* yang sudah disiapkan pemilik ladang. Isi tikar *kajakng* tersebut ditumpahkan lagi ke dalam *amoq* untuk diangkut dan dimasukkan ke dalam lumbung padi (*kelengkikng/ancok*).

Pemilik ladang dan kaum laki-laki bertugas mengangkut *amoq* ke lumbung padi. Setiap orang yang membantu proses pengangkutan diberi satu *amoq* (lanjung) padi sebagai upah atau balas jasa.

Uraat-Batekng

Uraat-batekng (hutan sekunder) yaitu sebutan bagi lahan yang sudah pernah dibuka/ digarap menjadi ladang (*umaq*) untuk menanam padi pada tahun

pertamanya. Kayu-kayu pada *uraat-batekng* ini biasanya masih kecil dan lahannya kurang subur dibandingkan dengan *bengkar*. Yang berhak atas *uraat-batekng* adalah orang yang membuka/menggarap *bengkar* menjadi *uraat-batekng* atau keturunannya. Orang lain bisa memakai lahan tersebut bila diizinkan oleh pemiliknya. Di dalam *uraat-batekng* biasanya dijumpai ber-bagai jenis buah-buahan, getah (karet alam), dan rotan yang nantinya dikenal dengan berbagai ragam *simpukng*. Tanaman ter-sebut biasanya ditanam ber-samaan dengan penanaman padi atau setelah usai panen pada *umag – tautn* (ladang).

Setelah ditanami padi, *umag* sering ditanami berbagai jenis tanaman produktif atau dibiarkan saja tidak ditanami apa-apa. Hal ini sengaja dilakukan dengan tujuan agar tumbuhan alam bisa tumbuh sehingga tahun-tahun berikutnya bisa dibuka menjadi *umag* (ladang) kembali. Pola perladangan yang seperti ini adalah pola gilir balik bukan pola berpindah-pindah. Dengan pola ini masyarakat Dayak Benuaq memiliki siklus dan klasifikasi hutan setelah pembukaan awal *bengkar* menjadi *umag*. Di setiap siklus dan klasifikasi boleh digarap/dibuka menjadi perladangan kembali terutama yang tidak ditanami tanaman produktif.

Inilah siklus dan klasifikasi hutan setelah pembukaan awal *bengkar* menjadi *umag* :

No	Nama	Umur (thn)
1	<i>Baber</i>	01
2	<i>Kwako</i>	02
3	<i>Boaq</i>	03
4	<i>Balikng Batakng Uraq</i>	04 – 07
5	<i>Balikng Batakng Tuhaq</i>	07 - 10
6	<i>Urat Uraq</i>	10 – 15
7	<i>Urat Tuhaq</i>	15 keatas
8	<i>Bengkae Kereroyatn</i>	70 keatas
9	<i>Bengkar Mentutn</i>	100 keatas

Simpukng

Simpukng adalah sebutan spesifik untuk suatu kawasan

terpilih yang didasari berbagai sebab. *Simpung* oleh masyarakat setempat di-artikan sebagai kumpulan pohon yang

tumbuh dalam suatu kawasan. Penyebutan *simpukng* untuk suatu kawasan lebih didasari oleh kepentingan atas kawasan tersebut, baik kepentingan atas fungsinya, potensinya, bahkan religi/kepercayaan. Di kawasan Idaatn, *simpukng* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yakni berdasarkan potensi, fungsi, lokasi, religi/kepercayaan, dan proses pembentukannya.

Klasifikasi

1. Berdasarkan Potensi

- *Simpukng Bua*
Yaitu sekelompok pohon buah-buahan yang terdiri dari berbagai jenis yang berada dalam suatu kawasan tertentu. Jenis buah ber-variasi: Asam (Puluhan Jenis), Rambutan (puluhan Jenis), Durian (puluhan jenis), *Lang-sat*, dan masih banyak lagi ragam buah-buahan lain yang hanya tumbuh di bumi Kalimantan saja.
- *Simpukng Uwe*
Yaitu kawasan yang ditumbuhi oleh beragam jenis rotan baik rotan alam maupun yang ditanam dan tetap dipelihara.
- *Simpukng Tanyut*
Yaitu kawasan yang hanya ditumbuhi pohon besar yang dihinggapi madu (pohon madu). Lazimnya pohon-pohon besar di dalam hutan

dipelihara, dibersihkan sekitarnya (agar lebah madu mau hinggap).

2. Berdasarkan Fungsi

- *Simpukng Lati*
Yaitu kawasan hutan primer dan hutan sekunder yang dibiarkan menjadi hutan cadangan untuk bermacam keperluan

3. Berdasarkan Lokasi

- *Simpukng Lou*
Yaitu *simpukng* yang berada disekitar *lou* (Rumah panjang). *Simpukng* ini dimiliki oleh orang menanamanya beserta keturunan-keturunannya. Namun, bila *simpukng* ini berbuah, semua penghuni *lou* bebas memetikanya sepanjang untuk konsumsi sendiri (tidak dijual).

Dahulu *lou* oleh suku Dayak benuaq ditempati hingga rusak dan tidak diperbaiki, mereka kemudian pindah ke daerah lain. Oleh karena itu banyak sekali ditemukan *simpukng lou* yang sudah tidak ada *lou*-nya lagi.

- *Simpukng Lalaq*
Yaitu *Simpukng* yang ditanami di sekitar kanan kiri jalan (Jalan). *Simpukng* ini dimiliki secara perorangan oleh orang yang menanamanya. Dengan demikian apabila tanamannya berbuah yang berhak

memetik buahnya hanya orang tersebut atau keturunannya.

secara perorangan oleh penanamnya dan diwariskan kepada keturunannya.

- *Simpukng Belay*
Yaitu Tanaman buah-buahan yang berada di sekeliling rumah tempat tinggal (pemukiman). Apabila belay (rumah) tersebut telah tidak ada, lokasi tersebut berubah menjadi *simpukng* dan akan disebut *simpukng* belay. *Simpukng* belay ini masing-masing dimiliki keluarga yang menanamnya dan kemudian dapat diwariskan kepada keturunannya .

- *Simpukng Belay Umaq*
Simpukng belay *umaq* adalah tanaman yang ditanam di sekitar rumah yang dibangun di tengah ladang. Tanaman tersebut berupa buah-buahan seperti durian, cempedak, langsung, jelai, rotan, dan lain-lain. Belay *umaq* hanya didiami selama kegiatan berladang dilakukan dan didirikan di ladang yang letaknya jauh dari kampung. Ketika rumah (belai *umaq*) ditinggalkan sementara tanaman yang ada di sana akan terus tumbuh menjadi *simpukng* belay *umaq*. *Simpukng* belay *umaq* ini juga dimiliki

1. Berdasarkan
Religi/Kepercayaan

- *Simpukng Nunuk*
Yaitu suatu kawasan yang terdapat banyak pohon nunuk (beringin) dan dipercaya dihuni oleh roh-roh halus.
- *Simpukng Kayuq Yaq Nan Entutn*
Yaitu kawasan yang dibiarkan menjadi hutan karena terdapat berbagai pohon yang dianggap ada penghuninya (roh-roh dan makhluk gaib).

1. Berdasarkan Proses
Pembentukan

- *Simpukng Rahaatn*
Dulu kegiatan ber-*rahaatn* (berusaha) masih sangat erat dalam kehidupan suku dayak Benuaq. Kegiatan ini dilakukan secara berombongan dengan maksud antara lain mencari damar untuk penerangan, berburu untuk kebutuhan lauk pauk, membuat ramuan *lou* (rumah panjang), dll. Maklum dulu masih belum ada minyak, gas, apalagi listrik jadi untuk penerangan mereka harus membakar damar.

Simpukng rahaatn yaitu tanaman buah-buahan bah-

kan rotan yang ditanam pada saat orang pergi berusaha di dalam hutan. Tanaman tersebut ditanam di sekitar pondok tempat istirahat. Oleh sebab itu kerap orang menemukan tanaman buah-buahan atau rotan di dalam hutan yang belum pernah dibuka (*bengkar*). Orang luar kemudian menyebutnya sebagai tumbuhan hutan. Padahal tumbuhan tersebut sengaja ditanam masyarakat pada waktu ber-*rahaatn* (berusaha) tadi. Pola pemilik-an *simpukng* *rahaatn* sama dengan *bengkar*, yaitu milik semua masyarakat yang berada dalam kawasan tersebut. Pada musim buah, mereka akan pergi memetik-nya secara beramai-ramai.

Fungsi - fungsi *Simpukng*

1. Fungsi Ekologis

- Perlindungan suatu kawasan. Daerah resapan air. Ada suatu kawasan yang secara kepercayaan ditetapkan sebagai *simpukng* dengan alasan Jariq (larangan) karena berada tepat di atas mata air. *Simpukng* tersebut dipercaya menjadi 'rumah' roh-roh penunggu mata air.
- Penjamin kelangsungan hidup hewan-hewan hutan. Pada saat *simpukng* meng-

hasilkan buah akan menjadi 'pemancing' bagi kawanan hewan buruan yang mencari makan.

Bank sumber genetik. Ribuan jenis tumbuhan yang berguna bagi pengobatan tetap terpelihara dalam *simpukng*.

2. Fungsi Ekonomi

Simpukng menjadi lahan produksi bagi sumber daya lokal seperti buah-buahan, rotan, dan hasil lainnya.

3. Fungsi Sosial Budaya

- *Simpukng* menjadi media pemersatu masyarakat. Terbukanya suatu kawasan untuk dimanfaatkan/dipungut hasilnya (sepanjang tidak dijual) yang berlaku bagi siapa saja akan mempertebal rasa solodaritas antar-masyarakat (sosial)
- Dalam hal budaya, *simpukng* menjadi 'bank' bagi bahan-bahan upacara adat yang secara rutin dilaksanakan.

Akhirnya, Masyarakat tradisional pada dasarnya memiliki pengetahuan asli yang sudah berlaku dan diterapkan sejak mereka ada dan teruji sesuai dengan keadaan alamnya. Pengetahuan asli ni kerap dipandang sebagai pengetahuan kuno dan tidak sesuai di zaman

modern ini. Padahal sistem tradisional asli merupakan sistem paling cocok diterapkan di tempat sistem itu lahir dan berada.

*ete mali lah kaiq bolupm,
tameh solai
lati beroh sunge
yaq napikng
aro lah aseknng*

Pola pengetahuan lokal dalam pengelolaan *lati-tana* (hutan tanah), sangat memungkinkan perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan di tempat pola tersebut diterapkan. Pola ini dapat menimbulkan ikatan batin yang sakral serta hubungan timbal balik yang saling melengkapi dan harmonis (manusia

Artinya, kira-kira demikian:
pohon dan tanah adalah
ibu dan ayah kami
dari merekalah kami hidup,
tumbuh dan berkembang.
Hutan dan sungai
yang mengalir
adalah napas kami.

dan alam). Siapapun yang merusak salah satunya entah dari luar atau dari dalam berarti “membunuh” keduanya (manusia dan alam).

Benarlah ungakapan bijak :
*pu'utn kayuq beroh tana aro lah
neq-maq kaiq*

PENGALAMAN ADVOKASI MASYARAKAT KORBAN PENCEMARAN INDUSTRI: KASUS KALI BABON

Eko Sulistyو

Pendahuluan

Kegiatan industri yang makin pesat saat ini dapat berdampak negatif dan berpotensi menimbulkan sengketa lingkungan. Kegiatan industri yang menggunakan sumber daya alam selain dapat memberikan manfaat pada sekelompok orang, juga dapat menimbulkan kerugian pada kelompok masyarakat lain, baik yang bersifat ekonomis maupun non-ekonomis. Kerugian yang bersifat ekonomis antara lain hilang atau terancamnya mata pencaharian dan kemerosotan nilai pendapatan. Sedang kerugian yang bersifat non-ekonomis antara lain terganggunya kesehatan dan kebisingan akibat pencemaran yang ditimbulkan dari kegiatan industri.

Tidak heran jika saat ini permasalahan lingkungan yang terkait dengan kegiatan industri makin meningkat intensitasnya. Di Jawa Tengah saja menurut catatan yang didokumentasikan Gita Pertiwi (GP) terdapat sembilan belas kasus

pencemaran¹ yang mendapat protes warga dan sampai saat ini belum ada kejelasan penyelesaiannya. Penyelesaian dari pengaduan kasus-kasus ini umumnya kurang mendapat respons positif, baik dari pemerintah maupun pengusaha. Padahal masyarakat telah berusaha mengadukan kasusnya mulai dari Ketua RT, Kepala Desa, Camat, Bupati/Walikota, bahkan ada yang sampai ke DPR, Komnas HAM dan Bapedal, Jakarta. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan sampai saat ini belum berpihak pada kepentingan masyarakat.

¹ Beberapa di antaranya adalah kasus Kali Bengel (Pekalongan), Naga Mas (Batang), Kali Sambong (Batang), Seturi Agrindo (Batang), Kali Babon (Demak), Damatek (Salatiga), Kanindotex (Ungaran), Pabrik Tapioka (Pati), Kali Cijalu (Cilacap), Tyfountex (Sukoharjo), Sritex (Sukoharjo), Sari Warna Asli (Solo), PT. Batik Keris (Solo), PT. Acydatama (Karanganyar). Lihat, Dokumentasi Laporan Pelatihan Advokasi dan Manajemen Isu Kasus Pencemaran di Jawa Tengah (GP, 1997).

Belum berpihaknya kebijakan lingkungan kepada masyarakat secara struktural bersumber pada strategi pembangunan industrialisasi kita yang mementingkan pertumbuhan ekonomi ditopang stabilitas politik. Dalam wacana semacam itu benturan kepentingan di masyarakat yang muncul akibat dampak industrialisasi (pencemaran) cenderung akan dimenangkan oleh kepentingan pemilik modal. Tidak heran jika kemudian sampai saat ini politik hukum lingkungan kita juga belum memberikan peluang bagi terakomodasinya kepentingan dan partisipasi masyarakat secara luas dalam pengelolaan lingkungan.

Sementara pada sisi lain, belum berfungsinya lembaga DPR secara optimal dan belum terorganisirnya kekuatan masyarakat menjadikan lemahnya tekanan dan kontrol publik atas kebijakan lingkungan. Padahal tekanan dan kontrol publik ini merupakan aspek penting untuk mendorong keberhasilan penegakkan hukum lingkungan.

Dalam kerangka seperti itu, tentunya upaya penanganan kasus lingkungan membutuhkan strategi advokasi yang benar-benar ber-orientasi pada penguatan dan pemberdayaan masyarakat korban (*people-empowerment*). Cara ini

memerlukan kerja-kerja kreatif yang tidak hanya membantu penyelesaian kasus tetapi juga menjadi langkah efektif untuk menerobos kebekuan kekuasaan politik dan hambatan struktural lainnya. Kerja-kerja kreatif yang dimaksud adalah pembentukan kelompok, pertemuan kelompok, penanganan kasus, monitoring kasus, sampai gugatan pengadilan. Sementara untuk advokasinya diperlukan kerja berjaringan (*net-working*) dan membangun opini publik terhadap kasus yang diadvokasi. Dalam tulisan ini akan dipaparkan pengalaman GP melakukan advokasi kasus pencemaran Kali Babon, Demak, yang saat ini kasusnya dalam proses gugatan di pengadilan negeri Semarang.

Kasus Kali Babon: Awal Sengketa

Kasus Kali Babon merupakan sengketa antara masyarakat desa Sriwulan dan Bedono Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak (138 orang), dengan enam perusahaan yang berlokasi di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Kali Babon, yaitu (1) PT. Condro Purnomo Cipto; (2) PT. Puspita Abadi; (3) PT. Rodeo; (4) Bintang Buana; (5) CV. Sumber Baru; (6) Puskud Mina Baruna. Sengketa berawal ketika masyarakat mengetahui bahwa penyebab kematian

udang di tambak adalah limbah yang berasal dari aliran Kali Babon. Awalnya masyarakat tidak mengetahui penyebab kematian udang itu adalah limbah. Mereka baru mengetahui-nya setelah ada pemberitaan di sebuah surat kabar yang menyatakan Kali Babon masuk Program Kali Bersih (Prokasih), yang artinya kali tersebut terkena pencemaran².

Pada tanggal 21 Desember 1994, masyarakat mengadakan kasus ini ke DPRD II Kabupaten Demak. Pengaduan masyarakat ini kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan anggota Dewan kepada Bupati Demak, melalui Kabag. Lingkungan Hidup, untuk mengecek di lapangan. Selang beberapa waktu, dilakukan penelitian oleh Balai Budi Daya Air Payau (BBAP) Jepara, untuk mengetahui adtidaknya pencemaran sebagaimana yang dikeluarkan masyarakat³. Hasil

penelitian itu membuktikan bahwa ternyata memang telah terjadi pencemaran di Kali Babon yang menyebabkan kematian udang, kepiting, dan beberapa jenis ikan di tambak masyarakat.

Atas saran DPRD II Demak, warga dianjurkan mengajukan per-soalannya ke DPRD II Semarang, karena lokasi pabrik yang dianggap mencemari kali berada di wilayah administrasi Kodya Semarang. Namun, karena menyangkut dua wilayah, per-masalahan tersebut kemudian dilimpahkan ke DPRD I Jawa Tengah. Selanjutnya dengar pen-dapat dilakukan dengan Komisi C DPRD I Jawa Tengah, yang waktu itu diketuai ibu Hajjah Kotijah (FPP). Pihak-pihak yang mengikuti dengar pendapat adalah warga yang diwakili sepuluh orang, pemerintah diwakili Biro Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Perikanan Jawa Tengah, dan wakil dari pengusaha.

² Keterangan untuk kronologis kasus ini lebih banyak didasarkan pada wawancara dengan Bapak Rochani SY, salah seorang tokoh masyarakat yang menjadi korban, 31 Maret 1997.

³ Arief Taslihan dkk, Hasil Kajian terhadap Kaus Kematian Crutacea di Perairan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (Dirjed. BBAP, Jepara, 1995). Dalam penelitian ini disebutkan bahwa kasus kematian udang dan kepiting serta beberapa jenis ikan bukan sebagai akibat serangan organisme patogen mereka, tapi disebabkan oleh faktor

lingkungan. Pencemaran akibat dari kegiatan tambak yang massal juga tidak dapat dibuktikan, karena sistem pemeliharaan di daerah ini seluruhnya dilakukan secara ekstensif. Tapi dari hasil pengamatan terhadap sampel air dan tanah jelas ditemukan beberapa jenis logam berat seperti Cadmium Tembaga (Cu), Kromium dan Timah Hitam (Pb), baik di air maupun di sediman, yang diyakini menyebabkan kematian udang dan beberapa jenis ikan lainnya.

Dengar pendapat berjalan alot karena semua pihak bertahan pada argumen masing-masing. Pemerintah--melalui keterangan Dinas Perikanan--menyatakan bahwa kematian udang adalah akibat penyakit, sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukannya. Warga sendiri berpegang pada hasil penelitian BBAP, yang menyebutkan kematian udang di tambak masyarakat terjadi akibat limbah Kali Babon. Pengusaha sendiri tampak menunggu dan menolak tuduhan masyarakat. Dengar pendapat ini tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga tiga hari kemudian diadakan kembali pertemuan di gedung Berlian, Jalan Pahlawan, Semarang.

Pada pertemuan kedua terdapat perkembangan baru. Setelah warga menunjukkan hasil penelitian yang dilakukan BBAP, pengusaha akhirnya mengakui bahwa perusahaannya telah mencemari Kali Babon. Pada kesempatan ini juga warga mengajukan ganti rugi (jumlahnya tidak diperinci). Menanggapi tuntutan masyarakat ini, salah seorang anggota Dewan mengusulkan agar diberikan semacam "tali asih" kepada masyarakat oleh perusahaan.

Warga awalnya menolak usulan pemberian tali asih karena dinilai sepihak dan jumlahnya tergantung pihak perusahaan.

Akan tetapi setelah didesak Muspika dan lurah masing-masing, warga terpaksa menerima usulan pemberian tali asih sebesar Rp15.000.000. Peran Muspika dalam proses pemberian tali asih cukup dominan. Warga dikumpulkan di kelurahan agar mau menerima tali asih. Bahkan dalam proses negosiasi, Muspika melibatkan warga yang tadinya sama sekali tidak terlibat dalam soal gugatan. Mereka inilah yang kemudian melemahkan semangat warga yang sejak semula menuntut ganti rugi, karena tali asih dianggapnya sebagai "rejeeki nomplok"⁴. Tapi bagi warga yang tidak puas tetap mencari keadilan menuntut ganti rugi melalui kuasa hukum LBH Semarang.

Pengorganisasian

⁴ Pelibatan warga yang tidak mengikuti proses gugatan sejak awal ini mengakibatkan melemahnya semangat warga yang semula menuntut dan menyebabkan membengkaknya warga yang mengklaim dirinya ikut menggugat dan menuntut haknya. Sehingga uang Rp15.000.000 kemudian dibagi untuk dua desa, dengan perincian 693 orang dengan luas tambak 693 hektar. Uang ini akhirnya dipakai membangun sarana jalan di desa Sriwulan dan Bedono. Lihat LBH Semarang, "Penanganan Kasus Pencemaran Kali Babon Demak", paper kasus yang disampaikan pada Sarasehan Perencanaan Strategi Advokasi B3 (Bahan Beracun Berbahaya), yang diselenggarakan GP, Salatiga 28-30 Nopember 1995.

Secara umum kegiatan pengorganisasian merupakan bentuk praktis penguatan masyarakat yang bertumpu pada kepentingan masyarakat serta berupaya mengangkat potensi yang ada untuk dioperasionalkan dalam tindakan nyata untuk mendukung advokasi yang hendak dilakukan. Dalam kerangka ini berarti aspek dasar pengorganisasian terletak pada potensi kekuatan yang ada pada masyarakat korban. Potensi inilah yang selanjutnya kita identifikasi sebagai sumber kekuatan masyarakat. Sementara kekuatan eksternal di luar masyarakat (LSM, negara, modal, dsb.) juga harus dianalisis untuk memetakan dan memosisikannya sebagai aktor yang mendukung atau malah menjadi penghambat kerja advokasi itu sendiri.

Hal yang pertama kali dilakukan GP saat masuk ke lokasi kasus adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi segala cara dan upaya yang telah ditempuh masyarakat untuk menyelesaikan kasusnya selama ini⁵. Ini dilakukan mengingat

⁵ Keterlibatan GP dalam advokasi pencemaran Kali Babon diawali ketika Bapak Rochani meminta Gita Pertwi membantu menyelesaikan kasus pencemaran yang dialaminya. Permintaan ini diajukan saat ia diundang sebagai salah satu wakil masyarakat korban pencemaran pada Sarasehan Perencanaan

masyarakat sebenarnya telah melakukan advokasi dalam rangka mencari penyelesaian kasus yang dialaminya, meski belum maksimal. Apalagi sebelumnya masyarakat juga sudah didampingi sebuah LSM yang mencoba membantu advokasi hukumnya (litigasi).

Dari proses identifikasi dan evaluasi ini diketahui bahwa ternyata masyarakat belum melakukan pengorganisasian secara baik dan solid. Ini terlihat dari sikap masyarakat yang kurang kompak dan terkesan belum memiliki sikap yang sama saat ditanya mengenai kelanjutan kasusnya. Bahkan musyawarah maupun rapat yang seharusnya menjadi media untuk mengambil keputusan bersama dalam menyikapi pencemaran tersebut, juga belum pernah dilaksanakan. Masyarakat tam-paknya masih sangat meng-tungkan peran seseorang yang ditokohkan serta pihak luar (LSM) sebagai advokator yang akan menyelesaikan perkaranya.

Persepsi-persepsi salah ini selanjutnya diskusikan bersama untuk mencari titik pandang yang sama dalam rangka lebih mensolidkan langkah perjuangan masyarakat. Dalam hal ini perjuangan harus dipahami sebagai

Strategi Advokasi B3 (bahan Beracun Berbahaya) yang diselenggarakan GP di Salatiga, 28-30 Nopember 1995.

upaya kebersamaan di dalam mencapai tujuan. Yang menarik ternyata masyarakat tetap melanjutkan tuntutan ganti rugi ke pengadilan. Keinginan ini tentunya menjadi pelecut semangat dalam menyusun kerja pengorganisasian selanjutnya, seperti pembentukan kelompok, pembagian peran di antara warga, tugas monitoring limbah, rapat kelompok, lobby, sampai menyusun strategi advokasi selanjutnya.

Untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap dasar-dasar hukum lingkungan maupun dinamika kelompok, dalam rapat senantiasa didiskusikan hal praktis yang berkaitan dengan ketentuan dalam Kebijakan hukum lingkungan, baik tentang UU No. 4 Tahun 1982 (yang lama) maupun UU No. 23 Tahun 1997. Bahkan perkembangan hal-hal baru dalam ketentuan hukum lingkungan, seperti pengertian asas *strict-liability* (asas tanggung jawab mutlak) atau *class action* (gugatan perwakilan), juga disosialisasikan kepada mereka. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat benar-benar memahami peraturan dan kebijakan hukum lingkungan. Pemahaman ini penting untuk menumbuhkan sikap keberanian dan agar masyarakat benar-benar mengerti dengan masalah yang sedang mereka perjuangkan.

Berangkat dengan dasar pemahaman tersebut, beberapa aksi dilakukan sebagai upaya advokasi bersama masyarakat. Aksi pertama yang dilakukan dalam rangka advokasi ini adalah mengangkat kembali kasus pencemaran Kali Babon melalui media massa. Dalam hal ini media massa diundang wawancara dengan masyarakat soal rencana menggugat Walikota Semarang dan enam perusahaan yang dianggap mencemari kali. Usaha ini dinilai membuahkan hasil dengan ditanggapinya keinginan warga oleh Walikota. Pihak Walikota kemudian menyanggupi akan menyelesaikan tuntutan warga dalam jangka sebulan. Akan tetapi janji tinggal janji. Walikota ternyata tidak menepati janjinya untuk menyelesaikan tuntutan warga. Dengan perkembangan ini mediasi dianggap telah gagal sebagai jalan penyelesaian yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu langkah selanjutnya adalah menyiapkan gugatan ke pengadilan.

Untuk menyiapkan gugatan ke pengadilan, selain didampingi GP, masyarakat juga dibantu kantor pengacara Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia (Yaphi) Kudus. Yang selanjutnya membagi tugas mengumpulkan data-data dan bukti-bukti yang bisa memperkuat dasar gugatan di pengadilan. GP sendiri

kemudian melakukan dua kali penelitian sampel air untuk membuktikan adanya pencemaran di Kali Babon maupun tambak masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan GP membuktikan bahwa di sungai tersebut telah terjadi tingkat pencemaran. Hasil penelitian itu juga menunjukkan adanya beberapa unsur kimia terlarut yang melebihi baku mutu standard, yakni Oksigen Terlarut (DO), menunjukkan 4 ppm, yang berarti aktifitas biota perairan dapat dikatakan terganggu perkembangannya; NH₃ (Amoniak), dengan jumlah ammonium yang melebihi baku mutu yang ditetapkan yaitu 0,115 ppm. Selain itu juga ditemukan kandungan beberapa jenis logam berat yang melampaui baku mutu yang telah ditetapkan seperti Cd dan Pb yang cukup besar dan sangat berpengaruh terhadap tingkat toksisitas perairan⁶.

Hasil penelitian ini kemudian dijadikan dasar gugatan warga ke pengadilan. Dalam gugatan

ini warga menuntut pihak Walikota dan enam perusahaan yang membuang limbahnya ke Kali Babon untuk masing-masing membayar ganti rugi sebesar Rp186 juta kepada 9 petani tambak⁷. Dalam perkembangannya, gugatan terhadap Walikota dicabut oleh kuasa hukum warga atas permintaan warga sendiri, setelah ada kompromi dengan Pemda Semarang yang bersedia membantu memberikan data-data monitoring limbah industri di Kali Babon. Saat ini tinggal gugatan terhadap enam perusahaan yang masih dalam proses menunggu putusan di pengadilan negeri Semarang⁸.

P e n u t u p

Memang disadari dalam iklim politik yang belum berpihak kepada rakyat seperti saat ini, upaya menempuh jalur legal dengan menggugat perusahaan ke pengadilan terasa akan sia-sia. Meski dalam UU Lingkungan yang baru (UU No. 23 Tahun 1997) sendiri banyak dimuat ketentuan yang memberi sanksi (perdata dan pidana) bagi pihak pencemar/ perusak lingkungan. Apalagi dalam kasus seperti ini,

⁶ Penelitian sampel air ini dilakukan pada tanggal 31 Maret dan 8 Desember 1997. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pencemaran Kali Babon terhadap turunnya daya dukung lingkungan maupun budidaya tambak tradisional masyarakat di desa Sriwulan dan Bedono, Sayung, Kabupaten Demak. Sampel yang diteliti diperiksa juga di Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Yogyakarta.

⁷ Sembilan warga ini di luar 138 orang yang telah mengkuasakan ke LBH Semarang. Sementara untuk warga yang mengkuasakan ke LBH Semarang masih menunggu pembuatan draf gugatan.

⁸ *Bernas*, 17 Maret 1998, *Jawa Pos*, 18 Maret 1998, *Suara Merdeka*, 3 April 1998.

umumnya tidak hanya berdimensi legal semata, tapi dimensi non-legalnya cukup dominan, seperti politik atau pendapatan/ekonomi daerah.

Oleh karena itu, dari awal masyarakat sudah menyadari akan hal ini sehingga pada akhirnya masyarakat tidak akan kecewa menerima keputusan yang mengalahkan gugatannya. Justru di sinilah masyarakat akan melihat bahwa keadilan masih timpang, belum berpihak pada rakyat seperti mereka. Di sisi lain, dengan perjuangan advokasi kasusnya, masyarakat setidaknya telah menunjukkan peran mereka sebagai "eksternal kontrol" dalam mencegah perilaku pasif dan menyimpang dalam penegakan hukum lingkungan. Sekali lagi

peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan menjadi penting, karena dalam kasus ini masyarakat tidak hanya menjadi pelaku (*actor*) tapi sekaligus juga korban (*victim*) yang potensial dari kerusakan lingkungan.

Sebagai penutup tulisan ini tentunya semua berharap supaya berhembusnya angin reformasi yang dipelopori mahasiswa saat ini, akan membawa peluang dan perbaikan ke arah penegakkan hukum lingkungan yang mencerminkan keadilan sebenarnya.

Penulis adalah Direktur Penelitian dan Pengembangan Informasi Lembaga Gita Pertiwi, Solo.

MENCERMATI EKONOMI KERAKYATAN DAN SUMBER DAYA LOKAL: BELAJAR DARI KEPULAUAN SERIBU

Surya Mulandar

Pengantar

Ekonomi berbasis rakyat yang dimaksud dalam tulisan ini adalah usaha-usaha masyarakat lokal yang bertumpu pada sumber daya lokal. Kendati disaat yang sama sumber daya tersebut mulai rusak dan mendekati kemusnahan, masih tetap menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam konteks ekonomi kerakyatan. Idealnya struktur produksi, pengolahan, sampai pemasaran sedapat mungkin masih tetap bertumpu pada sumber daya lokal, sementara faktor yang diintervensi dari luar adalah teknologi atau penyempurnaan teknologinya. Hal yang sulit dilakukan adalah apabila sumber daya lokalnya justru sedang mengalami kerusakan dan diikuti kemusnahan, seperti yang kini sedang terjadi di Kepulauan Seribu dan sekitarnya.

Gugusan karang yang berserakan dan membentuk pulau-pulau di sekitar teluk Jakarta merupakan karakteristik Kepulauan Seribu. Pada sensus penduduk tahun 1996 tercatat

sekitar 19.000 jiwa yang telah mendiami kawasan tersebut, dengan mata pencaharian berbasis sumber daya perairan. Patut juga dicatat bahwa sumber daya perairan Kepulauan Seribu ini tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, tetapi juga dimanfaatkan oleh berbagai sektor usaha -pariwisata, pertambangan dsb- termasuk konservasi sumber daya lingkungan.

Demikian ragamnya 'pengeksploitasi' sumberdaya perairan di lokasi ini, hingga sejak awal dekade 90-an sampai sekarang ini telah terjadi pemusnahan biota laut yang luar biasa. Aturan dan mekanisme yang tidak jelas serta maraknya sentimentil laut, di-perkirakan menjadi biang keladi kisruhnya kawasan yang menjadi jendela ibukota negara ini. Penyebabnya sederhana, masalah lingkungan, masyarakat miskin, sumber daya berlimpah, surga untuk liburan dan seterusnya, merupakan obyek dengan nilai jual yang menarik dan sentimentil untuk tempat cari 'pekerjaan' dan

proyek pembangunan. Demikian nasib Kepulauan Seribu akhir-akhir ini, siapapun, dimanapun dan kapanpun kita dapat menjarah sebebaskan atas nama pembangunan.

Akhir dekade 1990-an saat terjadinya *booming* ekspor ikan hias di Indonesia, kawasan ini sempat menjadi surga eksportir ikan hias. Saat itu lagi-lagi masyarakat tidak menikmati *booming*, dengan sistem oligopolistik dan mono-polistik peraih margin terbesar berada di tangan pemodal dan eksportir. Saking hebatnya penjarahan ikan hias ini, hanya dalam tempo tujuh tahun saja berbagai jenis ikan hias habis terkuras. Penjarahan ini juga telah menghancurkan beragam jenis terumbu karang langka milik dunia, akibat penggunaan bahan kimia sianida dalam teknik penangkapan ikan hias. Kini di kawasan tersebut, yang tersisa hanya terumbu karang yang rusak, bangkai besi becak-becak dan bus bekas proyek rumponisasi, serta menjadi tempat pembuangan sampah akhir dari kota Jakarta. Sementara ribuan liter minyak yang dihasilkan dari perut bumi teluk Jakarta tidak memberikan manfaat berarti buat kawasan Kepulauan Seribu dan masyarakatnya, suatu fakta serius dari kebijakan yang tidak hati-hati.

Dari Budaya Berburu Ikan Menjadi Bertani Ikan

Teknologi sektor kelautan sampai detik ini masih tergolong purba, tetap pada prinsip perburuan. Meski teknologi 'berburu' ini terus berkembang -- dari pancing, jaring, sampai kail dan sebagainya—tetapi masih dalam konteks perburuan. Maksud perburuan di sini adalah pemanenan sumber daya yang bergantung pada siklus alami sumber daya tersebut, tanpa ada *treatment* apapun dari manusia untuk memperbaharui sumber daya yang telah dipanen.

Pada saat *booming* ikan hias di era 80-an sampai awal 90-an, penggunaan teknologi yang destruktif dengan prinsip perburuan ini makin luas dengan tujuan memperbesar kuantitas buruan yang didapat untuk ekspor.

Sayangnya laju pengurusan yang didorong oleh *demand* ekspor tidak dapat diimbangi dengan laju kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan budaya tani ikan, di samping juga kelambatan pencarian alternatif teknologi budidaya ikan hias ini¹.

¹ Didapatkan temuan bahwa komunitas nelayan ikan hias ini justru terselamatkan dari garis kemiskinan dibanding komunitas nelayan

Sumber daya ikan hias mulai memasuki masa krisis dan komunitas nelayan ikan hias mulai kembali masuk dalam tingkat penghasilan di bawah garis kemiskinan. Program usaha budi-daya perikanan yang bertumpu pada sumber daya lokal kemudian digulirkan sebagai stimuli untuk meningkatkan kepercayaan diri komunitas dalam menyikapi situasi ikan hias di Kep. Seribu yang mulai krisis. Diasumsikan selama program berjalan, perbaikan ekologi dan sumber daya di Kep. Seribu mulai dibenahi melalui kebijakan-kebijakan yang ketat untuk memproteksi kawasan dari ancaman eksternal. Gugus Anali-sis melakukan kajian mendalam terhadap ancaman sumber daya tersebut dan melakukan pen-dampingan terhadap nelayan penangkap ikan hias. Proses pendampingan dilakukan untuk mengubah pola budaya masya-rakat dari budaya berburu men-jadi budaya bertani ikan. Proses perubahan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan *shock* budaya akibat adanya intervensi dari luar komunitas.

konsumsi, karena sektor ikan hias merupakan komoditas yang bernilai ekonomis. Untuk itu diperlukan alternatif teknologi yang layak lingkungan dan sanggup menandingi dan bahkan lebih bernilai ekonomis ketimbang menangkap ikan hias.

Proses perubahan budaya nelayan menjadi petani ikan di suatu kepulauan kecil, merupakan suatu transisi yang juga akan turut mengubah perilaku, cara pandang, dan kebiasaan hidup bermasyarakat. Nelayan melihat laut sebagai tempat dan sumber hidupnya, dalam dirinya telah tertanam suatu nilai untuk hidup dengan sumber daya laut. Kehidupan komunitas kepulauan kecil bersatu dengan sumber daya laut, bahkan nilai martabat tertinggi seseorang terletak pada kepaiwaiannya dalam menguasai dan mengenal sumber daya laut untuk dapat dimanfaatkan dalam komunitasnya. Seorang yang piawai mendeteksi letak keberada-an ikan, karang, atau membaca arus dan cuaca akan mendapatkan posisi terhormat dalam komunitasnya. Apabila budaya baru (bertani ikan) ini diterapkan dalam masyarakat, dengan sendirinya sistem nilai sosial yang sudah terbangun selama berabad-abad juga akan ikut berubah. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian yang ekstra dan tidak terburu-buru dalam melihat indikator keberhasilan. Tidak terjebak dalam kegiatan-kegiatan karikatif yang melulu didasarkan pada sentimentil belaka.

Uji Model Pembesaran Ikan

Komunitas nelayan ikan hias

merupakan kelompok masyarakat paling yang intensif didampingi Gugus Analisis, dibandingkan dengan komunitas masyarakat lainnya di Kep. Seribu. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya konflik masyarakat nelayan peng-guna racun (*potassium sianida*) dengan persoalan lingkungan hidup di kawasan tersebut. Gugus Analisis melakukan program uji coba pembesaran ikan karang melalui media keramba. Media ini diasumsikan dapat menstimuli ter-jadinya perubahan perilaku dalam penangkapan ikan, yakni dimulai dengan upaya mendiversikan sumber pendapatan nelayan. Tahap berikutnya adalah meng-alihkan okupasi nelayan ikan hias hingga dapat ditemukan teknologi alternatif dengan syarat tidak merusak lingkungan dan menjadi suatu bentuk usaha yang berkelanjutan.

Di tahap awal uji pembesaran ikan melalui medium keramba ini memang tidak ditujukan untuk secara ajaib memberikan pening-katan penghasilan ekonomi bagi komunitas, tetapi untuk mem-berikan stimuli bagi pengembang-an usaha model lain yang tidak merusak. Sedang di tingkat makro ditujukan sebagai media per-contohan bagi komunitas lainnya di Kepulauan Seribu maupun di Indonesia, utamanya model usaha sumber daya perairan

yang memenuhi syarat ekonomi, eko-logi, dan sosial. Uji coba ini diharapkan akan memiliki dua implikasi sekaligus, yakni skala komunitas nelayan dan di tingkat makro yang ingin mengadopsi usaha sejenis di tempat lain.

Program uji ini jelas masih bertumpu pada sektor perikanan, secara lebih tegas dapat dikatakan masih dalam lingkup usaha penangkapan ikan. Sumber-sumber bahan baku (bibit) masih mengandalkan hasil tang-kapan ikan —dengan syarat tidak menggunakan teknologi destruk-tif—di perairan, kemudian melalui medium keramba bibit ikan ter-sebut ditangkarkan dan dibesar-kan selanjutnya dilempar ke pasar lokal. Sektor perikanan ini menjadi pilihan kompromis antara masya-rakat yang mendiami kawasan dan sumber daya perairannya, karena sumber daya perairan kawasan telah membetuk relasi sosial yang mempengaruhi cara hidup dan cara pandang masyarakat Kepulauan Seribu. Ironisnya di sekitar kawasan terdapat aktivitas ekonomi 'kuat' seperti pertambangan minyak, pariwisata, transportasi laut, dan lain-lain aktivitas ini sama sekali tidak menyentuh masyarakat yang juga bergantung kepada sumber daya perairan. Suka atau tidak pertimbangan untuk memilih sektor usaha yang bertumpu pada sumber daya

perairan di sektor perikanan menjadi pilihan satu-satunya.

Program ini mulai berjalan dengan kondisi ekologi, ekonomi dan sosial Kepulauan Seribu yang tidak saling mendukung. Kerusak-an ekologi yang cukup parah telah menghambat jalannya pelaksana-an uji coba program peningkatan ekonomi nelayan ikan hias melalui medium keramba. Akibat kondisi ekologis ini secara finansial uji coba program ini sulit dikatakan berhasil, apalagi bila dikaitkan dengan tingkat kesiapan sosial masyarakat dalam kebiasaan dan cara hidupnya dengan sumber daya perairan. Rusaknya ekologi kawasan dan ketidaksiapan sosial yang berimplikasi pada kerugian ekonomi komunitas penerima program, juga telah mengakibatkan gagalnya pemanenan komoditas secara optimum. Namun demikian, program ini secara teknologi layak dijalankan dengan syarat ekologi, ekonomi dan sosial masyarakat dan wilayahnya, termasuk dalam pengadopsian total program ini untuk wilayah lainnya di Indonesia.

Pemanenan program uji yang tidak optimum ini ternyata tidak menyurutkan semangat kelompok masyarakat untuk meneruskan program, meski program ini merupakan tahapan uji coba dalam pengembangan

budi daya perikanan laut. Bahkan secara ekonomis -- bagi kepentingan individu dalam kelompok-- belum dapat diandalkan menjadi peng-hasilan utama keluarga nelayan, karena pengelolaan dalam skala uji coba dilakukan secara ber-kelompok dan tidak individualistik.

Program *income generating* dengan model kelompok ini sudah banyak dilakukan oleh LSM-LSM di Indonesia, bahkan telah diterapkan oleh pemerintah untuk komoditas lain termasuk pem-budidayaan ikan laut. Di Kepulauan Seribu sendiri masyarakat sudah tidak asing lagi dengan proyek-proyek demikian, bahkan masyarakat menilai program *income generating* yang telah dijalankan sebelumnya merupa-kan proyek penghabisan dana. Masyarakat Kep. Seribu telah terbiasa menghadapi program tersebut dan telah siap meng-hadapi kegagalan usaha.

Melalui program uji coba ini Gugus Analisis sekaligus telah memotret persoalan-persoalan gagalnya proses usaha yang di jalankan di Kep. Seribu, baik dari program bantuan presiden maupun dari program-program LSM yang bergerak untuk ekonomi kerakyatan. Persoalan justru datang dari pemilik program dan dari kesiapan masyarakat dalam menerima program bantuan, termasuk

kondisi ekologi yang tidak mendukung tercapainya tujuan program. Selain itu banyak pula terjadi pelaksanaan program bagi masyarakat terkesan ingin membodohi masyarakat Kep. Seribu, bahkan kerap pula menjadi ajang pemanfaatan tenaga gratis masyarakat untuk menggerakkan suatu kegiatan ekonomis.

Program uji coba budi daya ikan melalui keramba jaring apung yang dijalankan oleh komunitas dengan LSM pendampingnya, tidak semata untuk mengatasi kemiskinan atau peningkatan ekonomi belaka. Pemecahan konflik dalam pemanfaatan sumber daya perairan dengan komunitas menjadi prioritas uji coba program ini, tanpa mengesampingkan persoalan sosial dengan kawasannya beserta upaya pengalihan pola pemanfaatan sumber daya. Kendati dalam program ini hanya berimplikasi langsung terhadap kelompok kecil nelayan, program uji ini justru akan mulai efektif diimplementasikan setelah masyarakat di Kep. Seribu secara sosial siap dengan perubahan cara dan pandangan hidup yang baru.

Krisis Moneter Masyarakat Kepulauan

Komoditas yang sedang dikembangkan ini merupakan komoditas ekspor yang potensial

untuk menjadi katup pengaman ekonomi rakyat. Dengan syarat-syarat ekologi, ekonomi, dan sosial yang dimilikinya maka komoditas kerapu, baronang, dan kakap, menjadi salah satu alternatif pengembangan ekonomi rakyat yang ideal sekaligus menjadi basis percontohan usaha komoditas lain yang dulu dianggap tidak layak ekonomi. Pengembangan usaha ekonomi rakyat yang bertumpu pada sumber daya lokal dengan syarat ekologi, ekonomi dan sosial patut menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Apalagi bencana ekonomi Indonesia kini telah menumbangkan sektor ekonomi 'kuat' yang selama ini menjadi anak emas jargon pertumbuhan ekonomi tinggi. Termasuk juga telah melemahkan para pengguna teknologi destruktif dalam pemanfaatan sumber daya perairan, karena terkena imbas bahan baku baik minyak, bahan kimia dan sebagainya yang sudah tidak laik ekonomi.

Basis percontohan usaha pembibitan dan pembesaran sektor perikanan yang telah dilakukan ini dapat menjadi stimuli pengembangan ekonomi kerakyatan di Kepulauan Seribu. Setidaknya dengan mencermati kendala-kendala dan kelemahan yang dialami dalam masa uji coba, akan didapatkan perbaikan seperlunya pada tahap tindak

lanjut dalam implementasi program yang sesungguhnya setelah melalui tahap uji coba.

Dalam kondisi krisis moneter yang diikuti krisis ekonomi, diduga kuat masyarakat Kep. Seribu mengalami tekanan ekonomi yang parah. Apalagi untuk nelayan ikan hias yang selama ini mengandalkan potasium sianida sebagai bahan baku penangkapan ikan. Sekarang ini mereka memiliki kendala dalam memasok sianida akibat melambungnya harga bahan kimia di pasar. Selain itu komoditas ikan hias ini juga dicurigai mengalami kesulitan dalam ekspor pemasaran ke Hongkong, Singapura atau Jepang. Daya beli masyarakat yang melemah dan berkurangnya kepercayaan pasar terhadap produk dari Indonesia menjadi proteksi alamiah bagi lingkungan hidup.

Hilangnya penghasilan nelayan dari subsektor ikan hias membuka peluang munculnya program-program alternatif yang mendorong nelayan ikan hias untuk keluar lebih cepat dari usaha ini. Tanpa perlu melakukan penyadaran tentang pelestarian lingkungan dan dampaknya, nelayan ikan hias dengan sukarela dan lebih mudah diajak untuk melakukan usaha pengelolaan sumber daya

perairan yang berbasiskan kerakyatan. Penyadaran terhadap lingkungan bukan lagi dengan model basis percontohan, namun sudah mulai dengan pendekatan pertahanan sumber daya perairan dengan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Basis percontohan dengan uji-coba keramba dapat menjadi acuan yang baik, karena dengan tumpuan pada sumber daya lokal yang ada dapat menghasilkan komoditas yang diperlukan pasar lokal maupun regional kawasan. Kemudian dikembangkan lagi dengan model usaha agroindustri, mulai dari pengadaan bahan baku, pembesaran hingga pemasaran dari sumber daya lokal dan dilakukan secara berkelompok dapat menstimuli pertumbuhan ekonomi kawasan Kepulauan Seribu dalam masa krisis ekonomi Indonesia dewasa ini.

Sekali lagi, mungkin kita bisa belajar banyak dari sebuah miniatur Indonesia di kawasan Kepulauan Seribu, dari tragedi kerusakan sumber daya perairan berusaha bergeliat untuk menuju ekonomi berbasis kerakyatan.

RUANG METODOLOGI

**PANDUAN DALAM PENGEMBANGAN
INSTITUSI LOKAL MELALUI PENELITIAN
TINDAK/AKSI**

(Bagian Pertama)

1 Pendahuluan

Seringkali kegagalan kegiatan pembangunan disebabkan oleh "ketidaksiapan" suatu kelompok masyarakat untuk menerima suatu inovasi yang ingin diterapkan oleh pemerintah. Sayangnya, "ketidak-siapan" masyarakat tersebut acap-kali di artikan dalam beberapa sifat negatif masyarakat seperti: masih rendahnya taraf pendidikan (formal) masyarakat, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan, anti pembangunan, dsb. Padahal pada banyak kasus pelaksanaan kegiatan pembangunan me-nunjukkan bahwa justru inisiator pembangunan (*development initia-tors*) yang tidak memiliki kesiapan untuk

menyampaikan atau meyakinkan masyarakat akan tujuan pembangunan yang akan diterapkannya.

Walaupun dalam persepsi pemerintah berbagai intervensi pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup suatu kelompok masyarakat namun dalam kenyataannya banyak kegiatan pembangunan justru menimbulkan perbenturan ke-pentingan. Salah satu faktor yang sering menjadi penyebab gagalnya introduksi pembangunan adalah rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantau-an kegiatan pembangunan.

Dengan demikian, proses pem-bangunan perlu dilihat

sebagai suatu proses interaksi (kemitraan) antara inisiator pembangunan, yang biasanya adalah pemerintah dengan didukung oleh negara donor (misalnya Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dsb) dengan masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat (*beneficiaries*) dari suatu kegiatan pembangunan.

Apabila keberhasilan pembangunan diukur pada seberapa besar masyarakat dapat merasakan manfaat dari perubahan yang terjadi, maka peran serta masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada tingkat terendah, peran serta masyarakat dapat dilihat sebagai suatu proses pelimpahan wewenang dari "masyarakat" yang diwakili (*the presence of representatives of "the people"*) pada saat proses pembangunan akan atau sedang berlangsung.

Pada tingkat yang lebih dinamis, peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses "penggerakan masyarakat" untuk menentukan tujuan

pembangunan. Dalam hal ini masyarakat turut serut secara aktif didalam proses pembangunan dan menjadi mitra (*partnership*) dari pengambil kebijakan, perencana, dan pelaksana pembangunan. Agar keterlibatan masyarakat dapat secara aktif menjadi pelaku dalam pembangunan diperlukan ke-lompok-kelompok kepentingan yang berorientasi pada kegiatan nyata (*action oriented*). Kelompok-kelompok kepentingan ini di-harapkan dapat menjadi jembatan untuk secara bertahap menjadikan kegiatan pembangunan sebagai kegiatan yang terinternalisasi dalam kehidupan suatu masyarakat.

Salah satu pendekatan yang sangat berguna dalam proses pembangunan adalah dengan melakukan pendekatan pengembangan kelembagaan lokal masyarakat setempat sebagai media untuk melakukan pelibatan masyarakat. Namun sayangnya justru pendekatan ini yang masih sangat jarang diterapkan baik oleh pemerintah maupun negara donor dalam penerapan

berbagai aktifitas pembangunan. Bila ada usaha pengembangan kelembagaan pembangunan pada tingkat lokal namun biasanya masih mengabaikan keberadaan kelembagaan masyarakat yang sudah dimiliki oleh satu kelompok masyarakat. Pengembangan kelembagaan masyarakat yang sudah ada sangat bermanfaat dalam menyatukan berbagai ide, kepentingan dan sumberdaya agar dapat menjadi suatu aksi bersama masyarakat (*collective action*) untuk menginternalisasikan kegiatan pembangunan dalam struktur sosial dan budaya setempat (*local socio-cultural setting*).

Pendekatan Pengembangan Instansi Lokal/PIL (*Local Institutional Development/LID*) akan digunakan dalam panduan praktis pelibatan masyarakat melalui Penelitian Tindak (*Action Research*). Pendekatan ini, selain sudah banyak diterapkan dalam berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan (cf. Uphoff, 1982, 1990, 1992; Ostrom, 1987, 1989, 1990) juga dapat digunakan sebagai

panduan dalam penerapan metode penelitian tindak/aksi. Dengan demikian, proses interaksi antara berbagai kelompok yang mempunyai kepentingan dalam proses pembangunan (eg. pemerintah, negara donor, masyarakat) dapat diarahkan pada pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat dengan menggunakan sumber-daya yang ada pada masyarakat itu sendiri (*social resources*).

Pada bagian awal dari panduan ini akan dibahas secara umum permasalahan pelibatan masyarakat dalam penelitian tindak/aksi. Bagian ini akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Masyarakat dan Pelibatan Masyarakat Dalam Pembangunan, Beberapa Tipe Pelibatan Masyarakat Dalam Pembangunan, Pengembangan Instansi Lokal dan Penelitian Tindak. Bagian kedua membahas mengenai beberapa metode yang dapat digunakan dalam tahap-tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Selanjutnya bagian ketiga membahas secara khusus pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan

dengan melibatkan masyarakat kelompok sasaran. Pada bagian akhir akan diketengahkan beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pengembangan institusi lokal melalui penelitian tindak/aksi. Panduan ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran yang dapat dilakukan untuk penyempurnaan pelaksanaan pengembangan institusi lokal melalui penelitian tindak/aksi.

2. Pengembangan Institusi Lokal Melalui Penelitian Tindak

Institusi Lokal Dalam Konteks Pembangunan

Apakah yang dimaksud sebagai suatu institusi sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan panjang dikalangan ilmuwan sosial. Dalam bahasa Indonesia, institution diterjemahkan sebagai lembaga atau pranata. Secara umum, institusi dan organisasi sering dikonotasikan mempunyai arti yang sama. Sehingga kadang-kadang didalam

penggunaannya secara praktis. Paling tidak institusi dan organisasi sering digunakan dalam tiga konteks yang berbeda: (a) organisasi yang bukan merupakan suatu institusi; (b) institusi yang bukan merupakan suatu organisasi; dan, organisasi yang juga merupakan suatu institusi, atau sebaliknya.

Dalam konteks pendekatan pengembangan institusi lokal, organisasi harus dilihat sebagai suatu institusi pula. Artinya, suatu organisasi merupakan suatu kumpulan aturan yang terstruktur serta dapat diterima oleh para anggotanya. Bila suatu organisasi sudah dapat memenuhi keinginan para anggotanya maka organisasi tersebut telah menjadi suatu institusi (*institutionalized*). Dengan demikian suatu institusi adalah suatu kumpulan norma dan perilaku yang sudah ada sejak lama untuk memenuhi kepentingan kelompok secara kolektif. Institusi merupakan sekumpulan aturan (*rules*) untuk bertindak daripada hanya sekumpulan peran (*roles*).

Secara praktis, untuk mengetahui apakah suatu

organisasi telah dapat dikatakan sudah menjadi institusi adalah dengan menanyakan pada suatu kelompok masyarakat apabila suatu keberadaan suatu organisasi hilang, apakah masyarakat menginginkannya kembali? Bila masyarakat tidak merasakan adanya suatu "institusi" yang hilang sebagai akibat hilangnya suatu organisasi, maka secara sosial organisasi tersebut belum dapat dikatakan menjadi suatu institusi. Dengan hanya masyarakat yang dapat menjawab apakah suatu organisasi telah ter-institusi atau belum.

Untuk membentuk suatu organisasi pembangunan menjadi suatu institusi pembangunan pula dibutuhkan keterlibatan masyarakat untuk menginternalisasi organisasi pembangunan menjadi sesuatu yang internal dalam kehidupan masyarakat. Artinya, proses institusionalisasi suatu organisasi pembangunan dilakukan

melalui internalisasi organisasi pembangunan kedalam kelembagaan lokal suatu masyarakat.

Institusi Lokal

Apakah yang dimaksud dengan lokal? Pertanyaan ini sangat penting sebab seringkali pengertian "lokal" tergantung pada di mana "pusat" ditempatkan. Bila yang dimaksud dengan lokal adalah pembagian secara administrasi negara, maka lokal dapat berarti propinsi yang pusatnya adalah negara. Sedangkan bila yang dimaksudkan pusat adalah propinsi maka lokal adalah tingkat lebih rendah daripada propinsi. Bila dilihat dari proses pengambilan keputusan, maka tingkat lokal dapat dilihat dari paling tidak tiga level (lihat Figure 1), yaitu 6, 7, dan 8.

Figure 1: LEVELS OF DECISION MAKING AND ACTIVITY

1. International Level
2. National Level

3. Regional Level (State or Provincial) Level

4. District Level

5. Sub-District Level

6. LOCALITY LEVEL

(a set of communities having cooperative/commercial relations; this level may be the same as the sub-district level where the sub-district center is a market town)

7. COMMUNITY LEVEL

(a relatively self-contained, socio-economic residential unit)

8. GROUP LEVEL

(a self-identified set of persons having some common interest; may be a small residential group like a hamlet, or neighborhood, an occupational group, or some ethnic, caste, age, sex, or other grouping)

9. Household Level

10. Individual Level

Sumber: Uphoff, Norman. 1984. *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases.* (hal.11)

Lokal konteks dapat pula dilihat dari sudut individu. Figure 2 menggambarkan konteks individu dalam proses pengambilan keputusan. Melihat perspektif lokal dan individu sangat berguna untuk memahami dinamika institusi lokal yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat. Berbagai kasus kegiatan pembangunan dengan masyarakat menunjukkan bahwa institusi lokal ternyata tidak sesederhana yang banyak ditemui dalam penelitian-penelitian ilmiah. Sebagai contoh, walaupun keterkaitan institusi lokal dengan individu biasanya adalah dalam hubungan kekerabatan, namun dalam hubungan sosial yang lebih luas ternyata banyak sekali hubungan yang bersifat non-

kekerabatan. Dalam kegiatan sosial dapat ditemui misalnya hubungan individu dengan kelompok koperasi, kelompok tani, kelompok bermain, dsb. (*reference groups*).

Menentukan apakah suatu institusi sosial itu lokal atau tidak sering-kali membingungkan. Untuk kepentingan praktis tidak diperlu-kan suatu batas yang kaku. Hal terpenting adalah memahami dinamika masyarakat mengenai kebersamaan kepentingan yang dapat digunakan untuk peng-galangan aksi bersama (*collective action*). Biasanya proses keber-samaan dalam pengambilan keputusan dan mobilisasi sumber-daya berbeda dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki identitas yang kuat dibandingkan dengan suatu kelompok besar dengan identitas yang kabur.

Sedikitnya empat dinamika organisasi perlu di identifikasi untuk memahami institusi lokal dalam suatu kelompok masya-rakat: proses pengambilan keputusan, pengelolaan dan mobilisasi sumberdaya, komunikasi, dan pengelolaan konflik (Uphoff, Meinzen-Dick dan St.Julien,

1985). Dengan memahami keempat proses pada setiap institusi lokal (keluarga, pasar, pendidikan, dsb.) dapat dipahami pula kapasitas institusi lokal untuk menerima perubahan dari luar serta mengkaitkannya dengan institusi yang lebih kompleks.

Institusi Lokal dan Pelibatan Masyarakat Dalam Pembangunan

Dalam berbagai kasus pelaksana-an kegiatan pembangunan, masyarakat acapkali adalah kelompok yang paling lemah posisinya dibanding dengan kelompok lainnya seperti misalnya pemerintah, kontraktor, negara donor dan sebagainya. Padahal acapkali pembangunan yang akan dilakukan mengatasmama-kan kepentingan masyarakat. Misalnya, pembangunan ben-dungan untuk peningkatan produksi pertanian para petani, pembangunan jalan bebas hambatan untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat, dsb. yang dalam kenyataannya seringkali tidak mencapai sasaran dari pembangunan yang diharapkan tersebut. Oleh

karena itu diperlu-kan suatu mekanisme yang khusus didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sehingga kepen-tingan masyarakat dapat terpenuhi dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Kesepakatan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pem-bangunan sudah banyak didengungkan (lihat Box). Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara yang tepat dalam pelibatan tersebut agar masyarakat dapat menjadi pelaku dalam pem-bangunan. Berbagai alternatif pendekatan telah diterapkan dalam berbagai usaha pelaksanaan kegiatan pembangunan. Namun hingga saat ini masih banyak hal yang menghambat terbentuknya suatu proses interaksi yang mengarah pada keterlibatan masyarakat secara sukarela.

The Peasants Chartered

(an excerpt)

" Participation of the people in the institutions and system which governs their lives is a basic human right and also essential for realignment of political power in favour of

disadvantaged groups and for social and economic development. Rural development strategies can realize their full potential only through the motivation, active involvement and organization at the grassroots level of rural people with special emphasis on the least advantaged strata, in conceptuallizing and designing policies and program-mes and in creating administrative, social and economic institutions, including cooperative and other voluntary forms of organization for implementing and evaluating them." (WCARRD Report, 1979)

Dalam kepustakaan mengenai aksi kolektif (*collective action*) paling tidak dikenal tiga model yang sering menjadi acuan. Berikut adalah rangkuman dari ketiga model tersebut.

The Tragedy of the commons. Garrett Hardin (1968) menyatakan bahwa bila semua orang mempunyai kesempatan yang sama (*open to all*) untuk menggunakan sumberdaya yang terbatas maka akan terjadi apa yang dia namakan sebagai "tragedi bersama" (*the Tragedy of the Commons*). Sebagai contoh

Hardin mengatakan bahwa apabila masing-masing rasional dari peternak hewan adalah masing-masing peternak dapat menggunakan sumberdaya yang ada semaksimal mungkin maka pada satu titik tertentu para peternak akan mengalami masalah degradasi lingkungan secara bersama. Artinya, kesulitan para peternak karena mereka beranggapan bahwa sumberdaya adalah milik bersama. Oleh karenanya mereka mempunyai hak yang sama untuk menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan untuk menghidupi hewan ternaknya. Selanjutnya untuk mengatasi masalah kelangkaan sumberdaya dalam memelihara ternak, masing-masing peternak akan menambah jumlah ternaknya. Disinilah tragedi akan mulai terjadi dimana pengguna sumber-daya alam akan menomor satu-kan kepentingannya karena anggapan bahwa sumberdaya alam adalah milik bersama (*believes in the freedom of the commons*).

Perumpamaan peternak dan sumberdaya digunakan oleh Hardin untuk menjelaskan

misal-nya permasalahan berlebihnya jumlah penduduk dan keter-batasan sumberdaya alam. Berbagai kasus menggambarkan apa yang disebut sebagai *the tragedy of the commons*, seperti misalnya kelaparan di Sahelian pada tahun 1970an (Picardi dan Seifer, 1977), krisis kayu bakar di dunia ketiga (Norman, 1984; Thomson, 1977), hujan asam (Wilson, 1985) dan hubungan pemerintah dan swasta dalam perekonomian moderen (Scharpf, 1985, 1987, 1988). Namun pada intinya adalah bahwa sebagian besar kehidupan manusia tergantung pada sumberdaya yang terbatas dan cenderung akan menimbulkan apa yang dinamakan sebagai "tragedi bersama."

Analisis mengenai "tragedi bersama" sangat berguna di dalam memahami aksi bersama (*collective actions*) kelompok masyarakat di dalam penggunaan sumberdaya (*public goods*). Asumsi yang dapat ditarik dari pendekatan ini adalah bahwa bila suatu pranata kelompok masyarakat semakin sulit untuk mengatur anggota-anggotanya yang

mem-peroleh keuntungan dari sumber-daya yang dimanfaatkan secara bersama agar memberikan pem-bagian secara adil maka akan semakin sulit untuk dapat mem-pertahankan keberadaan pranata kelompok masyarakat tersebut untuk jangka waktu yang lama.

The prisoner's dilemma game (PDI). Kelanjutan dari pemikiran mengenai "tragedi bersama," adalah anggapan bahwa masing-masing individu menggunakan cara-cara tersendiri dalam memanfaatkan sumberdaya. Ke-seluruhan cara tersebut adalah rasional untuk masing-masing individu. Keseimbangan dalam kelompok dapat terjadi justru karena masing-masing menggunakan cara-cara yang rasional menurut ukurannya sendiri (*parreto-inferior*). Pendekatan ini menjadi menarik karena melihat paradoks bahwa strategi individu yang rasional menghasilkan hasil kolektif yang irasional.

The logic of collective action. Pendekatan ini pertama kali dilontarkan oleh Mancur Olson (1965) yang beranggapan bahwa

individu-individu yang memiliki kesamaan kepentingan akan secara sukarela melakukan kegi-atan bersama untuk kepentingan bersama pula. Pendekatan ini menekankan bahwa aksi kolektif tidak hanya tergantung pada berapa besar keuntungan (*benefit*) yang dapat diperoleh anggota suatu kelompok masyarakat, namun ditentukan pula oleh kebersamaan kepentingan, ide dan rasional dari suatu kelompok.

The tragedy of commons, the prisoner's dilemma, dan the logic of collective action memiliki saling keterkaitan didalam menjelaskan mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh individu-individu untuk menghasilkan suatu ke-untungan kolektif dalam kelompok masyarakat. Salah satu masalah yang sering ditemui dalam pembahasan ketiga pendekatan tersebut adalah peran para individu yang menikmati ke-untungan tanpa melakukan usaha yang sama seperti individu-individu lain dalam kelompoknya (*free riders*).

Analisis mengenai "penumpang gratis" (*free*

riders) menjadi sangat penting dalam pembahasan mengenai Pengembangan Institusi Lokal melalui Penelitian Tindak/ Aksi. Asumsi paling buruk adalah apabila dalam suatu pranata keseluruhan anggotanya memilih menjadi *free riders* maka tidak akan diperoleh keuntungan kelompok secara kolektif. Dalam berbagai kasus penerapan aksi kolektif dalam kegiatan pembangunan banyak ditemui individu-individu yang memanfaatkan institusi lokal tanpa turut serta berusaha menciptakan kepentingan dan kebutuhan bersama.

Dalam konteks pendekatan pengembangan institusi lokal, paling tidak ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menanggulangi masalah yang berkaitan dengan *free riders*. Ketiga pendekatan tersebut dapat dilihat dari: apakah aksi kolektif diperlukan untuk menciptakan kebutuhan bersama (*common goods*) dan apakah suatu kelompok dapat menghindari anggota-anggota yang tidak membantu terciptanya kebutuhan bersama tersebut.

- (a) Apabila pendekatan aksi ber-sama digunakan maka besar kemungkinan ada individu-individu yang memperoleh keuntungan namun tidak turut serta dalam kegiatan yang dilakukan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa penerapan peraturan pada kelompok sangat efektif didalam mencegah munculnya *free riders*.
- (b) Apabila individu-individu di dalam suatu kelompok perlu melakukan kontribusi berupa komoditas, uang atau tenaga, maka individu-individu yang tidak turut aktif dapat dibatasi aksesnya melalui pendekatan kelembagaan.
- (c) Permasalahan *free riders* akan menjadi sulit dipecahkan apabila kegiatan pembangunan menyangkut penyediaan sarana publik secara aksi kolektif. Dalam kondisi seperti ini membatasi penggunaan sarana publik untuk individu-individu yang aktif dalam kelompok akan sangat sulit dilakukan. Dalam hal ini peran pemerintah lokal

perlu ditingkatkan agar tidak terjadi perpecahan didalam usaha pengembangan institusi lokal melalui penelitian tindak/aksi.

Setelah terbentuknya kesepakatan dalam membentuk aksi kolektif dalam suatu kelompok, maka selanjutnya diperlukan penjabaran secara jelas penggunaan institusi lokal dalam proses pembangunan. Satu hal perlu dicatat adalah untuk kepentingan pembangunan tidak dapat di kembangkan mengikuti suatu *blue print* namun diperlukan pendekatan induktif, sinergik, experimental dan lentur.

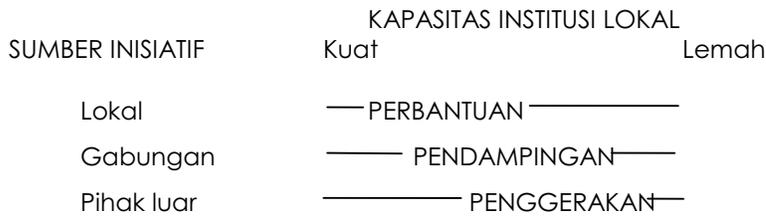
Dengan kata lain, proses pembentukan atau pemanfaatan institusi lokal dalam pem-bangunan dilihat sebagai suatu proses belajar (*learning process*) untuk menciptakan kemampuan masyarakat lokal didalam memo-bilisasi dan mengelola sumber-daya yang dimilikinya. Tiga alternatif pendekatan dapat dilakukan dalam pengembangan institusi lokal: perbantuan (*assis-tance*), pendampingan

(*facilitation*) dan penggerakan (*promotion*).

Perbantuan dilakukan apabila di suatu kelompok masyarakat telah terbentuk berbagai institusi lokal seperti misalnya kelompok tani, kelompok seni, kelompok peng-airan, dsb. Pendampingan dilakukan apabila pada suatu kelompok masyarakat sudah terbentuk institusi lokal namun kemampuan serta kapasitasnya untuk menggerakkan berbagai kepentingan serta kebutuhan kelompok masih belum dapat di manfaatkan untuk kepentingan kegiatan pembangunan.

Sedangkan penggerakan dilaku-kan apabila institusi-institusi lokal belum berkembang dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan kegiatan pembangunan. Dalam hal seperti ini, perlu di bentuk kelompok-kelompok insti-tusi lokal yang dapat menjadi penggerak diterimanya berbagai inovasi dalam suatu masyarakat. Secara umum Figure 2 meng-gambarkan keterlibatan inisiatif pengembangan institusi lokal untuk kegiatan pembangunan.

Figure 2: BENTUK-BENTUK DUKUNGAN DALAM PENGEMBANGAN INSTITUSI LOKAL



Sumber: Uphoff, Norman. 1984. *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases.* (hal.189).

Bentuk-bentuk mana yang dibutuhkan dalam pengembangan institusi lokal tergantung pada permasalahan yang dihadapi di lapangan. Ada kemungkinan pula dipadukan pendekatan antara ketiga bentuk pengembangan institusi lokal. Hal ini biasanya terjadi apabila sifat dari kegiatan pembangunannya sangat kompleks, seperti misalnya Pemberantasan Hama Terpadu dimana diperlukan beberapa jenis institusi lokal dengan sifat dan fungsi yang berbeda-beda.

Satu hal yang sangat penting untuk digarisbawahi adalah bahwa pengembangan institusi lokal tidak dapat

mengikuti suatu *blue print* yang kaku. Mengikuti suatu *blue print* artinya seluruh permasalahan dalam proses pembangunan sudah dapat diidentifikasi secara rinci. Anggapan bahwa perencanaan menggunakan pendapat para ahli sehingga pelaksanaan dari perencanaan tersebut tinggal mengikuti apa tertulis dalam *blue print* tersebut tidak menjamin berhasilnya suatu aktifitas pembangunan. Pendekatan ini tidak akan dapat dilakukan bila menggunakan pendekatan pengembangan institusi lokal dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

Dalam berbagai kasus pelaksanaan kegiatan pembangunan menunjukkan bahwa situasi yang terjadi di dalam interaksi antara apa yang "dipikirkan" dalam proses perencanaan sangat berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Situasi sosial sangat dinamis dan berubah dari waktu ke waktu, amat sulit untuk diduga dari sejak awal serta selalu berubah-ubah (*uncertainty*). Oleh karena itu kemampuan pelaksana pembangunan sangat penting. Anggapan bahwa perencanaan (*the thinkers*) lebih penting daripada pelaksanaan (*the doers*) pembangunan adalah tidak tepat.

Dengan demikian pendekatan pengembangan institusi lokal sebagai suatu proses belajar (*learning process*) perlu ditanamkan pada kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pembangunan. Perencanaan yang diperlukan adalah tahapan menuju pada pengembangan kemampuan institusi lokal melakukan penelitian tindak secara mandiri. Bagian berikut akan membahas

pendekatan penelitian tindak secara lebih rinci.

3. Penelitian Tindak dan Pelibatan Masyarakat Dalam Pembangunan

Pendekatan pengembangan institusi lokal difokuskan pada dua pokok permasalahan: identifikasi kapasitas institusi lokal untuk kegiatan pembangunan dan mengembangkan proses tindak-belajar (*action-learning proses*) agar kemampuan institusi lokal dapat melakukan penelitian tindak dilingkungan masyarakatnya sendiri (*self-sufficient local action research on people own backyard*). Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penelitian sebaiknya menggunakan sumberdaya yang dimilikinya serta menggunakan seluruh perangkat yang sesuai dan ada dalam kehidupan sehari-hari untuk menginternalisasikan kegiatan pembangunan dalam proses sosial yang sudah terbentuk.

Secara praktis penggunaan penelitian tindak dan proses tindak-belajar saling melengkapi. Proses tindak-belajar merupakan kelanjutan dari proses penelitian tindak/aksi. Namun dalam pelaksanaan secara praktis, baik penelitian tindak/aksi dan proses tindak/aksi-belajar, berusaha mengkaitkan peranan "pihak luar" (*outsider*) seperti konsultan, peneliti, ilmuwan, fasilitator, dsb. dengan "pihak dalam" (*insider*) seperti partisipan, stakeholder, praktisi, dsb.

Perbedaan antara kedua pendekatan tersebut adalah dalam keluaran yang dapat diharapkan. Dalam penelitian tindak keluaran yang diharapkan dari "pihak luar" dan "pihak dalam" masih sangat mudah dibedakan, sedangkan dalam proses

tindak/aksi-belajar, antara obyektif "pihak luar" dan "pihak dalam" menjadi saling melengkapi (mutual). Dalam konteks inilah proses tindak/aksi-belajar akan sangat berperan untuk mengubah organisasi pembangunan menjadi suatu institusi dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat. Dalam Figur 3 dapat dilihat perbedaan antara penelitian tindak dengan proses tindak/aksi-belajar.

Dalam prakteknya pelaksanaan penelitian tindak/aksi dan proses tindak/aksi-belajar tidak dapat dipisahkan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, hubungan antara "pihak luar" dan "pihak dalam" dalam pendekatan penelitian tindak dan proses tindak/aksi-belajar sangat penting.

Figur 3.: PERBEDAAN ANTARA PENELITIAN TINDAK DAN PROSES TINDAK-BELAJAR

ACTION RESEARCH	ACTION-LEARNING PROCESS
<ul style="list-style-type: none"> - focus on the internal environments of single organizations - involve actors in roles defined by the organization of which they are members - be goal-oriented, involving 	<ul style="list-style-type: none"> - focus on the common transactional and contextual environments associated with the set of organizations drawn together around domain issues - involve a range of

<p>step-like processes towards achieving agreed objectives</p> <ul style="list-style-type: none"> - involve the outside intervenor as a process expert, analyst, consultant, or trainer - be closely linked with social science field practice and to emphasize the outsider's and diagnostic process expertise - be narrowly defined, situational, and limited by the immediate context 	<p>stakeholders representing the organizations, groups, and communities that make up the set of domain interests</p> <ul style="list-style-type: none"> - involve the establishing of continuing, adaptive learning processes that are self-organized by the participants - involve the outside intervenor as a learning catalyst, facilitator, learner, and change agent - blur insider/outsider roles and to emphasize the outcomes of local learning and the sustaining of the change process - originate in a specific local settings, but encourage the formation of networks among similar settings as a conscious elements of the wider field of action
---	--

Sumber: Wright, Susan and Morley, David. 1989. Learning Works: Searching for Organizationa Futures. hal. 181

RESENSI BUKU

**DAMPAK INDUSTRIALISASI RUMAH TANGGA
DI PEDESAAN JAWA**

Budi Rajab

Judul : Industrialization and Natural Resources; Household Adaptive

Strategies in Java, Indonesia

Penulis : Ines Smyth

Penerbit : Bandung, Akatiga. 1997 (xvi + 176 halaman)

Tampaknya telah terjadi ironi dalam model pembangunan ekonomi di Indonesia. Sektor industri besar yang secara intensif dan ekstensif sebenarnya baru tampil dalam dinamika perekonomian nasional Indonesia seperempat abad lalu, ternyata telah mampu memberikan kontribusi pada *Gross Domestic Product* (GDP) sebesar 22,2%. Namun demikian, besarnya sumbangan atas GDP tersebut tidak diikuti oleh penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Sektor industri ini ternyata hanya mampu menyerap sekitar

10% dari seluruh tenaga kerja. Sementara itu, sektor pertanian sampai awal tahun 1900-an masih menyerap sekitar 50% dari seluruh jumlah tenaga kerja, tetapi kontribusinya atas GDP berada di bawah sumbangan sektor industri, yaitu hanya sebesar 19,6%.

Oleh karena itulah, bila kita membicarakan dinamika dan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sesungguhnya kita berbicara mengenai peran sektor industri. Faktor-faktor produksi

nasional yang utama seperti modal yang besar, tanah, teknologi canggih, tenaga kerja yang terdidik dan terlatih atau profesional, serta fasilitas-fasilitas lainnya seperti dukungan birokrasi sampai pada proteksi dan monopoli teralokasikan dan diperuntukkan perluasan dan perkembangan sektor industri. Sudah dapat dipastikan sektor ini bergerak lebih ekspansif, sementara sektor pertanian yang perangkat-perangkat pendorong perkembangannya sangat terbatas boleh dikatakan berjalan di tempat, bahkan tampaknya mengalami proses regresivitas. Dalam konteks ini proses industrialisasi yang selama ini berjalan bukannya turut mendorong perkembangan sektor pertanian dan sektor nonpertanian di wilayah pedesaan, malah menghambat dinamika ekonomi pedesaan itu sendiri. Dengan kata lain, secara sektoral implementasi pembangunan ekonomi di Indonesia tidak menunjukkan adanya hubungan yang bersifat mutualis-simbiotis tetapi sebuah *trade-off*, yaitu perkembangan sektor industri yang mengakibatkan terjadinya stagnasi bahkan kemunduran sektor ekonomi pedesaan.

Mata pencaharian sebagian besar penduduk pedesaan Indonesia bertumpu pada sektor pertanian, tetapi sektor ini dalam politik ekonomi pemerintah sering diabaikan karena dianggap kurang memiliki nilai tambah (*added value*) yang tinggi dan bersifat tradisional. Dalam kebijaksanaan pembangunan ekonomi nasional, fungsi sektor pertanian rakyat ini hanya sekedar alat untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok. Kecenderungan ini dapat dilihat dari program swasembada pangan misalnya, tidak diorientasikan untuk kepentingan bisnis yang lebih luas. Oleh karena itu, intervensi pemerintah baik dalam kapital, teknologi, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya untuk perkembangan sektor pertanian hanya sebatas pada orientasi politik ekonomi subsistensi. Dengan sendirinya kebijaksanaan seperti itu tidak mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan penduduk di pedesaan. Terbatasnya perkembangan sektor pertanian mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang bertumpu pada pencaharian nafkah di sektor itu menjadi terhambat pula.

Selain telah menghambat dinamika sektor pertanian, proses industrialisasi juga telah mengakibatkan kemerosotan, baik

secara kualitatif maupun kuantitatif, sumber-sumber daya alam milik bersama (*common resources*) penduduk pedesaan. Masuknya industri ke kawasan tertentu, kerap menyebabkan terjadinya alih fungsi sumber-sumber daya alam yang ada di sana demi kepentingan industri. Sumber-sumber daya alam yang biasanya terbuka dan bebas dimanfaatkan penduduk seperti sumber air, tempat penggembalaan ternak dan mencari kayu bakar berkurang luasnya atau menjadi tertutup karena digunakan untuk bangunan-bangunan pabrik, perkantoran, rumah-rumah sebagian karyawan, prasarana jalan, dan untuk sarana-sarana penunjang lainnya.

Melalui buku hasil penelitian Ines Smyth ini, kita diberi gambaran konkrit mengenai dampak keberadaan industri di sekitar daerah pedesaan. Ternyata keberadaan industri tidak merangsang perkembangan sektor ekonomi pertanian dan non-pertanian yang tradisional ke arah yang lebih dinamis, malah kegiatan sektor ekonomi pedesaan jadi menciut. Langsung atau tidak langsung, sektor industri juga telah mengurangi akses dan kontrol penduduk atas sumber-sumber daya alam seperti sumber air, rumput-rumputan untuk ternak, dan kayu bakar untuk memasak.. Padahal sumber-sumber daya ini memiliki peran yang strategis dalam membantu ketahanan dan keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Melalui buku ini kita dapat memperoleh pemahaman langsung, pada tingkat mikro pedesaan, mengenai bagaimana dampak proses industrialisasi terhadap sumber-sumber daya alam dan bagaimana rumah tangga di daerah pedesaan itu mengembangkan strategi tertentu sehubungan dengan terjadinya ketertutupan akses dan kontrol serta kemerosotan secara kuantitatif dan kualitatif pada sumber-sumber daya alam tersebut.

Penelitian ini dilakukan di empat desa, dua desa di Jawa Barat, yaitu Desa Cintamulya dan Desa Cisempur yang terletak di pinggiran bagian Timur Kota Bandung; serta dua desa di Jawa Tengah, yaitu Desa Jetis dan Combongan di bagian Timur Kota Surakarta. Keempat desa ini merupakan daerah-daerah yang dekat dan berada di kawasan industri. Secara Metodologis, dengan panjang lebar, buku ini menguraikan tentang tujuan dan pertanyaan penelitian, kenapa desa-desa bersangkutan

dipilih sebagai daerah penelitian (*research location*); kemudian teknik apa yang digunakan untuk menggali data dan informasi serta kerja sama kelembagaan dalam melakukan penelitian ini (halaman 1 - 24).

Secara garis besar buku ini telah dapat menangkap kenyataan bahwa sebagian anggota masyarakat desa secara ekonomi telah mengalami marginalisasi akibat proses industrialisasi. Polarisasi sosial-ekonomi menjadi semakin tajam. Di satu pihak ada beberapa penduduk desa yang diuntungkan, yaitu mereka yang dapat menangkap peluang dari keberadaan dan beroperasinya pabrik-pabrik. Di pihak lain sebagian besar di antaranya tidak mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik, malah terkena dampak yang merugikan.

Di samping itu, ada pula perubahan pada sikap dan perilaku terutama pada kaum muda pedesaan. Sekarang banyak pemuda desa yang enggan dan malu bertani atau mencari rumput untuk pakan ternak. Perubahan perilaku yang lebih memprihatikan lagi adalah adanya kecenderungan untuk berperilaku konsumtif seperti merokok dan meminum-minuman keras. Dengan demikian, proses industrialisasi ini tidak hanya berdampak pada perubahan struktur ekonomi pedesaan, tetapi juga secara budaya mendorong pada proses "pengkotaan" penduduk pedesaan.

Dalam kaitannya dampak industrialisasi atas sumber daya alam, proses industrialisasi tersebut telah menyebabkan berkurangnya persediaan air di kawasan itu. Apalagi bila musim kemarau datang, banyak sumber air yang. Tampaknya persoalan ini merupakan akibat langsung dari penyedotan air tanah dalam jumlah besar untuk keperluan pengoperasian pabrik. Di samping persediaan air berkurang, kualitas air yang ada pun. Penurunan kualitas air ini berkaitan dengan pembuangan limbah dari pabrik-pabrik tersebut.

Areal tempat pencaharian pakan ternak juga berkurang, terutama karena terjadinya peralihan peruntukan lahan. Sementara itu, pakan ternak yang banyak dijual dipasar harganya cukup mahal dan sulit untuk terjangkau oleh rumah

tangga lapisan bawah. Dalam konteks inilah, usaha ternak kecil-kecilan menjadi tidak produktif, padahal sebelumnya usaha ini menjadi penunjang keperluan konsumsi rumah tangga. Demikian pula dengan kayu bakar, persediaannya jauh berkurang karena tempat-tempat untuk mencari kayu bakar makin menyempit akibat proses konversi. Dengan sendirinya, terjadinya peralihan penggunaan energi untuk memasak, dari kayu bakar ke minyak tanah.

Bagaimana rumah tangga - rumah tangga di pedesaan menanggulangi persoalan kemerosotan dan hilangnya akses pada sumber-sumber daya itu? Tampaknya rumah tangga di desa belum dapat mengembangkan strategi-strategi baru dalam menanggulangi dampak proses industrialisasi. Mereka masih tetap bertumpu pada tradisi rumah tangga pedesaan Jawa dan hubungan ketetanggaan sebagai unit produksi dan reproduksi. Namun demikian, strategi ini tidak mengubah beban kerja wanita, bahkan sebaliknya beban kerja laki-laki menjadi berkurang. *Domain* pekerjaan laki-laki di sektor reproduksi atau domestik berkurang, sementara pekerjaan wanita hanya berganti jenis, pekerjaan di *domain* domestik dan publik tetap menjadi bagian dari perannya.

Melalui buku ini kita mendapat gambaran nyata mengenai kondisi masyarakat desa yang berhadapan langsung dengan keberadaan industri di sekitar wilayahnya. Hasilnya adalah menyempitnya peluang usaha dan kesempatan kerja di sektor ekonomi tradisional serta tertutupnya akses dan kontrol pada *common property*. Yang penting lagi adalah terjadinya proses modernisasi, berbagai kebutuhan rumah tangga yang tadinya bisa dipenuhi oleh sumber-sumber daya alam yang ada sekarang harus dibeli seperti minyak tanah, pakan ternak, dan mungkin juga suatu saat air. Padahal tingkat kesejahteraan mereka tidak meningkat secara signifikan. Apakah dengan terjadinya proses modernisasi seperti ini mengandung makna terjadinya fenomena pemiskinan pada sebagian besar penduduk pedesaan? Secara implisit data dan informasi yang ada dalam buku ini menunjuk ke arah itu.

Buku ini cukup detail dengan data dan informasi dalam mendeskripsikan dampak industrialisasi atas kehidupan sosial-ekonomi dan sumber daya alam pada tingkat makro, malah pada tingkat rumah tangga. Namun demikian, penjelasan-penjelasan mengenai kebijaksanaan ekonomi nasional mengenai proses industrialisasi, kaitannya dengan sektor pertanian, serta dengan *common property*, secara teoritis dan pada tingkat makro, relatif kurang dibahas. Di samping itu, buku ini hanya sampai pada upaya menggambarkan dampak industrialisasi, tidak lebih jauh dari itu, tidak ada rekomendasi yang memberikan arahan mengenai bagaimana cara-cara menanggulangi persoalan-persoalan yang timbul dari proses industrialisasi itu.

BERITA PERPUSTAKAAN

KLIPING DAN PANGKALAN DATA INFORMASI DALAM AKTIVITAS PENELITIAN AKATIGA

Berlimpahnya jenis dan media informasi menyertai tumbuhnya kebutuhan akan sumber informasi yang dapat menyajikan informasi mutakhir, aktual, dan tepercaya. Peter Zorkoczy menguraikan:

"Kita semua tentu mengharapkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya. Dengan kata lain, informasi harus sesuai dengan kenyataan. Keandalan suatu informasi meningkat bila informasi tersebut dapat diverifikasi, yakni kebenarannya dapat dibuktikan secara independen. Informasi yang cukup *up to date* sesuai dengan maksud penggunaannya. Informasi harus lengkap dan tepat, sehingga pihak yang menerima dapat memilih rincian spesifik yang sesuai dengan kebutuhannya." (Zorkoczy, 1988 : 12)

Surat Kabar sebagai Media informasi

Sebuah studi yang dilakukan oleh Guha (1985/1986) dan Varin menunjukkan terjadinya dominasi oleh lima golongan media penyebar informasi, yakni berita umum (cetak dan radio), *news file reets*, program televisi, film/ rekaman musik, dan iklan.

Salah satu media cetak yang selalu dikonsumsi segala lapisan pengguna adalah surat kabar. Surat kabar terbiasa memberikan informasi yang rinci serta aktual. Format fisiknya menyebabkan media ini hanya digunakan sesaat setelah penggunaannya menganggap telah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. (Permono, 1997 : 15)

Surat kabar memang dirancang untuk mempunyai daya transfer yang cepat dan segera, sehingga tidak dapat menyajikan fakta, gagasan, dan imajinasi secara lebih komprehensif. Walaupun demikian, surat

kabar mempunyai ciri khas dapat mengungkapkan hal-hal yang sulit dipahami menjadi lebih mudah dimengerti oleh khalayak luas karena menggunakan bahasa ilmiah populer. Kelebihan lain dari surat kabar sebagai media informasi yang bersifat periodikal adalah:

- a) memuat informasi terbaru dalam bidang sains, teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya;
- b) membahas subjek baru atau sesuatu yang tidak jelas yang terdapat dalam buku;
- c) menyajikan *trend* atau opini dalam masyarakat.

Munculnya bermacam surat kabar dengan frekuensi penerbitan yang semakin tinggi, menyebabkan surat kabar memerlukan penanganan yang lebih lanjut untuk memaksimalkan pemanfaatannya. Salah satu upaya penanganan yang dilakukan oleh pengelola informasi adalah pembuatan kliping. Hal ini sejalan dengan pendapat Lasa:

“...Surat kabar yang menyampaikan berita aktual itu juga berfungsi sebagai penyampai ide, gagasan, dan pengalaman seseorang yang perlu

didokumentasikan kembali. Artikel, berita keilmuan, peristiwa dalam kiranya perlu dikumpulkan lagi dalam bentuk kliping dan apabila diperlukan dapat dibuat dalam bentuk film mikro.” (Lasa, 1994 : 11)

Kliping dalam Aktivitas Penelitian

Kliping merupakan salah satu bentuk usaha menyusun kembali beberapa tulisan yang pernah dimuat oleh media cetak, terutama surat kabar dan majalah dalam bidang tertentu, menjadi lebih sistematis. Tulisannya dapat berupa artikel, ulasan, tanggapan, maupun berita yang memuat segala sesuatu yang baru, yang sedang dan akan menarik perhatian masyarakat.

Kliping berfungsi untuk melestarikan kekayaan intelektual manusia, sekaligus untuk menyebarluaskan suatu gagasan atau ide seseorang kepada khalayak. Hal ini jarang kita sadari. Dengan begitu, pada akhirnya kliping akan sangat menunjang kegiatan intelektual.

Dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi inilah, aktivitas

penelitian memerlukan informasi aktual yang dimuat dalam terbitan berkala yang telah dikemas dengan sistematis atau telah dikliping. Informasi ini akan mendukung penyusunan laporan penelitian.

Pemilihan informasi yang akan dikliping memerlukan pertimbangan tertentu. Apabila dikaitkan dengan aktivitas penelitian, pertimbangan ini menjadi suatu keharusan. Pertama, pemilihan subjek yang terintegrasi sesuai dengan bidang kajian. Kedua, penetapan isu yang sedang dan akan menarik perhatian pemanfaat kliping. Ketiga, terlepas dari siapa penulisnya, kita dapat meyakini kebenaran informasi tersebut.

Jasa Kliping Bidang Informasi Yayasan AKATIGA

Kliping dari berbagai media cetak maupun elektronika yang telah dialihbentukkan menjadi tercetak merupakan salah satu kekayaan koleksi bidang informasi Yayasan AKATIGA. Perlu diperhatikan bahwa sesuai dengan perkembangan visi Yayasan AKATIGA yang lebih menitikberatkan aktivitas

penelitian pada tiga bidang kajian utama yaitu usaha kecil, per-buruhan, dan tanah, pengelolaan kliping pun lebih menekankan pada kajian-kajian tersebut dengan mempertimbangkan ting-ka-t kedalamannya.

Bahan pembuatan kliping ini berasal dari berbagai kelompok media, di antaranya adalah surat kabar. Mulai tahun 1998, AKATIGA hanya melanggan 4 surat harian dan 1 tabloid mingguan. Surat kabar tersebut adalah *Kompas*, *Bisnis Indonesia*, *Jakarta Post*, dan *Pikiran Rakyat*. Pemilihan surat kabar ini diharapkan dapat mewakili setiap karakteristik surat kabar yang beredar setiap harinya. *Kontan* sebagai tabloid mingguan eko-nomi dan bisnis juga dilanggan AKATIGA untuk melengkapi data penelitian AKATIGA. Beberapa surat kabar lain dapat dimanfaatkan apabila topik-topiknya berkaitan dengan bidang kajian AKATIGA.

Mengenai majalah, AKATIGA memanfaatkan berbagai majalah, baik majalah komersial maupun bukan. Sampai saat ini AKATIGA sering kali mendapatkan

majalah-majalah nonkomersial yang diterbitkan untuk kepentingan intern atau kalangan terbatas dari sesama LSM atau organisasi pemerintah. Majalah tersebut bisa berupa hadiah atau bahan tukar-menukar. AKATIGA juga berlangganan beberapa majalah ilmiah dan populer komersial dari dalam dan luar negeri. Contohnya majalah *BIES*, *Sojourn*, *FORUM*, *D&R*, *Warta Ekonomi*, *Jurnal Perempuan*.

Internet juga menjadi media alternatif yang cukup dominan sebagai sumber kliping. Pencarian informasi melalui fasilitas internet terutama dilakukan terhadap media-media yang tidak dilanggan secara teratur. Melalui berbagai *search engine* dan penjelajahan *web*, kita akan mendapatkan beragam informasi yang diperlukan.

Pengelolaan Kliping AKATIGA

Pengelolaan kliping di AKATIGA mempunyai keunikan tersendiri, karena seluruh staf --baik staf administrasi maupun peneliti-- dilibatkan di dalamnya. Hal ini terjadi dalam penyeleksian

subjek. Seluruh staf secara bergantian dalam periode tertentu menandai material yang ada. Panduan penandaan disediakan agar si penanda tidak terfokus pada bidangnya saja.

Sementara itu, kegiatan peng-guntingan dan penempelan di-lakukan oleh petugas kliping yang khusus. Petugas ini juga membubuhkan deskripsi fisik dari setiap artikel yang dikliping.

Penanganan selanjutnya adalah pemilahan kliping-kliping menurut subjek dan tanggalnya. Dalam penyusunan ini, AKATIGA meng-gabungkan dua buah sistem yang ada. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penelusuran. Kliping-kliping tersebut kemudian disimpan secara alfabetis dalam *ordner* sesuai dengan subjeknya.

Dua sistem tersebut menurut Lasa sebagai berikut.

1. *Ordner*, yakni sistem penyusunan artikel atau berita dalam satu susunan, *ordner*, map yang terdiri dari satu subjek atau bidang yang bahannya diambil dari bermacam-macam judul surat kabar

atau majalah. Sistem ini telah banyak dikenal dan dipraktikkan dengan titik berat pada pemilihan subjek atau bidang.

2. *Evise*, yaitu sistem penyusunan kliping yang diambil dari satu judul surat kabar yang terbit dalam jangka waktu tertentu secara kronologis. Subjeknya dapat bermacam-macam, karena sistem ini mementingkan urutan waktu atau masa. Dengan cara ini, seseorang akan mudah menemukan peristiwa penting yang terjadi pada waktu tertentu yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Pelayanan Jasa Kliping

Jasa kliping ini telah lama dijalankan oleh bidang informasi AKATIGA yang terintegrasi dalam pelayanan informasi bagi pengguna. Staf intern dapat memanfaatkan secara langsung kliping-kliping ini. Pengguna luar harus memfotokopinya dengan tarif yang telah ditentukan oleh bidang informasi AKATIGA. Kedalaman dari subjek kliping AKATIGA menjadikan jasa ini banyak dimanfaatkan oleh

pengguna ekstern. Dari aspek inilah, jasa yang diberikan oleh lembaga lain yang mengelola jasa kliping sejenis sering kali tidak memenuhi kebutuhan informasi pengguna, karena informasi yang diberikan bersifat makro.

AKATIGA pun memberikan pelayanan jasa kliping dengan sistem langganan untuk beberapa topik yang memang menjadi kajian AKATIGA. Biaya yang dikenakan untuk setiap judul kliping adalah Rp500,00 dengan tidak mempertimbangkan jumlah halaman setiap judul. Untuk pelanggan yang berada di luar kota dikenakan biaya kirim dan pengemasan.

Pelayanan kliping di AKATIGA tidak hanya disediakan dalam bentuk tercetak. Untuk beberapa isu, yaitu bidang kajian utama AKATIGA, kliping tersebut juga dialihbentukkan ke dalam pangkalan data kliping yang saat ini tengah dikerjakan. Pengerjaan pangkalan data kliping ini tidak hanya dimaksudkan untuk penggunaan intern para peneliti, tetapi juga untuk memenuhi salah satu misi dan tujuan AKATIGA

sebagai penyebar atau pendiseminasi informasi.

Informasi yang perlu disebarluaskan dikemas dalam bentuk-bentuk yang mudah diakses oleh kelompok sasaran AKATIGA, terutama komunitas lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, AKATIGA pun menginginkan hasil penelitian selama ini menjadi bahan kegiatan advokasi atau *policy reform*. Pendiseminasian informasi ini merupakan modal dasar yang strategis bagi AKATIGA dalam menjalankan peran sebagai katalisator dan fasilitator pemberdayaan rakyat.

Untuk mendukung aktivitas penelitian dan pendiseminasian informasi direncanakan pengembangan pangkalan data. Pangkalan data ini berawal dari kebutuhan para pengguna yang menginginkan informasi yang tepat dan siap pakai dengan fasilitas penelusuran yang andal. Kemudahan akses informasi melalui media digital tentunya diperlukan pengguna internal dalam menunjang aktivitas. Begitu pula dengan pengguna eksternal yang menjadi

sasaran jangka panjang.

Pangkalan Data dan Perencanaannya

Menurut Mindra Faizaliskandar dalam makalahnya yang berjudul "Pemanfaatan *Database* dalam Kegiatan Media Massa", *database* atau pangkalan data merupakan suatu kumpulan data dasar yang disusun dan diorganisasikan secara logis serta dibentuk sesuai dengan tujuan pemakaiannya. *Database* merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Karena itu, *database* senantiasa dikaitkan dengan tujuan pemanfaatannya; apa manfaatnya, siapa pemakaiannya, kapan digunakannya, dan bagaimana pemakaiannya.

Ciri umum dari suatu *database* adalah dapat dimanfaatkan berulang-ulang, dapat digunakan dengan mudah dan relatif cepat, berguna untuk suatu tujuan tertentu, digunakan oleh pemakai tertentu, dapat di-up date kapan saja diperlukan, dapat diakses oleh banyak pemakai, dan memiliki akumulasi data yang relatif besar/banyak/lengkap.

Pengembangan pangkalan data memerlukan perencanaan dengan konsep yang matang dari berbagai alternatif sistem yang ada. Tenopir dan Klunden menguraikan tahapan perencanaan pangkalan data sebagai berikut.

1. *Feasibility study*

Tahapan ini mencakup identifikasi kebutuhan pengguna yang potensial, individu pendukung yang akan memonitor pangkalan data, seleksi *hardware*, prediksi kendala sumber daya manusia dan biaya.

2. *Preliminary editorial decision*

Tahapan ini mencakup penentuan rincian pangkalan data termasuk cakupan isi, *field-field* yang dibuat berdasarkan *authority file*, penentuan abstrak, dan sebagainya.

3. *Deskripsi record*

Tahapan ini menentukan spesifikasi *field* yang tercakup dalam pangkalan data. Tahapan *data dictionary* ini termasuk panjang *field*, *repeatable*, dan sebagainya.

4. *Pemilihan software*

Tahapan ini dilakukan berdasarkan spesifikasi dan kondisi dari studi kelayakan.

Langkah pertama dari studi kelayakan adalah penentuan definisi cakupan program pembangunan pangkalan data dan penganalisisan informasi-informasi yang dibutuhkan pengguna pangkalan data potensial. Studi ini harus bertitik tolak dari kondisi saat ini dan sistem yang diharapkan dari pangkalan data.

Selain itu, perlu dibentuk suatu kelompok kerja sebagai *database designer*. Paling sedikit kelompok kerja tersebut melibatkan:

- a) *end user* (pengguna pangkalan data, dalam hal ini para peneliti),
- b) *intermediary user* (pustakawan/ ahli informasi),
- c) *clerical inputer (data entry operator)*,
- d) pimpinan lembaga.

Pembentukan kelompok kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan input akan berbagai minat, kehendak, atau keinginan pengguna sistem, sehingga pangkalan data yang dirancang akan mencerminkan kebutuhan kelompok pengguna yang

potensial dan menjadi target suatu pusat informasi. Kelompok kerja ini mempunyai penekanan tugas pada hal-hal berikut.

1. Penentuan kebutuhan dan harapan-harapan pengguna pangkalan data.
2. Penentuan kebutuhan dan harapan-harapan staf yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan koleksi dan pangkalan data.
3. Karakteristik informasi yang harus dicakup dalam pangkal-an data.

Peran Pangkalan Data dalam Aktivitas Penelitian AKATIGA

Pangkalan data sangat diperlukan dalam aktivitas penelitian karena proses penelitian memerlukan informasi yang tepat dan siap pakai dalam waktu yang cepat. Informasi seperti ini dapat disediakan oleh pangkalan data dengan dukungan infrastruktur jaringan yang semakin canggih dan kemampuan sumber daya manusia yang memadai.

Karena itu, peranan pangkalan data dalam aktivitas penelitian AKATIGA dapat dirumuskan sebagai

berikut.

1. Menyediakan informasi yang siap pakai mengenai isu-isu yang diperlukan pengguna, terutama untuk tiga bidang kajian AKATIGA, yaitu usaha kecil, perburuhan, dan per-tanahan.
2. Melipatgandakan kapasitas ke-cepatan penyediaan dan pengolahan informasi secara optimal dengan teknologi komunikasi dan informasi yang tersedia.
3. Mengembangkan jaringan pusat informasi antarlembaga, terutama dengan lembaga-lembaga yang bergerak dalam kajian sejenis.
4. Menciptakan pola komunikasi baru.
5. Memperluas kesempatan akses informasi dan jangkauan aktivitas penelitian.

Pangkalan Data AKATIGA

Saat ini, AKATIGA tengah mem-bangun Pusat Informasi Tematik Usaha Kecil, Perburuhan, Per-tanahan, dan bidang kajian penunjang yaitu Kemiskinan, Demokratisasi, dan Gender. Masing-masing pusat informasi ini didukung oleh

informasi cetak dan non-cetak. Pangkalan data mawadahi seluruh informasi non-cetak yang diperlukan dalam proses penelitian.

Selain dari kliping (telah dijelaskan sebelumnya), informasi pangkalan data tersebut dapat bersumber dari kebijakan, UU, dan peraturan; data statistik; direktori; catatan lapangan; terbitan-terbitan lain seperti abstraksi dari koleksi buku; buletin dan *newsletter*; dan sebagainya. Di-harapkan, setiap sumber informasi ini dapat diwujudkan ke dalam bentuk pangkalan data, seperti Pangkalan Data Kliping, Pangkalan Data Kebijakan, Pangkalan Data Statistik, atau Pangkalan Data Direktori. Tentunya hal ini bukan pekerjaan mudah. Pangkalan data yang dimiliki AKATIGA sekarang pun terus diupayakan penyempurnaannya seiring dengan pembentukan pusat informasi yang lebih baik.

Sekarang ini AKATIGA mempunyai beberapa pangkalan data yang dapat ditelusuri dan dipergunakan terutama untuk kepentingan intern.

Pertama adalah Pangkalan Data Koleksi Perpustakaan dengan menggunakan *software* Micro CDS/ISIS versi 3,07. *Database* ini mencakup empat jenis kelompok koleksi, yaitu koleksi buku, artikel, makalah, dan audio visual. Pangkalan data ini dibuat dengan tujuan temu balik informasi referensi bibliografis serta informasi lainnya. Untuk mempermudah *database* ini disertakan juga abstrak dalam setiap *record*.

Kedua adalah Pangkalan Data Sistem Informasi Usaha Kecil yang mencakup data lembaga yang mempunyai perhatian terhadap bidang usaha kecil serta deskripsi fisik koleksi yang dimiliki oleh Pusat Informasi Usaha Kecil. Pangkalan data ini menggunakan *software* Fox Pro.

Ketiga adalah Pangkalan Data Kliping Dampak Krisis Ekonomi. Saat ini AKATIGA tengah memonitor dampak krisis ekonomi terhadap tiga bidang kajian AKATIGA. Tujuan monitoring ini adalah memberikan gambaran perkembangan setiap bidang pada titik waktu yang berbeda pada masa krisis; memberikan masukan hasil

evaluasi kebijakan dan program pemerintah bagi setiap bidang pada masa krisis; dan melakukan advokasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap setiap bidang, seperti pemerintah, lembaga donor, atau lembaga swadaya masyarakat.

Penyusunan pangkalan data ini bersumber dari kliping-kliping yang menjadi koleksi Perpustakaan AKATIGA. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kliping diambil dari beberapa surat kabar, majalah, dan penelusuran internet.

Untuk jangka pendek, pangkalan data ini dimanfaatkan untuk kepentingan intern, yaitu mempermudah akses

informasi dalam melakukan aktivitas monitoring dampak krisis. Keuntungan menggunakan Pangkalan data ini adalah penelusuran informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Keuntungan yang lain, dengan melakukan pemilahan informasi dan penggunaan *keyword* dalam pangkalan data, adalah jauh memperlebar pemanfaatan informasi. Hal ini disebabkan para peneliti sebagai pengguna utama pangkalan data ini turut terlibat dalam penyusunannya. Pelibatan ini penting dilakukan untuk mengetahui item-item mana yang ditekankan dalam suatu artikel. Di bawah ini akan diberikan salah satu contoh rekaman Pangkalan Data Kliping Dampak Krisis Ekonomi terhadap Buruh

Periodisasi : Februari 1998
Nama dan Tanggal Sumber: *Bisnis Indonesia*, 11 Februari 1998
Judul Berita : 250 Buruh Alexindo mengadu ke SPSI
Topik : Unjuk rasa
Nama Perusahaan : PT Alexindo
Lokasi : Kelurahan Kalibaru Bekasi Barat
Status Modal : -
Jenis Produk : Aluminium
Pasar Tujuan Produk : -
Jumlah Buruh dalam Aksi : 250 karyawan
Lama Aksi : 1 hari
Inisiator Aksi : -

Permasalahan pekerja memiliki (pesangon bekerja

: Terdapat informasi bahwa 250 yang tersisa (semula perusahaan 800 pekerja) akan di-PHK sebesar Rp80 ribu) dan upah yang dibayarkan hanya 50%; atau bila penuh, upah hanya dibayar 75%.

Isi Tuntutan : Meminta penjelasan resmi dari perusahaan tentang informasi yang beredar itu.

Penyelesaian Bekasi : Mengadu kepada DPC SPSI Kab. untuk turut menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dampak Aksi : -

Kelompok Sumber Unjuk : Kliping Krisis Ekonomi Buruh - Aksi Rasa/Mogok

Kesimpulan baru.

Kliping dan pangkalan data bagi aktivitas penelitian AKATIGA tentunya memegang peranan cukup penting karena nilai informasi kedua media informasi ini memang sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu mengandung nilai siap pakai, memuat informasi terbaru, menyajikan *trend*, melipatganda-kan kapasitas kecepatan dan daya olah informasi secara optimal, dan menciptakan pola komunikasi

Selain itu, pemanfaatan kliping dan pangkalan data ini terus dikembangkan karena akan memperluas akses informasi dan jangkauan aktivitas penelitian AKATIGA sendiri. Akan tetapi, khusus untuk mekanisme pengembangan pangkalan data secara total diperlukan lebih banyak lagi kajian tentang kaitan antar-subsistem yang mendukung sistem informasi tersebut.

Daftar Pustaka

Faizaliskandar, Mindra. 1995. *Pemanfaatan Database dalam Kegiatan Media Massa dalam Diskusi Panel Basis Data sebagai Kekuatan Media Massa*. Bandung: Panca Media Studio.

Tenopir, Carol & Gerald Lundeen. 1988. *Managing Your Information*. New York: Neil Schuman Pub.

Zorkoczy, Peter. 1988. *Teknologi Informasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lasa, H.S. 1994. *Pengelolaan Terbitan Berkala*. Yogyakarta: Kanisius.

Suwahyono, Nurasih. 1995. *Pengelolaan Informasi Suatu Pandangan Umum* dalam Majalah BACA, Volume XX, No. 1-2. Jakarta : PDII-LIPI.

SEPUTAR AKATIGA**BURUH**

Pada masa krisis ekonomi yang telah genap satu tahun ini melanda Indonesia, AKATIGA melakukan studi Monitoring Dampak Krisis Terhadap Perburuhan. Tujuan studi ini adalah untuk mendapatkan gambaran situasi perburuhan di Indonesia pada masa krisis, terutama yang berkaitan dengan kondisi kesejahteraan buruh. Badai PHK dan melambungnya harga-harga sem-bako pada masa krisis telah menurunkan tingkat kesejahteraan dan melemahkan gerakan buruh. Studi monitoring ini didukung juga dengan aktivitas pertemuan rutin satu kali setiap bulan yang diikuti oleh aktivis Buruh dan LSM perburuhan se-Jabotabek dan Bandung.

Pada tanggal 12-14 Juli, Akatiga bekerja sama dengan CASA dan CLARA menyelenggarakan sebuah Workshop Internasional di

Bandung tentang Monitoring Dampak Krisis Terhadap Perburuhan di Indonesia. Workshop ini diikuti oleh kalangan Ornop perburuhan nasional dan internasional, Perguruan Tinggi dan Pemerintah dalam hal ini Depnaker, serta perwakilan dari Belanda, Australia, Philipina dan Malaysia. Workshop ini merupakan suatu upaya mencapai pemahaman yang lebih baik bagi berbagai kalangan pemerhati/aktivis perburuhan mengenai dampak krisis di Asia Timur dan Asia Tenggara, baik itu dampak langsung maupun tak langsung terhadap kondisi sosial ekonomi pekerja di berbagai sektor. Dengan berkumpulnya berbagai kalangan ini diharapkan terbangunnya suatu aktivitas bersama di masa depan yang menggabungkan kegiatan-kegiatan penelitian, diseminasi informasi dan advokasi atau *policy based activities*.

Tujuan diselenggarakannya Work-shop ini adalah, pertama, adalah langkah awal kearah penelitian yang lebih mendalam terhadap berbagai dimensi krisis. Kedua, juga langkah awal ke arah pemikiran mengenai strategi untuk meningkatkan posisi tawar buruh.

Follow-up dari kegiatan ini diharapkan bisa dilakukan dengan aktivitas yang lebih jauh yang menuju kearah basis informasi yang lebih baik bagi kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang dan membangun strategi yang berasal dari grass root pada masa yang akan datang.

Disamping kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dampak krisis di atas, selama periode Januari hingga Juli 1998, Tim peneliti Perburuhan AKATIGA juga mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga lain, antara lain :

- Pada bulan Februari 1998, Indrasari Tjandraningsih, mengikuti acara Debat Terbuka yang dibawakan oleh Fahmi Idris di ANTEVE. Debat Terbuka tersebut bertema Pelaksanaan K3. Pada kesempatan tersebut, hadir debator yang lain

yaitu Dirjen Binawas DEPNAKER, Syaufii Syamsudin, Wilhelmus Bokha dari SPSI, dan seorang wakil APINDO.

- Pada tanggal 16 - 17 April, Indrasari dan Popon Anarita mengikuti Lokakarya Pendidikan Alternatif Bagi Anak Marjinal, yang diselenggarakan oleh JKLPK- Bindik PGI di Wisma Oikumene Sukabumi. Lokakarya ini diikuti oleh sebagian besar NGO di Jawa yang bergerak dalam pendampingan anak-anak marjinal. Lokakarya ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pendidikan alternatif yang dilakukan oleh setiap NGO peserta lokakarya, dan mencari bentuk modul pendidikan alternatif yang dapat dilakukan terhadap anak-anak marjinal.
- Seorang peneliti, Rina Herawati, menjadi pembicara tentang Kajian Sistem Pengupahan, dalam seminar Reformasi Perburuhan yang diselenggarakan oleh SBSI di Wisma PKBI Jakarta pada tanggal 13-14 Mei.
- Pada tanggal 1-2 Juli 1998 yang lalu, Popon Anarita

mengikuti Semiloka Prostitusi Anak dan Industri Pariwisata, yang diselenggarakan di Yogyakarta oleh Pusat Penelitian Pariwisata UGM bekerja sama dengan IPECC-ILO. Semiloka ini diikuti oleh kalangan NGO, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Pemerintah terkait seperti Departemen Pariwisata, DEPSOS dan Depnaker.

USAHA KECIL

Pada tanggal 23-24 Juni, Akatiga bersama The Asia Foundation menyelenggarakan Workshop Monitoring Dampak Krisis Terhadap Usaha Kecil di Bandung. Workshop ini membahas hasil Studi Monitoring Dampak Krisis Terhadap Usaha Kecil tahap pertama yang dilakukan Tim Peneliti Usaha Kecil AKATIGA. Workshop yang diikuti berbagai kalangan pemerhati usaha kecil ini, diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan frame work monitoring dampak krisis terhadap usaha kecil secara lebih mendalam baik itu mengenai situasi dan kondisi usaha kecil, pada aspek

kebijakan dan meto-dologi yang dipergunakan dalam monitoring.

AKATIGA bersama dengan PUPUK, Swiss Contact dan The Asia Foundation menyelenggara-kan Forum Daerah Usaha Kecil. Forum Daerah atau Forda ini merupakan rangkaian kegiatan diskusi dan pembentukan institusi bagi pengusaha kecil dalam rangka penguatan usaha kecil yang diselenggarakan di 12 propinsi di Indonesia. Pembentuk-an Forda ini merupakan persiapan untuk menghadapi Forum Nasional Usaha Kecil yang akan diselenggarakan pada akhir tahun 1998.

Dua orang peneliti Usaha Kecil AKATIGA, Hetifah Sjaifudian dan Erna E. Chotim, pada tanggal 14 April 1998 mengikuti Workshop Deregulasi Rotan yang diselenggarakan oleh Departemen Kehutanan.

TANAH

Pada masa krisis ini Tim Peneliti Pertanahan juga melakukan pene-litian Studi Monitoring

Dampak Krisis di Pedesaan terutama yang berkaitan dengan masalah per-tanahan. Studi dilakukan di beberapa desa di Jawa Barat. Berkaitan dengan studi tersebut, Tim Tanah Akatiga juga melakukan beberapa kali diskusi dengan LASA (Land Administration System Australia), LAPC (Land Admonistration Project P C), BPN (Badan Pertanahan Nasional, dan beberapa LSM. Topik diskusi sekitar Proyek Administrasi Per-tanahan.

Pada tanggal 30 -31 Juli, Akatiga menyelenggarakan Semi-Loka Kebijakan Pertanahan dalam Konteks Reformasi di Puncak Pass. Semi-Loka ini diikuti oleh berbagai kalangan pemerhati masalah-masalah pertanahan di Indonesia, baik itu pemerintah maupun NGO. Tujuan diselenggarakannya semi-loka ini antara lain:

- Melakukan refleksi terhadap kebijakan pertanahan selama ini dan fakta-fakta atau dampak yang telah ditimbulkannya, apa yang perlu diteruskan bahkan dikembangkan dan kebijakan manapula yang harus ditiada-kan, sehingga upaya-upaya yang akan dilakukan sedikit

banyak akan membantu meng-atasi krisis ekonomi yang sedang berlangsung.

- Melakukan pengkajian tentang bagaimana relevansi konsep reformasi di bidang pertanahan dalam konteks saat ini. Reformasi seperti apakah yang dapat kita tempuh saat ini.
- Mencari jalan keluar pemecah-an masalah di saat krisis ekonomi baik melalui kebijakan pertanahan jangka pendek maupun jangka panjang, serta mencari alternatif bentuk-bentuk penguatan hak-hak rakyat atas tanah.

Selain itu, pada periode Januari hingga Juli 1998, Tim Studi Pertanahan Akatiga juga meng-ikuti beberapa seminar/lokakarya yang diselenggarakan oleh lembaga lain, diantaranya : Pada tanggal 16 Maret 1998, Endang Suhendar mengikuti sebuah forum diskusi seputar AMDAL Triple Decker di LBH Jakarta.

LAIN-LAIN

Pada tanggal 19 Februari 1998, Akatiga bersama Bina Desa, YLKI, dan INFID menyelenggarakan Halal

Bilhalal Gerakan Masyarakat Madani di Wisma PKBI. Dalam kesempatan ini, hadir sebagai pembicara antara lain Bapak Emil Salim, Hetifah Sjaifudian, Zoemrotin K. Susilo, dan Abdul Hikam. Adapun yang bertindak sebagai moderator adalah Juni Thamrin dari AKATIGA.

Tujuan diselenggarakannya hal ini adalah membentuk masyarakat madani atau *Civil Society* yang akan lebih berperan dalam proses pembaharuan pada masyarakat Indonesia.

Pada tanggal 30 Maret hingga 11 April 1998, Juni Thamrin dan Frida Rustiani mengikuti Training Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang Advokasi khususnya dalam memanfaatkan media untuk kepentingan advokasi. Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta oleh Lembaga Pers Dr. Soetomo dan The Asia Foundation.

Pada tanggal 14 April 1998, Indrasari Tjandraningsih mengikuti Seminar Mencari Konsep, Keberadaan dan Strategi Mewujudkan *Civil Society* di Indonesia.

Pada bulan Mei tanggal 5 hingga 12 Mei, Hetifah Sjaifudian mengikuti International Network for NGO Capacity Building yang diselenggarakan di Belgia. Acara ini bertujuan untuk membentuk suatu jaringan kerja NGO sedunia.

Bulan Mei 1998, mulai tanggal 1 - 12, Erna E. Chotim mengikuti forum INFID di Jerman.



AKATIGA pusat analisis sosial adalah lembaga penelitian nirlaba yang melakukan berbagai kegiatan penelitian, pelatihan, penerbitan, pengembangan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan, dan advokasi kebijakan pembangunan.

Dalam menjalankan aktivitasnya, AKATIGA mengembangkan prinsip independen, multidisiplin, partisipatif, dan berorientasi pada upaya penguatan posisi masyarakat sipil, khususnya mereka yang lemah dan tertinggal dalam proses pembangunan. Upaya penguatan tersebut dilakukan melalui kajian kritis terhadap proses dan kebijakan pembangunan yang berdampak pada rakyat kecil. AKATIGA mengembangkan kegiatan-kegiatan pengembangan informasi, publikasi, dokumentasi, serta pelatihan. Hasil-hasil penelitian tersebut diolah menjadi informasi dan analisis yang ditujukan untuk perkembangan wacana maupun untuk menunjang kerja-kerja pemberdayaan dan advokasi yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah dan masyarakat akar rumput.

AKATIGA melakukan advokasi melalui kerjasama dengan jaringan-jaringan yang relevan, strategis dan mampu menjangkau komunitas/kelompok di lapisan bawah yang tersisihkan. AKATIGA juga mengembangkan jasa pelayanan dalam bentuk pelatihan metodologi penelitian yang terutama ditujukan kepada ornop. Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas analisis ornop dalam rangka menyusun strategi yang lebih tepat sasaran dan advokasi yang lebih kontekstual.

Seluruh kegiatan AKATIGA ditujukan untuk mendorong terbukanya peluang bagi perbaikan kehidupan kelompok miskin dan untuk membangkitkan kemandiriannya agar tidak terus tersisih dalam proses pembangunan.



AKATIGA

pusat analisis sosial

Jl. Tubagus Ismail II No. 2 Bandung 40134 - Indonesia
Telp. 022-2502302 - Fax. 022-2555824
Email: akatiga@indo.net.id
www.akatiga.org